



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PISKAL KALIMANTAN SELATAN



KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Selatan

TAHUN 2023



FOTO: KERBAU RAWA, AMUNTAI



djpb_kalsel



Kanwil DJPb Kalimantan Selatan



djpbkalsel



DJPb Kalimantan Selatan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Tahun 2023

KORESPONDENSI

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. D.I. Panjaitan No. 24, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114



(0511) 3354224



ppaiikalsel@gmail.com

TIM PENYUSUN

Pengarah

Syafriadi

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Local Expert

Prof. Muhammad Handry Imansyah, M.A.M., Ph.D.

Guru Besar FEB Universitas Lambung Mangkurat

Ketua Tim

Juanda

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Tim Penyusun

Bekti Hendri Atmoko

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B

Afifah Maulida

Nesya Alvi Inayah

Anggota Tim

Libra Andy Chandra Simamora

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A

Achmad Fajar Setiawan

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Yulia Astuti

Ahmad Ruhyat Firdaus

Desain Grafis

Shasza Yemima Puteri Atmodjo



KATA PENGANTAR

Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kajian Fiskal Regional Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan kajian ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* eksternal maupun internal yang antara lain berkaitan dengan perkembangan ekonomi daerah, kondisi fiskal atau keuangan pemerintah pusat dan daerah, pengembangan ekonomi daerah, dan kemampuan pajak daerah di Kalimantan Selatan.

Melalui potret indikator perekonomian yang ada, Kajian Fiskal Regional ini telah menunjukkan berbagai penguatan perekonomian dari sisi konsumsi maupun produksi yang diukur dari berbagai indikator yang kemudian didukung dengan belanja negara dan daerah yang terus diakselerasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Dalam penyusunan laporan ini, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan banyak memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak. Atas seluruh bantuan dan kerja sama tersebut, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin baik selama ini dapat terus terjaga dan meningkat pada masa yang akan datang.

Kami juga mengharapkan masukan dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi Provinsi Kalimantan Selatan, serta bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 29 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah



Syafriadi



SYAFRIADI
Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalsel

DAFTAR ISI

Kajian Fiskal Regional

BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	1
1.3 Keselarasan RPJMN dengan RPJMD	6
1.4 Tantangan Sasaran Pembangunan	8
1.4.1 Tantangan Ekonomi Daerah	8
1.4.2 Tantangan Sosial Kependudukan	10
1.4.3 Tantangan Lainnya	11
BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL	13
2.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi	13
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto	13
2.1.2 Inflasi	17
2.1.3 Neraca Perdagangan	21
2.2 Analisis Indikator Kesejahteraan	21
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	21
2.2.2 Tingkat Kemiskinan	23
2.2.3 Ketimpangan (Rasio Gini)	26
2.2.4 Tingkat Pengangguran	27
2.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP)	29
2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	30
2.3 Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional	31
BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL	35
3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi	35
3.1.1 Pendapatan Negara	36
3.1.2 Belanja Negara	39
3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD)	42
3.1.4 Surplus/Defisit APBN	46
3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat	46
3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat	49
3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah	50
3.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi	52
3.2.1 Pendapatan Daerah	53
3.2.2 Belanja Daerah	58
3.2.3 Surplus/ Defisit APBD	61
3.2.4 Pembiayaan Daerah	62

3.2.5	Perkembangan BLU Daerah	62
3.2.6	Isu Pelaksanaan APBD	64
3.3	Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian	64
3.3.1	Pendapatan Konsolidasian.....	66
3.3.2	Belanja Konsolidasian.....	66
3.3.3	Surplus/Defisit Konsolidasian.....	68
3.3.4	Pembiayaan Konsolidasian	68
BAB IV	PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH	69
4.1	Pendahuluan	69
4.1.1	Transfer ke Daerah	69
4.1.2	Harmonisasi Belanja.....	70
4.2	Gambaran Umum Harmonisasi Belanja K/L-DAK Fisik di Tingkat Wilayah	70
4.2.1	Alokasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik	70
4.3	Kendala dan Tantangan	82
4.4	Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda	85
BAB V	ANALISIS TEMATIK: SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM UPAYA PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING	87
5.1	Pendahuluan	87
5.2	Sinergi Pusat-Daerah dalam Upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	89
5.2.1	Peningkatan Kualitas SDM/Tenaga Kerja	89
5.2.2	Upaya Peningkatan Investasi.....	94
5.2.3	Pengaruh Kualitas SDM (Tenaga Kerja) dan Tingkat Investasi terhadap Tingkat Pengangguran	95
5.2.4	Analisis Perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja di Kalimantan Selatan.....	98
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	101
6.1	Kesimpulan	101
6.2	Rekomendasi.....	104
6.2.1	Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat	104
6.2.2	Rekomendasi untuk Satuan Kerja K/L	104
6.2.3	Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah	105
DAFTAR PUSTAKA		107

Tabel 1.1	Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan 2021-2026.....	2
Tabel 1.2	Sasaran Pembangunan Daerah 2021-2026	2
Tabel 1.3	Penyelarasan Visi-Misi-Tujuan RPJMN dan RPJMD	7
Tabel 1.4	Penyelarasan Target Indikator Makro Nasional dan Provinsi	7
Tabel 2.1	Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran	18
Tabel 2.2	Alokasi dan Realisasi Belanja Pengendalian Inflasi di Kalimantan Selatan	21
Tabel 2.3	Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan.....	32
Tabel 3.1	I-Account Realisasi APBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021-2023.....	35
Tabel 3.2	Nominal Komponen Pendapatan Perpajakan	36
Tabel 3.3	Kontribusi Sektor LU terhadap Penerimaan Pajak	37
Tabel 3.4	Nominal Komponen PNBP	38
Tabel 3.5	Pagu dan Anggaran Belanja per K/L Tahun 2021 - 2023.....	41
Tabel 3.6	Pagu dan Anggaran Belanja per Fungsi Tahun 2021 - 2023.....	41
Tabel 3.7	Pendapatan dan Belanja BLU s.d. Triwulan III 2023	47
Tabel 3.8	Neraca BLU s.d. Triwulan III 2023	48
Tabel 3.9	I-Account Realisasi APBD Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2023.....	53
Tabel 3.10	Nominal Komponen PAD	54
Tabel 3.11	Nominal Komponen Pendapatan Transfer	56
Tabel 3.12	Belanja per Fungsi Tahun 2021 - 2023	61
Tabel 3.13	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	65
Tabel 4.1	Alokasi Anggaran K/L secara Umum	70
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik	71
Tabel 4.3	Alokasi dan Realisasi TKD Kalsel	72
Tabel 4.4	Progres Capaian Output Harmonis	72
Tabel 4.5	Progress Capaian RO Bidang Jalan	73
Tabel 4.6	Alokasi Anggaran K/L Bidang Kesehatan dan KB	74
Tabel 4.7	Rincian Kegiatan RO Harmonis Bidang Pendidikan	78
Tabel 4.8	Rincian Kegiatan RO Harmonis Bidang Pertanian	79
Tabel 4.9	Rincian Kegiatan RO Harmonis Bidang Pedesaan	82
Tabel 4.10	Kendala Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	83
Tabel 5.1	Tabel Estimasi Dampak Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kualitas SDM.....	93
Tabel 5.2	Tabel Analisis Korelasi Sederhana antara Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Iklim Investasi Usaha dengan Realisasi Investasi	95
Tabel 5.3	Tabel Estimasi Dampak Kualitas SDM (Tenaga Kerja) dan Tingkat Investasi terhadap Tingkat Pengangguran	98
Tabel 5.4 10	Sektor Usaha dengan Tingkat Elastisitas Kesempatan Kerja Tertinggi	99

DAFTAR GAMBAR

Kajian Fiskal Regional

Gambar 5.1	Keterkaitan Sumber Daya Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi	88
Gambar 5.2	Kerangka Konseptual Analisis Tematik KFR Tahunan 2023.....	89
Gambar 5.3	Faktor yang Mempengaruhi Iklim Investasi.....	94

DAFTAR GRAFIK

Kajian Fisikal Regional

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (c-to-c)	13
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	13
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (q-to-q)	14
Grafik 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan 2023 Regional Kalimantan	14
Grafik 2.5	Harga Batubara Acuan (HBA)	15
Grafik 2.6	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kalsel	15
Grafik 2.7	PDRB Nominal Provinsi Kalimantan Selatan	15
Grafik 2.8	Harga Referensi CPO	15
Grafik 2.9	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha	16
Grafik 2.10	Inflasi Kalsel (ytd)	17
Grafik 2.11	Inflasi Kalsel (yoy)	17
Grafik 2.12	Perkembangan PDRB per Kapita	17
Grafik 2.13	Inflasi Kalsel (mtm)	17
Grafik 2.14	Perkembangan Harga Komoditas Pangan	18
Grafik 2.15	Inflasi di Kalimantan tahun 2023 (yoy)	20
Grafik 2.16	Perkembangan Neraca Perdagangan Kalsel	21
Grafik 2.17	Perkembangan IPM di Kalsel	22
Grafik 2.18	Komponen Pembentuk IPM	22
Grafik 2.19	IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2022 - 2023	22
Grafik 2.20	IPM di Regional Kalimantan	23
Grafik 2.21	Perkembangan Jumlah dan Tingkat Kemiskinan di Kalsel	24
Grafik 2.23	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kalsel (P1 dan P2)	24
Grafik 2.22	Persentase Penduduk Miskin di Kalsel menurut Daerah Tempat Tinggal ...	24
Grafik 2.24	Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan	25
Grafik 2.25	Perkembangan Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2022 di Kalimantan Selatan	25
Grafik 2.26	Gini Ratio di Kalimantan (Maret 2023)	26
Grafik 2.27	Perkembangan Gini Ratio Kalimantan Selatan	26
Grafik 2.28	Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalsel	26
Grafik 2.29	Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama	27
Grafik 2.30	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Agustus	27
Grafik 2.31	Persentase Penduduk Bekerja menurut Kegiatan Formal dan Informal	27
Grafik 2.32	Perkembangan TPT di Kalsel	28
Grafik 2.33	TPT Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kalsel	28
Grafik 2.34	TPT di Kalimantan (Agustus 2023)	28
Grafik 2.35	Perkembangan NTP di Kalsel	29
Grafik 2.36	NTP menurut Subsektor di Kalsel	29
Grafik 2.37	NTP di Kalimantan Desember 2023	30
Grafik 2.38	Perkembangan NTN di Kalsel	30
Grafik 2.39	NTN di Kalimantan September 2023	31
Grafik 3.1	Pajak Dalam Negeri 2021 - 2023	36
Grafik 3.2	Komposisi Pendapatan Perpajakan	36
Grafik 3.3	Pajak Perdagangan Internasional 2021 - 2023	36
Grafik 3.4	Tax Ratio Kalimantan Selatan 2021 - 2023	38
Grafik 3.5	Komposisi PNB	38
Grafik 3.6	PNB 2021 - 2023	39
Grafik 3.7	Alokasi dan Realisasi BPP 2021 - 2023	39

Grafik 3.8	Pagu per Jenis Belanja 2021 - 2023	39
Grafik 3.9	Realisasi per Jenis Belanja 2021 - 2023	40
Grafik 3.10	Alokasi dan Realisasi TKD 2021 - 2023	42
Grafik 3.11	Realisasi DAU 2021 - 2023	42
Grafik 3.12	Realisasi DBH 2021 - 2023	43
Grafik 3.13	Realisasi DAK Fisik 2021 - 2023	43
Grafik 3.14	Realisasi DAK Non Fisik 2021 - 2023	44
Grafik 3.15	Realisasi DID 2021 - 2023	45
Grafik 3.16	Realisasi Dana Desa 2021 - 2023	46
Grafik 3.17	Defisit APBN 2021 - 2023	46
Grafik 3.18	Penyaluran KUR di Kalsel	49
Grafik 3.19	Penyaluran UMi di Kalsel	50
Grafik 3.20	Pendapatan Asli Daerah 2021 - 2023	54
Grafik 3.21	Komposisi Pendapatan Asli Daerah	54
Grafik 3.22	Rasio PAD terhadap PDRB ADHB	55
Grafik 3.23	Rasio PAD terhadap PDRB ADHB	55
Grafik 3.24	Komposisi Pendapatan Transfer	56
Grafik 3.25	Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	57
Grafik 3.26	Pendapatan Transfer 2021 - 2023	57
Grafik 3.27	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2021 - 2023	57
Grafik 3.28	Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah 2021 - 2023	58
Grafik 3.29	Pagu Belanja Operasi 2021 - 2023	58
Grafik 3.30	Realisasi Belanja Operasi 2021 - 2023	59
Grafik 3.31	Realisasi Belanja Modal 2021 - 2023	59
Grafik 3.32	Realisasi Belanja Transfer 2021 - 2023	60
Grafik 3.33	Realisasi Belanja Tidak Terduga 2021 - 2023	60
Grafik 3.34	Pagu Belanja Transfer 2021 - 2023	60
Grafik 3.35	Surplus/Defisit APBD 2021 - 2023	61
Grafik 3.36	Komposisi Penerimaan Pembiayaan Daerah	62
Grafik 3.37	Pembiayaan APBD 2021 - 2023	62
Grafik 3.38	Komposisi Penerimaan Pembiayaan Daerah	62
Grafik 3.39	Kontribusi Pendapatan BLUD thd PAD Kalsel	63
Grafik 3.40	Kontribusi Pendapatan BLUD thd PAD Kalsel	63
Grafik 3.41	Komposisi Pendapatan Konsolidasian	66
Grafik 3.42	Pendapatan Konsolidasian 2021 - 2023	66
Grafik 3.43	Komposisi Pendapatan Konsolidasian	67
Grafik 3.44	Belanja per Kapita Kalsel 2021 - 2023	67
Grafik 3.45	Belanja Konsolidasian 2021 - 2023	67
Grafik 3.46	Pembiayaan Konsolidasian 2021 - 2023	68
Grafik 3.47	Defisit Konsolidasian 2021 - 2023	68
Grafik 4.1	Pagu DAK Fisik terhadap Total Pagu	70
Grafik 4.2	Alokasi Per Bidang RO Harmonis	71
Grafik 4.3	Perbandingan Alokasi DAK Fisik dengan Belanja Negara dan TKD	72
Grafik 5.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	90
Grafik 5.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	90
Grafik 5.3	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)	91

DAFTAR GRAFIK

Kajian Fiskal Regional

Grafik 5.4	Perkembangan Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan TPAK91
Grafik 5.5	Komposisi Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha (%) 92
Grafik 5.6	Komposisi Tenaga Kerja berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)..... 92
Grafik 5.7	Perbandingan TPT Kalsel dengan Target TPT sesuai RPJMD96
Grafik 5.8	Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja.....96
Grafik 5.9	Tingkat pengangguran menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan96
Grafik 5.10	Tingkat Pengangguran Menurut Kelompok Usia.....96
Grafik 5.11	Usia Muda (15-24) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET).....97

Halaman ini sengaja dikosongkan.

RINGKASAN *Eksekutif*

► SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

Penentuan target dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan target-target nasional yang dicanangkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024. Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2023 terus membaik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian permasalahan dan tantangan pembangunan masih akan terjadi antara lain tantangan dalam mengelola potensi sumber daya alam, tantangan dalam menciptakan iklim dan potensi investasi yang kondusif, tantangan birokrasi dan pelayanan perizinan, tantangan dukungan permodalan infrastruktur ekonomi, tantangan implementasi teknologi dalam aktivitas perekonomian dan tantangan reformasi struktural.

► ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Pada tahun 2023, perekonomian Kalimantan Selatan mengalami perlambatan, ekonomi tumbuh sebesar 4,84%, lebih rendah dari tahun 2022 yang sebesar 5,11% dan di bawah angka nasional. Sementara itu, dalam kondisi ini inflasi secara tahunan di Kalsel jauh lebih terkendali dari tahun 2022 dan lebih kecil dari inflasi nasional, yaitu mencapai 2,43% sedangkan pada tahun 2022 mencapai 6,99%. Capaian yang baik ini juga ditunjukkan pada neraca perdagangan tahun 2023 yang mencatatkan surplus sebesar 14.880,30 juta USD, walaupun jumlah ini memiliki tren yang menurun akibat termoderasinya harga batu bara dan CPO.

Capaian pembangunan manusia di Kalsel yang dihitung dengan Indeks Pembangunan Manusia, pada tahun 2023 semakin membaik yaitu sebesar 74,66 dan lebih tinggi dari nasional. Kesejahteraan masyarakat Kalsel yang salah satunya diukur dengan tingkat kemiskinan pada Maret 2023 mencapai 4,29% dan berada pada urutan ke-2 terendah di Indonesia, sementara gini ratio pada periode ini mencapai 0,313 dengan ukuran ketimpangan rendah. Kondisi ketenagakerjaan yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2023 mencapai 4,31% yang menurun dari periode sebelumnya dan lebih rendah dari angka nasional. Selanjutnya, kesejahteraan petani yang diukur dengan Nilai Tukar Petani pada tahun 2023 mencapai 109,48 yang menunjukkan peningkatan dari tahun lalu, di sisi lain Nilai Tukar Nelayan pada Desember 2023 mencapai 98,99 yang masih berada di bawah angka 100, sehingga perlu perhatian khusus oleh berbagai pihak.

► ANALISIS FISKAL REGIONAL

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mencatatkan kinerja yang lebih tinggi dari tahun lalu. Pencapaian ini ditandai dengan realisasi pendapatan negara yang telah melampaui target yaitu 130,06% atau sebesar Rp24,17 triliun, meningkat 32,55% dari capaian pada periode tahun 2022. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi 99,11% dari pagu sehingga telah menyerap Rp40,37 triliun atau meningkat 18,73% dari tahun 2022.

RINGKASAN

Eksekutif

Penentuan target dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan target-target nasional yang dicanangkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024. Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2023 terus membaik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian permasalahan dan tantangan pembangunan masih akan terjadi antara lain tantangan dalam mengelola potensi sumber daya alam, tantangan dalam menciptakan iklim dan potensi investasi yang kondusif, tantangan birokrasi dan pelayanan perizinan, tantangan dukungan permodalan infrastruktur ekonomi, tantangan implementasi teknologi dalam aktivitas perekonomian dan tantangan reformasi struktural.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 tumbuh positif dari tahun lalu. Capaian yang baik ini ditunjukkan dengan realisasi pendapatan daerah yang terkumpul Rp37.685,96 miliar atau 108,21% dari target, serta tumbuh 21,44% dari kinerja tahun sebelumnya. Selain itu, penyerapan belanja daerah juga telah dilaksanakan dengan cukup baik yaitu dengan terealisasinya belanja sebesar Rp34.395,48 miliar atau 86,70% dari pagu. Jumlah ini memiliki kenaikan sebesar 23,05% dari realisasi tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan konsolidasiannya, hingga akhir tahun 2023, diketahui pendapatan konsolidasian APBN dan APBD di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp31.609,34 miliar yang meningkat 31,08% dari tahun 2022.

Di sisi lain, belanja konsolidasian di Kalsel telah terealisasi hingga Rp46.058,24 miliar dan meningkat 21,01% dari tahun sebelumnya. Kinerja APBN yang kuat ini didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi masyarakat Kalsel yang juga ditambah dengan adanya kegiatan persiapan pemilu tahun 2024 sehingga turut mendorong kinerja fiskal di Kalsel, walaupun di sisi lain kestabilan fiskal masih dihadapkan tantangan dengan turunnya harga komoditas batu bara dan CPO yang berperan besar di Kalsel.

► PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

- Rincian Output (RO) yang sudah diidentifikasi harmonis oleh DJA dan DJPK berupa realisasi anggaran dan capaian RO Harmonis telah terserap secara optimal hingga bulan Desember 2023. Adanya permasalahan di beberapa bidang RO Harmonis terkait administratif dan teknis dapat teratasi sehingga sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bidang jalan berperan dalam meningkatkan pengembangan ekonomi melalui kelancaran distribusi dan kemudahan akses antar daerah untuk meningkatkan investasi.

RINGKASAN *Eksekutif*

► ANALISIS TEMATIK

Topik Analisis Tematik kali ini adalah “Sinergi Pusat-Daerah dalam Upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing”. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari interaksi dan partisipasi Sumber Daya Manusia. Dukungan APBN dan APBD di Kalsel dalam berbagai program di bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh untuk meningkatkan kualitas SDM (Tenaga Kerja). Selain intervensi pemerintah, keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran sektor usaha yang sangat dipengaruhi oleh iklim usaha/investasi. Penciptaan iklim usaha/investasi yang kondusif dilakukan dengan memperhatikan stabilitas politik dan sosial, stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar, sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja, regulasi dan perpajakan, birokrasi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah, dan masalah *good governance* termasuk korupsi.

Meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya pasokan tenaga kerja yang ada, apabila tidak diiringi ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada, diperlukan adanya sektor-sektor unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja. Berdasarkan hasil perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja, sektor-sektor prioritas yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan di antaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian Tanaman Pangan; Perkebunan Semusim dan Tahunan; Konstruksi; Jasa Pendidikan Swasta; Industri Makanan dan Minuman; Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Swasta Lainnya; serta Penyediaan Makan Minum.



Halaman ini sengaja dikosongkan.

DASHBOARD EKONOMI REGIONAL

Kabimantan Selatan

INDIKATOR MAKRO EKONOMI

PERIODE TRIWULAN IV 2023

PERTUMBUHAN EKONOMI

Y-on-Y **4,69%**

Q-to-Q **-0,18%**

C-to-C **4,84%**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB ADHB

Rp68,83 triliun

PDRB ADHK

Rp38,49 triliun

PDRB LAPANGAN USAHA

5 Lapangan Usaha dengan Share PDRB Terbesar

Pertambangan
Penggalian
32,05%

Pertanian
Perikanan
11,42%

Industri
Pengolahan
11,37%

Perdagangan
Beser Eceran
9,06%

Transportasi
Pengudangan
6,28%



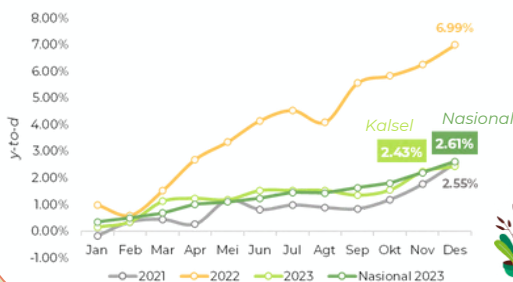
TINGKAT INFLASI

PERIODE DESEMBER 2023

M-to-M **0,18%**

Y-to-D **2,43%**

Y-on-Y **2,43%**



INFLASI DI 3 KAB/KOTA

Banjarmasin
2,28%

Kotabaru
3,81%

Tanjung
2,39%

KONTRIBUTOR INFLASI

Ikan Gabus
0,15%

Bawang Merah
0,05%

Daging Ayam
Ras
0,03%

INDIKATOR KESEJAHTERAAN

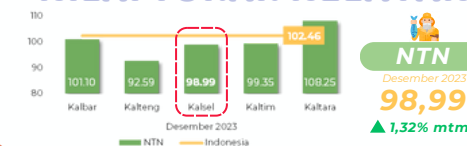
PERIODE TRIWULAN IV 2023

NILAI TUKAR PETANI



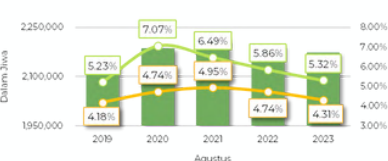
NTP
Desember 2023
113,16
▲ 0,70% mtm

NILAI TUKAR NELAYAN



NTN
Desember 2023
98,99
▲ 1,32% mtm

TINGKAT PENGANGGURAN



TPT
Agustus 2023
4,31%
▼ 9,07% yoy

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

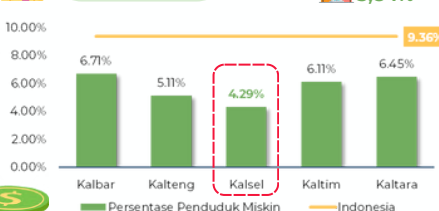


IPM
Tahun 2023
74,66
▲ 0,89% yoy

TINGKAT KEMISKINAN

Maret 2023

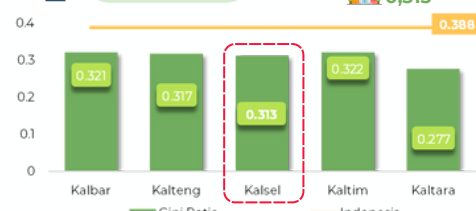
4,29%
188,93 ribu jiwa
▼ 3,46% yoy
Pedesaan **4,72%**
Perkotaan **3,84%**



TINGKAT KETIMPANGAN

Maret 2023

0,313
▼ 1,26% yoy
Pedesaan **0,259**
Perkotaan **0,313**



DASHBOARD FISKAL REGIONAL

Kalimantan Selatan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

S.D. TRIWULAN IV 2023

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH ▲ 32,55% yoy



s.d. Triwulan IV 2022
Realisasi 125,54%

Rp18.237,23 M

s.d. Triwulan IV 2023
Realisasi 130,06%

Rp24.173,82 M

① Penerimaan Perpajakan
Rp21.475,31 M

▲ 27,78% yoy

② Penerimaan Negara Bukan Pajak
Rp2.698,51 M

▲ 88,58% yoy

BELANJA NEGARA ▲ 18,72% yoy



s.d. Triwulan IV 2022
Realisasi 87,28%

Rp34.000,34 M

s.d. Triwulan IV 2023
Realisasi 99,11%

Rp40.370,02 M

① Belanja Pemerintah Pusat
Rp8.687,48 M

▲ 7,28% yoy

② Transfer ke Daerah
Rp31.682,54 M

▲ 22,31% yoy

DEFISIT ANGGARAN ▼ 2,75% yoy

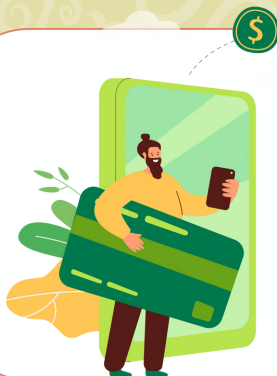


s.d. Triwulan IV 2022
Realisasi 64,53%

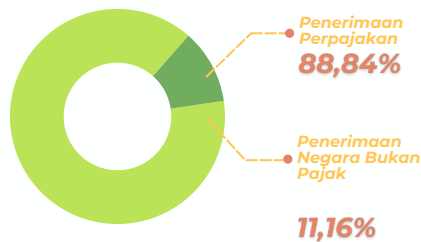
-Rp15.763,10 M

s.d. Triwulan IV 2023
Realisasi 73,14%

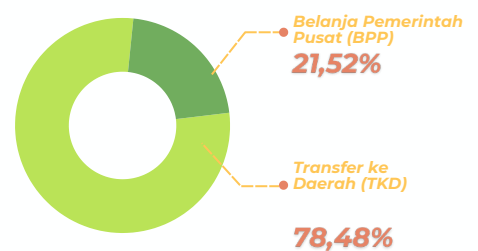
-Rp16.196,20 M



PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH



BELANJA NEGARA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

S.D. TRIWULAN IV 2023

PENDAPATAN DAERAH ▲ 21,44% yoy



s.d. Triwulan IV 2022
Realisasi 107,50%

Rp31.033,60 M

s.d. Triwulan IV 2023
Realisasi 108,21%

Rp37.685,96 M

① Pendapatan Asli Daerah
Rp8.944,65 M

▲ 27,66% yoy

② Pendapatan Transfer
Rp26.423,20 M

▲ 21,36% yoy

③ Transfer Antar Daerah
Rp2.221,88 M

▲ 6,75% yoy

④ LLPDyS
Rp96,23 M

▼ 44,60% yoy

BELANJA DAERAH ▲ 23,05% yoy



s.d. Triwulan IV 2022
Realisasi 89,36%

Rp27.951,46 M

s.d. Triwulan IV 2023
Realisasi 86,70%

Rp34.395,48 M

① Belanja Operasi
Rp20.816,74 M

▲ 15,04% yoy

② Belanja Modal
Rp8.301,90 M

▲ 61,05% yoy

③ Belanja Tidak Terduga
Rp45,44 M

▼ 52,68% yoy

④ Belanja Transfer
Rp5.231,41 M

▲ 13,60% yoy

SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN ▲ 6,76% yoy



s.d. Triwulan IV 2022
Realisasi -127,77%

Rp3.082,15 M

s.d. Triwulan IV 2023
Realisasi -67,88%

Rp3.290,48 M

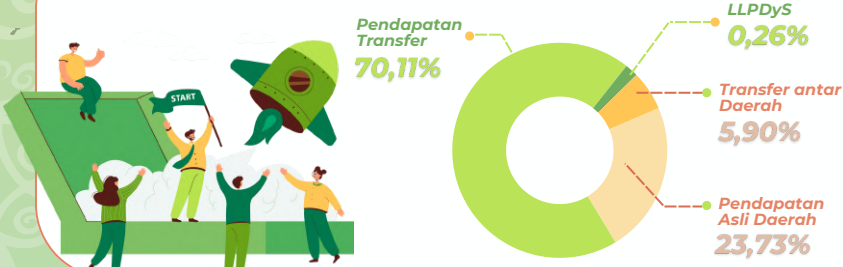
① Penerimaan Pembiayaan
Rp4.812,92 M

▲ 63,39% yoy

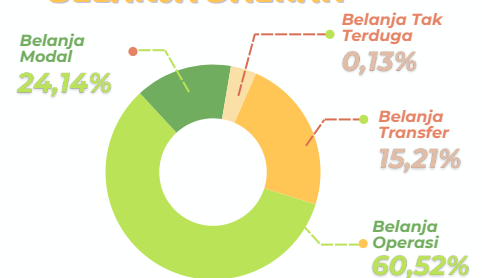
② Pengeluaran Pembiayaan
Rp696,93 M

▲ 46,54% yoy

PENDAPATAN DAERAH



BELANJA DAERAH



BAB I: SASARAN PEMBANGUNAN & TANTANGAN DAERAH

KAJIAN FISKAL REGIONAL *Kalimantan Selatan*

1

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021-2024 “Makmur Sejahtera Berkelanjutan”, dituangkan dalam misi yang berfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM, mendorong perekonomian yang merata, serta memperkuat sarana dan prasarana dasar perekonomian.

2

Isu strategis sekaligus tantangan Kalimantan Selatan berkenaan kualitas lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, penguatan ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta posisi sebagai gerbang ibu kota negara baru.

3

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional.



BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

1.1 Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan mencapai keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adil dan merata. Dalam prosesnya, mewujudkan tujuan tersebut diperlukan dukungan pendanaan, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara pada prinsipnya telah mengatur pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan Negara di masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam hal fiskal pemerintah yang tertuang dalam APBN dan APBD, di tataran implementasi kebijakannya memerlukan sinergi dan harmonisasi agar fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat efektif mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Tujuan negara diuraikan ke dalam perencanaan pembangunan nasional dengan rencana yang terbagi dalam jangka Panjang (RPJP Nasional/Daerah), jangka menengah (RPJM/RPJMD), dan jangka pendek (RKP/RKPD). Setiap rencana dengan rentang periode lebih pendek menjadi titik anjak bagi rencana dengan periode yang lebih panjang, sehingga tercipta koherensi dan kontinuitas dalam perencanaan pembangunan nasional.

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2021-2026, kebijakan pembangunan dalam RPJMD diarahkan untuk mencapai target akhir pembangunan jangka panjang provinsi, melaksanakan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, dan sekaligus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Visi yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan adalah KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur

Sejahtera Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara, yang kemudian dituangkan dalam beberapa misi yaitu:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Luhur.
Pelaksanaan atas misi ini diwujudkan melalui rencana proyek prioritas daerah, yang meliputi memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyakit menular, penurunan perkawinan anak, penurunan stunting, AKI/AKB berbasis pemberdayaan desa wisma, meningkatkan Pendidikan vokasi berbasis *"link and match"*, berbasis digital, serta memperkuat nilai keagamaan dan sosial budaya, dan meningkatkan indeks kepemudaan dan olahraga.
- 2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
Perwujudan atas misi ke-2 berupa meningkatkan ekonomi melalui transformasi struktur ekonomi dari komoditas bahan mentah ke industri turunannya (hilirisasi) dan sektor-sektor produktif lainnya. Misi dilaksanakan melalui proyek prioritas Daerah yang meliputi hilirisasi pertambangan dan pertanian, mendorong ekonomi syariah, mengembangkan pariwisata berbasis (ekowisata), mendorong ekonomi kreatif kearifan lokal berbasis teknologi digital, serta mendorong perdagangan berbasis digital.
- 3) Memperkuat Sarana dan Prasarana Dasar Perekonomian.
Proyek prioritas daerah yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi ke-3 ini meliputi pemenuhan sarana prasarana standar hidup layak, pembangunan kawasan industri untuk mendukung IKN, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan pertumbuhan ekonomi, serta penyediaan sumber energi terbarukan, dan pemenuhan akses internet.
- 4) Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
Misi ke-4 ini dilaksanakan melalui proyek prioritas pengembangan *smart province*, perizinan melalui *Online Single Submission* serta menjaga stabilitas polhukam.

- 5) Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana. Sebagai pelaksanaan misi ke-5 ini, proyek prioritas yang dijalankan berupa pembangunan ramah lingkungan, revolusi hijau, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengendalian banjir, serta pengendalian pencemaran lingkungan.

Selanjutnya untuk memastikan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan di Kalimantan Selatan sebagaimana visi dan misi Kepala Daerah Kalimantan selatan terpilih periode 2021-2024, perlu dilakukan pengukuran

atas indikator-indikator tersebut sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kalimantan Selatan.

Target dan sasaran pembangunan dalam RPJMD 2021-2026 untuk aspek Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi serta Fokus Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan 2021-2026

Aspek Indikator	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,1-2,6	5,53	4,0-4,5	5,32	4,5-5,2	4,57	5,2-6,0	6,0-6,24	6,24-6,50
Inflasi	5,00	0,76	2,0-4,0	2,95	2,0-4,0	2,43	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0
IPM	71,68	73,45	72,46	74,00	72,95	74,66	73,44	73,98	74,41
Kemiskinan (%)	4,01	4,83	4,80-4,60	4,49	4,60-4,40	4,29	4,40-4,22	4,22-4,05	4,05-3,77
Pengangguran (%)	4,5-5,0	4,95	3,95-4,2	4,74	3,7-4,0	4,31	3,5-3,8	3,3-3,6	3,1-3,4
Rasio Gini	0,286	0,330	0,328	0,317	0,326	0,313	0,324	0,322	0,310
Nilai Tukar Petani (%)									
Nilai Tukar Nelayan(%)	101	107,59	102,33	107,33	102,7	109,48	103,18	103,69	103,8
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,38	8,34	8,47	8,46	8,56	8,55	8,65	8,74	8,83
Angka Harapan Hidup	69,64	68,83	70,64	69,13	71,05	69,42	71,46	71,99	72,30

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 (data diolah)

RPJMD 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut berikut.

Tabel 1.2 Sasaran Pembangunan Daerah 2021-2026

	Tujuan		Sasaran	Indikator Kinerja		Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1	Pemenuhan standar minimum pendidikan
				Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	2	Peningkatan akses layanan pendidikan	2	Revitalisasi Pendidikan sesuai Kebutuhan Tenaga Kerja (<i>Link and Match</i>)
							3	Beasiswa pendidikan
							4	Pengembangan pendidikan filial
		2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	3	Peningkatan promosi Kesehatan Masyarakat	5	Mengembangkan model promosi kesehatan berbasis elektronik
							6	Meningkatkan peran serta masyarakat melalui GERMAS
					4	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	7	Standarisasi pelayanan bidang kesehatan Fisik dan Mental
2		1	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri,	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan	1	Peningkatan produksi pertanian dengan Penyediaan	1	Pengawasan, penataan peredaran sarana - prasarana pertanian

Meningkatnya perekonomian daerah	Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	dan Perikanan (%)		dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	2	Pengendalian dan pengawasan mutubenh dan obat-obatan
					3	Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) hewan (Itik Alabio, dan Kerbau Rawa), tumbuhan dan mikroorganisme
					4	Peningkatan penyediaan mutu benih dan bibit
					5	Pengembangan dan Pengelolaan Kelapa Sawit berbasis RAD KSB
			2	Peningkatan produksi perikanan budidaya di perairan laut dan air tawar	6	Peningkatan Penerbitan izin usaha perikanan budidaya
					7	Peningkatan Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut
			3	Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	8	Penyediaan infrastruktur pangan
			4	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat, serta pengembangan UMKM	9	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					10	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
					11	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			5	Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan	12	Penurunan Desa Rawan Pangan
					13	Peningkatan komoditas pangan yang aman dikonsumsi
		LPE Sektor Industri Pengolahan (%)	6	Peningkatan perencanaan pembangunan industri	14	Penyusunan rencana pembangunan industri ramah lingkungan
					15	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana prasarana industri
		LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (%)	7	Pengembangan Ekspor	16	Peningkatan promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan
			8	Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	17	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri
		LPE sektor Penyediaan akomodasi	9	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	18	Pengelolaan daya tarik, Kawasan Strategis dan destinasi pariwisata

				dan makan minum (%)		19	Peningkatan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
						20	Penyediaan sarana prasarana usaha kreatif
						21	Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		2	Meningkatnya Investasi yang berdampak ke daerah	Nilai Realisasi PMA & PMDN industri dan pertanian (Rp.)	11	22	Peningkatan pemberian fasilitas di bidang penanaman modal
						23	Pembuatan Peta Promosi Investasi
					12	24	Penyediaan Pelayanan Terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan	1	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Mandiri (%)	1	1	Penguatan Data dan Informasi PPKS
						2	Rencana Penanganan PPKS Terpadu
		2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (juta Rp/orang)	2	3	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
						4	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
					3	5	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
						6	Peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
					4	7	Peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi perdesaan
					5	8	Pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
						9	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
					6	10	Pengembangan Kapasitas Penyuluh dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani dalam bentuk Korporasi Petani berbasis Food Estate sesuai karakteristik Kalimantan selatan

					7	Menjaga Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	11	Pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
							12	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
					8	Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian dan kelembagaan ekonomi pertanian	13	Pengembangan Kapasitas Penyuluh dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani dalam bentuk Korporasi Petani berbasis Food Estate sesuai karakteristik Kalimantan selatan
4	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	1	Peningkatan Perencanaan Tenaga Kerja	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro
					2	Peningkatan Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
							3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan	1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar untuk pemenuhan standar hidup layak	Indeks Infrastruktur Dasar wilayah	1	Pemenuhan infrastruktur dasar Perumahan dan Permukiman	1	Meningkatkan dan mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana AirBaku
							2	Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum
							3	Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
							4	Meningkatkan pengelolaan persampahan yang terintegrasi antar wilayah
							5	Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat dengan mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman
							6	Meningkatkan pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
							7	Meningkatkan pola hubungan lintas sektor dalam penanganan pencapaian infrastruktur dasar permukiman
		2	Meningkatnya konektivitas yang menghubungkan antar kawasan	Rasio konektivitas	2	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi yang nyaman dan aman untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah pembangunan	8	Meningkatkan kemandirian jalan dan jembatan diseluruh daerah
							9	Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah yang menjadi strategis daerah
							10	Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis sungai, rel dan jalan yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	1	Peningkatan pencegahan korupsi	1	Mengembangkan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

	dan Daya Saing Daerah						
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	IKLH (IKA, IKU, IKL, IKAL)	1	Pengoptimalan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1 Mengoptimalkan penerapan instrumen lingkungan dan penegakan hukum 2 Meningkatkan peran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH
8	Meningkatnya Ketahanan Bencana	3	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1	Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana	1 Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan 2 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 3 Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana

1.3 Keselarasan RPJMN dengan RPJMD

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Guna menjamin keselarasan dan sinkronisasi antar tahapan pembangunan, sehingga disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap 5 (lima) tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun dengan mengacu pada RPJMD.

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
- 2) Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa
 - 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 - 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Penyelarasan Visi-Misi Tujuan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan berikut.

Tabel 1.3 Penyelarasan Visi-Misi-Tujuan RPJMN dan RPJMD

Misi RPJMN	Misi RPJMD	Tujuan RPJMN	Tujuan RPJMD
Misi-1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi-1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatnya Toleransi dan Nilai-nilai Keagamaan
Misi-5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa			
Misi-7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga			
Misi-2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi-2: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Daerah Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Misi-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi-3: Memperkuat Sarana Prasarana dan Perekonomian	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan Menurunnya tingkat Pengangguran
Misi-6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, bermartabat dan terpercaya	Misi-4: Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing daerah
Misi-8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya			
Misi-9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan			
Misi-4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi-5: Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim	Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Ketahanan Bencana

Sumber: RPJMN 2020-2024, RKP 2021, RKP 2022, RKP 2023

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Selain itu target-target

nasional yang dicanangkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, berikut target RPJMN dan RPJMD.

Tabel 1.4 Penyelarasan Target Indikator Makro Nasional dan Provinsi

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024 Target					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi Target						
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,4-5,7	5,7-6,0	5,3-5,9	6,2-6,5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,81	3,48	4,0-4,5	4,5-5,2	5,2-6,0	6,0-6,24	6,24-6,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2-9,7	7,5-8,0	8,5-7,5	6,0-7,0	Tingkat Kemiskinan (%)	4,38	4,83	4,80-4,60	4,60-4,40	4,40-4,22	4,22-4,05	4,05-3,77

3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	5,9-6,5	4,4-4,9	6,0-5,3	3,6-4,3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,47	4,95	4,39	4,22	4,05	3,88	3,71
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,91	71,28	71,70	72,20	72,65	73,05	73,60
5	Rasio Gini	0,385	0,377-0,382	0,374-0,378	0,378-0,375	0,360-0,374	Indeks Gini	0,332	0,330	0,326	0,326	0,324	0,322	0,310
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	26	26,3	26,7	27	27,3	Penurunan Gas Rumah Kaca (%)	16,5	18,0	21,0	22,2	24,6	26,6	28,9

Sumber: RPJMN 2020-2024, RKP 2021, RKP 2022, RKP 2023

1.4 Tantangan Sasaran Pembangunan

Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2023 terus membaik seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian permasalahan pembangunan masih akan terjadi. Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang ada, maka pemetaan tantangan yang dihadapi oleh Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

1.4.1 Tantangan Ekonomi Daerah

Dominannya sektor pertambangan dan penggalan dalam struktur perekonomian daerah menjadi salah satu yang membuat struktur ekonomi berkelanjutan masih belum kuat. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalan harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbarui sumber dayanya, sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur

ekonomi ke sektor lain seperti Industri, Pertanian dan Pariwisata dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk ke depannya. Oleh karenanya, tantangan ekonomi daerah Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Tantangan dalam mengelola potensi sumber daya alam, beserta penciptaan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam

Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Potensi sumber daya tersebut selama ini cukup tinggi sehingga menyebabkan berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Degradasi lingkungan akibat proses eksploitasi terhadap lahan dan tanah, seperti yang terjadi pada proses penambangan timah, emas, batu bara dan lain sebagainya. Dari capaian indeks lingkungan hidup menjelaskan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan belum berjalan dengan baik, hal ini menunjukkan pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal. Tantangan dalam mengelola potensi sumber daya alam yaitu belum terdiversifikasinya sektor ekonomi serta hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam hal ini menyebabkan struktur perekonomian daerah berkelanjutan yang masih belum kuat.

2) Tantangan dalam menciptakan iklim dan potensi investasi yang kondusif

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) memberikan tantangan sekaligus peluang investasi bagi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga IKN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus dapat merencanakan pembangunan infrastruktur untuk akses yang lebih strategis untuk menopang IKN menjadi prioritas ke depannya. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sebagai gerbang IKN

menjadi tantangan dalam meningkatkan potensi investasi di Kalimantan Selatan.

3) Tantangan birokrasi dan pelayanan perizinan

Dalam perwujudan *good governance* di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability, transparency, predictability, dan participation*. Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Perlunya indikator kinerja secara berjenjang dari level instansi sampai dengan individu untuk memastikan setiap level organisasi memiliki kontribusi yang jelas untuk pencapaian sasaran instansinya. Tantangan birokrasi yang dihadapi yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan ke masyarakat berbasis digital dan belum efektifnya peningkatan tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap pelayanan perizinan.

4) Tantangan dukungan permodalan, infrastruktur ekonomi

Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas memerlukan dukungan permodalan cukup besar. Keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa tantangan yang dihadapi yaitu: (1) Perpindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur. (2) Tingkat kemandirian fiskal yang masih belum optimal dalam penyediaan sumber pendanaan pembangunan. (3) Masih tingginya proporsi belanja operasional (penunjang) sehingga belum dapat optimal percepatan pembangunan. (4) Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran pembangunan. (5) Belum optimalnya sinkronisasi anggaran daerah dan sasaran pembangunan nasional. (6) Proporsi penyerapan anggaran yang kurang optimal rendah di awal dan menumpuk di akhir tahun anggaran.

5) Tantangan implementasi teknologi dalam aktivitas perekonomian

Sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah

pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sebab, akses internet inilah yang memengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia.

Saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau besar saja seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Data tersebut dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia. Diharapkan dengan adanya program pembangunan internet, nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian.

Tantangan selanjutnya dalam menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia ialah mengenai sumber daya manusia. Sumber daya profesional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan transaksi digital di Kalimantan Selatan belum optimal sehingga masih diperlukan edukasi tentang manfaat digital ekonomi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

6) Tantangan reformasi struktural

Agenda reformasi struktural merupakan salah satu fokus pemerintah sejak awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Melalui reformasi struktural, pemerintah berharap mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan investasi, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak potensi perekonomian yang dapat didorong untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Agenda reformasi struktural mentransformasikan perekonomian untuk mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dan juga inklusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Reformasi struktural di Kalimantan Selatan perlu dipercepat untuk meningkatkan masuknya investasi daerah.

Beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya sumber daya manusia yang belum berdaya saing, belum kuatnya struktur perekonomian daerah, pengelolaan lingkungan

hidup yang belum optimal, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata dan berkualitas.

Masih tingginya dominasi sektor pertambangan, harus segera diantisipasi melalui berbagai upaya antara lain pengembangan agrobisnis/agroindustri dan pengembangan investasi.

1.4.2 Tantangan Sosial Kependudukan

Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), penduduk Kalimantan Selatan pada bulan September 2020 mencapai 4,07 juta jiwa. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan masih terbanyak kedua di pulau Kalimantan, berada di bawah Kalimantan Barat, serupa dengan peringkat hasil sensus-sensus sebelumnya. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan di tahun 2020 berada di peringkat ke-18 dari 34 provinsi, berada di bawah Papua (4,30 juta jiwa) dan di atas Kalimantan Timur (3,77 juta jiwa).

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berdampak positif maupun negatif pada tingkat produktivitas tergantung pada seberapa besar peningkatan imbal balik penggunaan sumber daya alam. Di sisi lain, semakin besar jumlah penduduk dapat meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar dengan semakin banyaknya sumber daya manusia. Dengan demikian, hubungan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada perkembangan kualitas sumber daya manusia dan imbal balik penggunaan sumber daya alam.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. IPM bisa digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam kaitannya dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia yang berkualitas akan berimbas pada peningkatan produktivitas dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan.

Masalah kependudukan tidak akan lepas dari faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Termasuk di sini adalah mengenai distribusi atau persebaran penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata tidak hanya terjadi di Indonesia

secara umum tetapi juga pada provinsi-provinsi secara khusus, tidak terkecuali Kalimantan Selatan.

Perumusan tantangan aspek sosial kependudukan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2022, meliputi:

1) Kondisi Demografi

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wilayah paling kecil di Pulau Kalimantan dan secara struktur astronomi terletak pada titik koordinat 11401'33" Bujur Timur -116033'28" Bujur Timur, 1021'49" Lintang Selatan – 1010'14" Lintang Selatan. Kondisi geografis Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- Luas Laut Berdasarkan 12 Mil Laut = 2.307.558 Ha
- Panjang Garis Pantai Keseluruhan = 1.330 Km
- Jumlah Pulau-Pulau Kecil = 172 Pulau
- Luas Rawa = 235.561 Ha (6,07% Dari Luas Daratan Kalsel)
- Luas Hutan = 1.660.722 Ha (45% Dari Luas Daratan Kalsel)
- Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 37.530,52 km² yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota dengan rincian 154 kecamatan dan 2.007 desa/kelurahan.

Adapun wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara administrasi berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

2) Struktur dan Jumlah Penduduk

Penduduk Kalimantan Selatan selama kurun waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 berjumlah

4.073.584 jiwa, sementara pada tahun 2016 berjumlah 4.055.479 jiwa yang diambil dari Hasil Proyeksi penduduk Tahun 2010-2035 BPS RI (2014-2019). Penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 jika dilihat dari jenis kelamin, hampir berimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yaitu 50,75% penduduk laki-laki dan 49,25% penduduk perempuan. Perlu dilakukan pengendalian jumlah penduduk agar struktur penduduk muda tidak berdampak negatif dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Tantangan sosial kependudukan di Kalimantan Selatan di antaranya kemiskinan ekstrem yang masih membayangi Kalimantan Selatan. Meskipun angka kemiskinan di Kalimantan Selatan sudah menurun namun perlu dijaga di antaranya melalui pemanfaatan dana desa untuk membantu masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran.

3) Karakteristik Masyarakat

Kalimantan Selatan merupakan provinsi di Indonesia yang terkenal dengan julukan kota 1000 sungai. Letak geografis Kalimantan Selatan yang memiliki banyak lahan basah terutama sungai mempengaruhi pola kebudayaan hingga aktivitas yang dilakukan masyarakat. Di kota Banjarmasin, penduduk tinggal di bantaran Sungai dengan orientasi rumah menghadap sungai. Sungai keberadaannya dimanfaatkan sebagai tempat untuk hidup, melakukan aktivitas sosial, ekonomi, hingga sebagai jalur transportasi.

4) Adat Istiadat

Tihang Bakambang adalah aruh adat sebagai bentuk rasa syukur pada penguasa alam semesta atas rejeki atau keberhasilan baik itu panen padi, usaha atau keberhasilan-keberhasilan lainnya dalam kurun waktu satu tahun perhitungan cocok tanam.

5) Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kalimantan Selatan beraneka ragam. Tidak sedikit penduduk yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pegawai negeri sipil. Namun tidak sedikit angkatan kerja yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, Pemda di Kalimantan Selatan terus berupaya menurunkan tingkat pengangguran. Hingga saat ini, isu strategis

ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kalsel adalah tingkat pengangguran yang tinggi, dalam hal ini Pemda di Kalsel melakukan upaya melalui kartu prakerja dengan memberikan pelatihan sebagai ilmu yang bisa digunakan untuk mencari kerja.

6) Tingkat Pendidikan

Rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal angkatan kerja provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh tamatan (maksimal) sekolah dasar, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan tidak pernah sekolah. Sumber Daya Manusia yang belum berdaya saing, dilihat dari kesenjangan kualitas hidup manusia antar daerah di Kalimantan Selatan yang masih tinggi khususnya yang tecermin pada angka IPM, rata-rata Usia Harapan Hidup, serta angka Rata-rata Lama Sekolah.

7) Pola Kesehatan Masyarakat

Angka prevalensi *stunting* masih cukup tinggi di Kalimantan Selatan, sehingga perlu dilakukan upaya penurunan *stunting* dengan melibatkan berbagai instansi. Melalui penyediaan air minum yang layak, pemenuhan gizi bagi anak *stunting* dan berbagai upaya penyuluhan menjalankan pola hidup sehat dan pendampingan keluarga di harapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* dan juga angka kematian ibu dan bayi.

1.4.3 Tantangan Lainnya

1) Tantangan Geografis Wilayah

Kondisi geografis regional yang dapat menjadi faktor pendorong maupun menjadi penghambat pengembangan ekonomi suatu regional. Tantangan geografis wilayah di Kalimantan Selatan, seperti:

1. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alamnya. Meski demikian, Provinsi Kalimantan Selatan yang beribukota di Banjarbaru berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut dan memiliki banyak anak sungai. Sebagian besar wilayah di Kalimantan Selatan dilalui oleh anak sungai sehingga sangat rentan dengan dampak perubahan iklim. Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan tidaklah seimbang. Wilayah yang padat penduduknya

didominasi daerah perkotaan seperti Kota Banjarmasin (8.606 jiwa/km²) dan Banjarbaru (606 jiwa/km²). Sedangkan daerah Kabupaten seperti Kotabaru kepadatannya hanya 31 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan menjadi tujuan atau destinasi bagi para pendatang. Untuk mencegah persebaran penduduk yang tidak merata Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

2. Kontur dan kondisi geografis Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah. Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kalimantan Selatan kaya akan hasil tambang sehingga menjadi mata pencaharian penduduk di samping menjadi petani atau nelayan.

2) Tantangan Pemulihan Ekonomi

Secara umum, langkah kebijakan pemulihan ekonomi daerah diambil dengan memperhatikan arahan Pemerintah, yang fokus pada tiga aspek, yakni: menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya golongan tidak mampu melalui penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan.

Permasalahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di antaranya yaitu:

1. Keterbatasan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan investasi.
2. Belum terserapnya angkatan kerja sehingga terjadi pengangguran terbuka.
3. Belum optimalnya Kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan lain di luar APBD dan berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Optimalisasi belanja modal dengan lebih memperhatikan *quality of spending* sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

BAB II: ANALISIS EKONOMI REGIONAL

KAJIAN FISKAL REGIONAL *Kabimantan Sebatan*

1

Pada tahun 2023, ekonomi Kalsel tetap tumbuh sebesar 4,84% walaupun menunjukkan tren perlambatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,11%.

2

Inflasi di Kalsel pada tahun 2023 semakin terkendali, yang ditandai dengan tingkat inflasi 2,43% dan lebih rendah dari capaian tahun lalu 6,99%.

3

Neraca perdagangan di Kalsel masih menunjukkan tren penurunan dari tahun 2022 akibat turunnya harga komoditas batu bara dan CPO, namun masih mencatatkan surplus 14.880,30 juta USD.

4

Persentase penduduk miskin di Kalsel pada Maret 2023 mencapai 4,29% yang lebih rendah dari tahun 2022 dan menduduki kemiskinan terendah ke-2 di Indonesia.

5

Pada Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalsel mencapai 4,31% yang masih didominasi oleh TPT yang berasal dari tamatan SMA.

6

Pada Maret 2023, Gini Ratio Kalsel mencapai 0,313 dan tergolong ketimpangan rendah.

7

Pada tahun 2023, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat 109,48 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Desember 2023 ini mencapai 98,99 sehingga capaian ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.





BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL

2.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi

Perekonomian Indonesia selama tahun 2023 tetap tumbuh positif dengan tren yang cukup fluktuatif. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2023 semakin menguat dibandingkan triwulan sebelumnya.

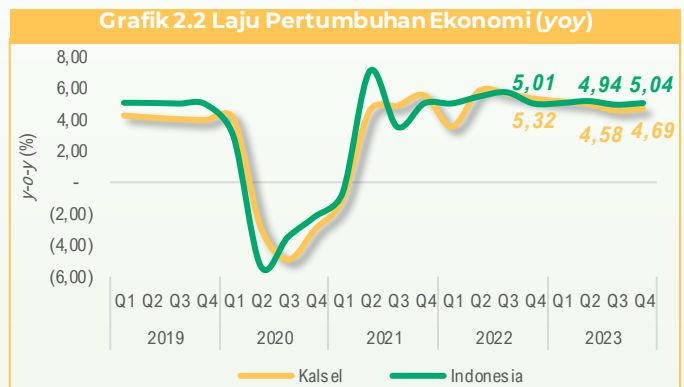
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat tahun 2023 ini mampu tumbuh mencapai 5,05% secara *year-on-year* (yoy) atau lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang mencapai 4,94% yoy di tengah berbagai tantangan ekonomi global, seperti potensi perlambatan ekonomi, tekanan geopolitik, risiko inflasi, hingga perubahan iklim. Prospek ke depannya, ekonomi Indonesia dinilai masih akan memiliki capaian optimal yang ditunjukkan dari proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2025 diprediksi masih akan menyentuh angka sekitar 5%, yang masih di atas rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia.

Jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2023 ini, pertumbuhan tertinggi ekonomi Indonesia dari sisi lapangan usaha disumbang oleh sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh hingga 13,96% c-to-c. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan yang relatif signifikan dialami oleh konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPR) sebesar 9,83% c-to-c.

Di sisi lain, pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan sektor konstruksi yang tetap terjaga merupakan implikasi dari upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menstimulasi perekonomian nasional pada triwulan IV tahun 2023, di antaranya seperti kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pemberian subsidi biaya administrasi bagi perumahan masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR), penebalan bantuan sosial untuk mitigasi El Nino dan menjaga daya beli, serta akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai upaya lainnya juga turut dilakukan dari sisi regional, tak terkecuali Kalimantan Selatan. Kinerja perekonomian dan kesejahteraan di Kalimantan Selatan disajikan dalam informasi sebagai berikut.

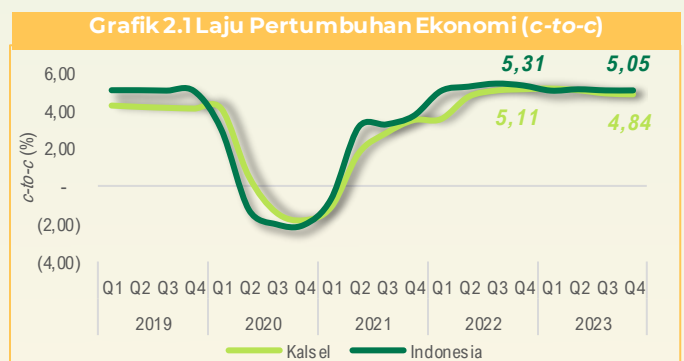
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS (diolah)

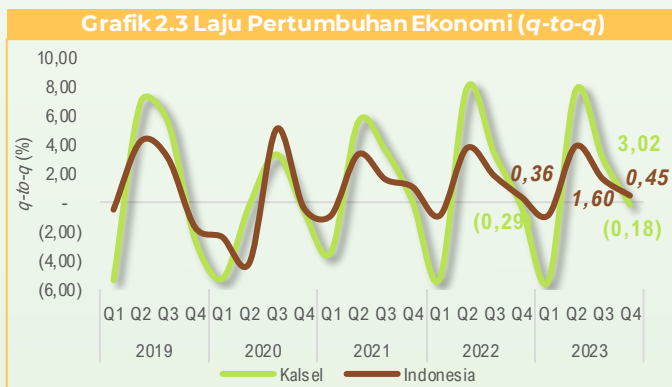
Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan menunjukkan pola yang cukup fluktuatif. Kinerja perekonomian yang sempat menurun tajam pada tahun 2020 akibat pandemi, kini sudah menunjukkan peningkatan bahkan lebih tinggi dari sebelum adanya pandemi. Walaupun demikian, jika dilihat pada grafik, pertumbuhan secara yoy cenderung mengalami perlambatan. Pada triwulan IV tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mencapai 4,69% yoy atau lebih tinggi 2,40% dari triwulan sebelumnya, namun di sisi lain laju pertumbuhan pada triwulan ini mengalami perlambatan hingga 11,84% dari periode yang sama pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan nasional, sama seperti periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan masih tergolong lebih rendah dari angka nasional. Pada triwulan IV 2023 ini, perekonomian Kalimantan Selatan didorong oleh Lapangan Usaha (LU) Transportasi dan Pergudangan yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,68% secara yoy. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen PK-LNPR mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,85% yoy.



Sumber: BPS (diolah)

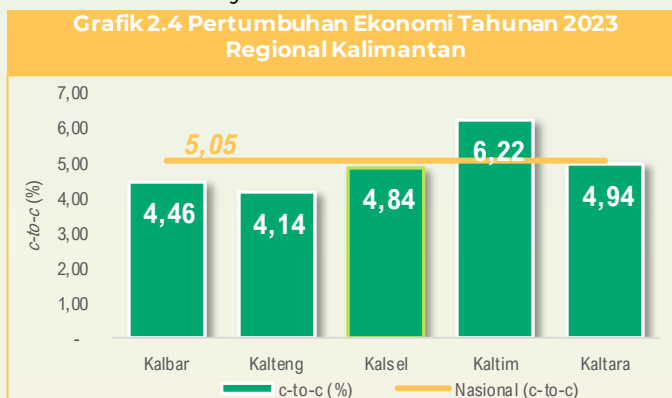
Pada tahun 2023, perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh 4,84% c-to-c yang didorong oleh LU Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh hingga 11,18% secara c-to-c dan dari sisi pengeluaran didorong oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 8,32% c-to-c.

Jika dilihat berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi, LU Pertambangan dan Penggalan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,77%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang tumbuh sebesar 2,40%.



Sumber: BPS (diolah)

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan q-to-q atau triwulanan berantai menunjukkan kontraksi sebesar 0,18%. Jika dibandingkan triwulan sebelumnya, besaran laju pertumbuhan ekonomi secara q-to-q mengalami penurunan seperti pola historis di triwulan IV pada tahun-tahun sebelumnya.



Sumber: BPS (diolah)

Kalimantan Selatan menduduki urutan ke-3 pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2023 di regional Kalimantan sebagaimana yang ditampilkan pada grafik berikut.

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi secara *year-on-year* pada triwulan IV 2023 berada di urutan ke-2 terendah di regional Kalimantan. Paling tinggi berada di Kalimantan Tengah (6,49% yoy), Kalimantan Timur (5,76% yoy), Kalimantan Barat (4,90% yoy), Kalimantan Selatan (4,69% yoy) dan Kalimantan Utara (4,61% yoy). Perekonomian di Kalimantan Selatan berkontribusi sebesar 15,45% terhadap PDRB-Regional Kalimantan.

2.1.1.2 Nominal PDRB

Perekonomian Kalimantan Selatan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 secara nominal mencapai Rp269,30 triliun sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp149,23 triliun dengan rincian seperti yang ditunjukkan pada grafik.

Pada tahun 2023, ekonomi Kalimantan Selatan bahkan mampu menghasilkan nilai tambah pada perekonomian lebih tinggi dari kondisi ekonomi sebelum pandemi.

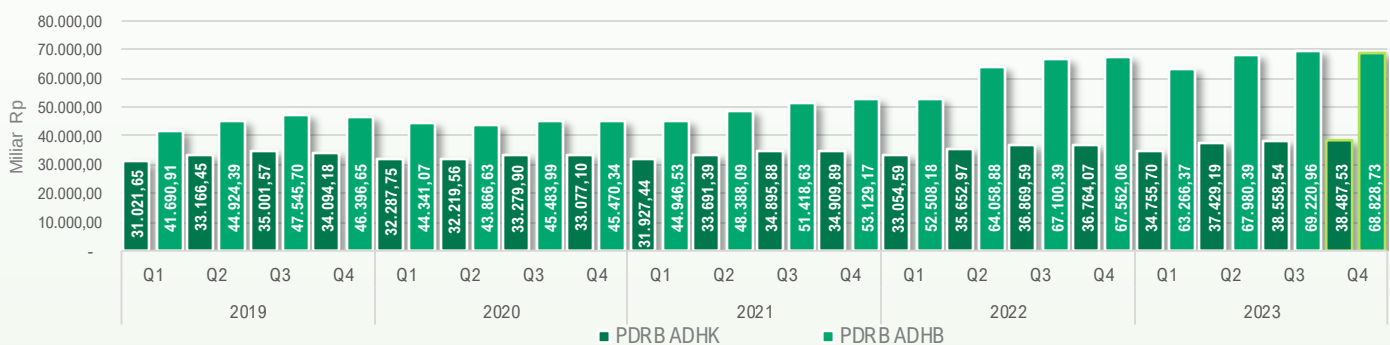
a. PDRB berdasarkan Pengeluaran

PDRB berdasarkan Pengeluaran diukur dari penggunaan atas barang dan jasa atau menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir.

Struktur PDRB menurut pengeluaran di Kalsel didominasi oleh komponen ekspor. Sedangkan pertumbuhan tertinggi pada masing-masing komponen dibanding tahun lalu paling tinggi disumbang oleh konsumsi LNPRT.

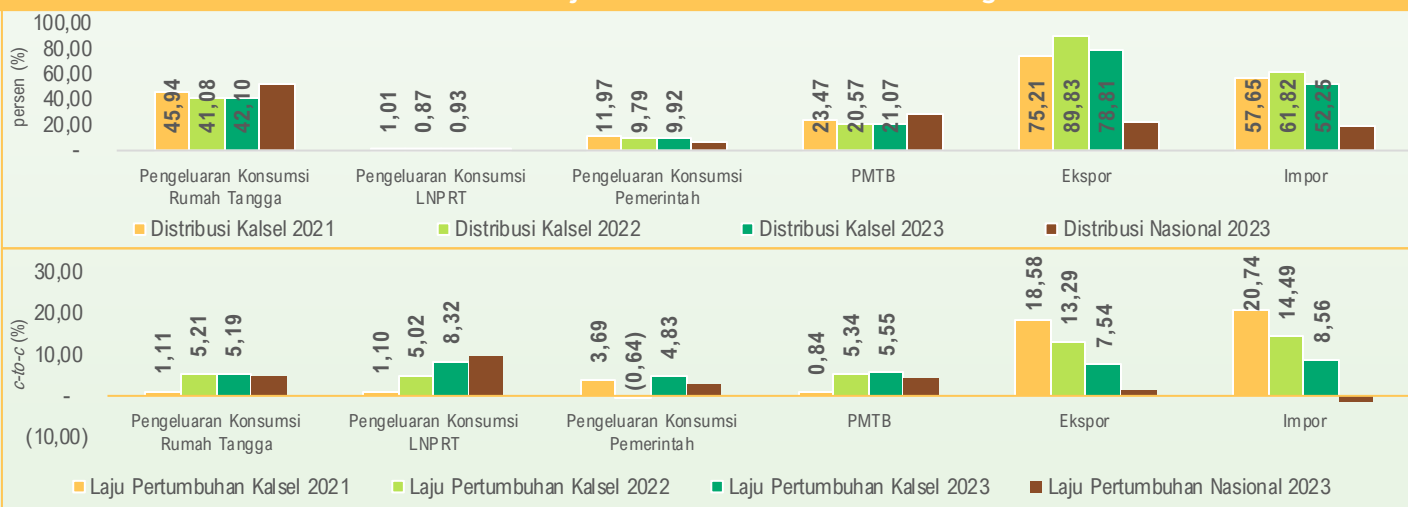
Pada tahun 2023, komponen pengeluaran yang mendominasi struktur PDRB di Kalimantan Selatan masih berasal dari komponen ekspor yang sejalan dengan banyaknya produksi komoditas unggulan untuk ekspor di Kalimantan Selatan seperti komoditas batu bara dan kelapa sawit. Namun demikian, besaran kontribusi komponen ekspor ini mengalami penurunan dari tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun lalu, terdapat permintaan yang tinggi dan lonjakan harga komoditas ekspor di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kemudian menyebabkan kontribusinya meningkat relatif tinggi pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2023 harga komoditas utama ekspor Kalimantan Selatan telah termoderasi sehingga menurunkan kontribusinya terhadap perekonomian Kalimantan Selatan.

Grafik 2.7 PDRB Nominal Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Grafik 2.6 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kalsel



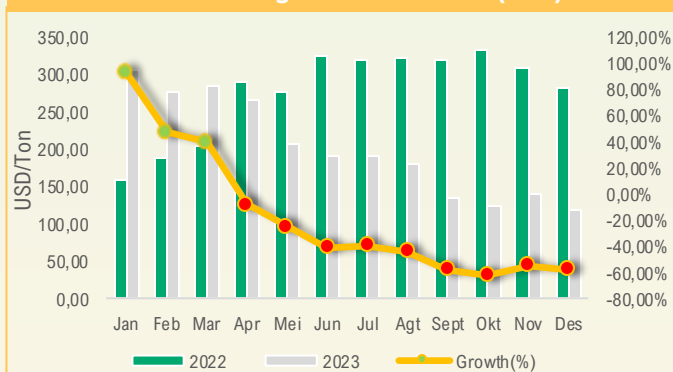
Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan pada masing-masing komponen pengeluaran, pengeluaran konsumsi pemerintah terlihat cukup fluktuatif dibanding komponen lainnya. Hal ini ditunjukkan pada laju pertumbuhannya yang sempat berkontraksi pada tahun 2022 seiring dengan turunnya belanja penanganan pandemi. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali hingga 4,83% dari tahun 2022. Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan fiskal yang didorong pada tahun 2023 dalam

melindungi daya beli masyarakat seperti menjaga kestabilan inflasi, penanganan dampak El Nino, pelaksanaan pemilu, dukungan dalam proyek pembangunan nasional, serta dukungan lainnya.

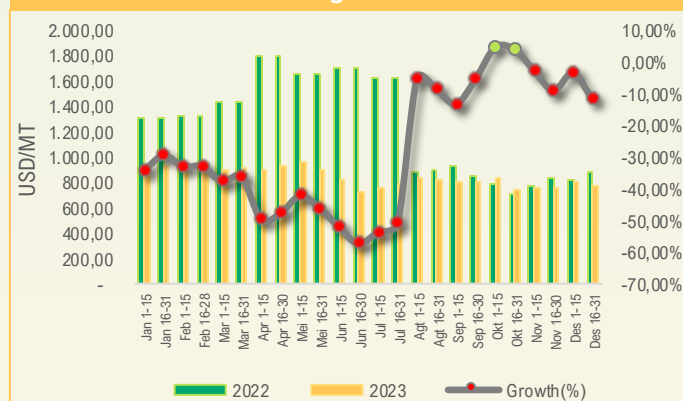
Sementara itu, di sisi lain komponen ekspor menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, yang beberapa di antaranya disebabkan oleh termoderasinya harga batu bara dan *Crude Palm Oil* (CPO) seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik 2.5 Harga Batubara Acuan (HBA)



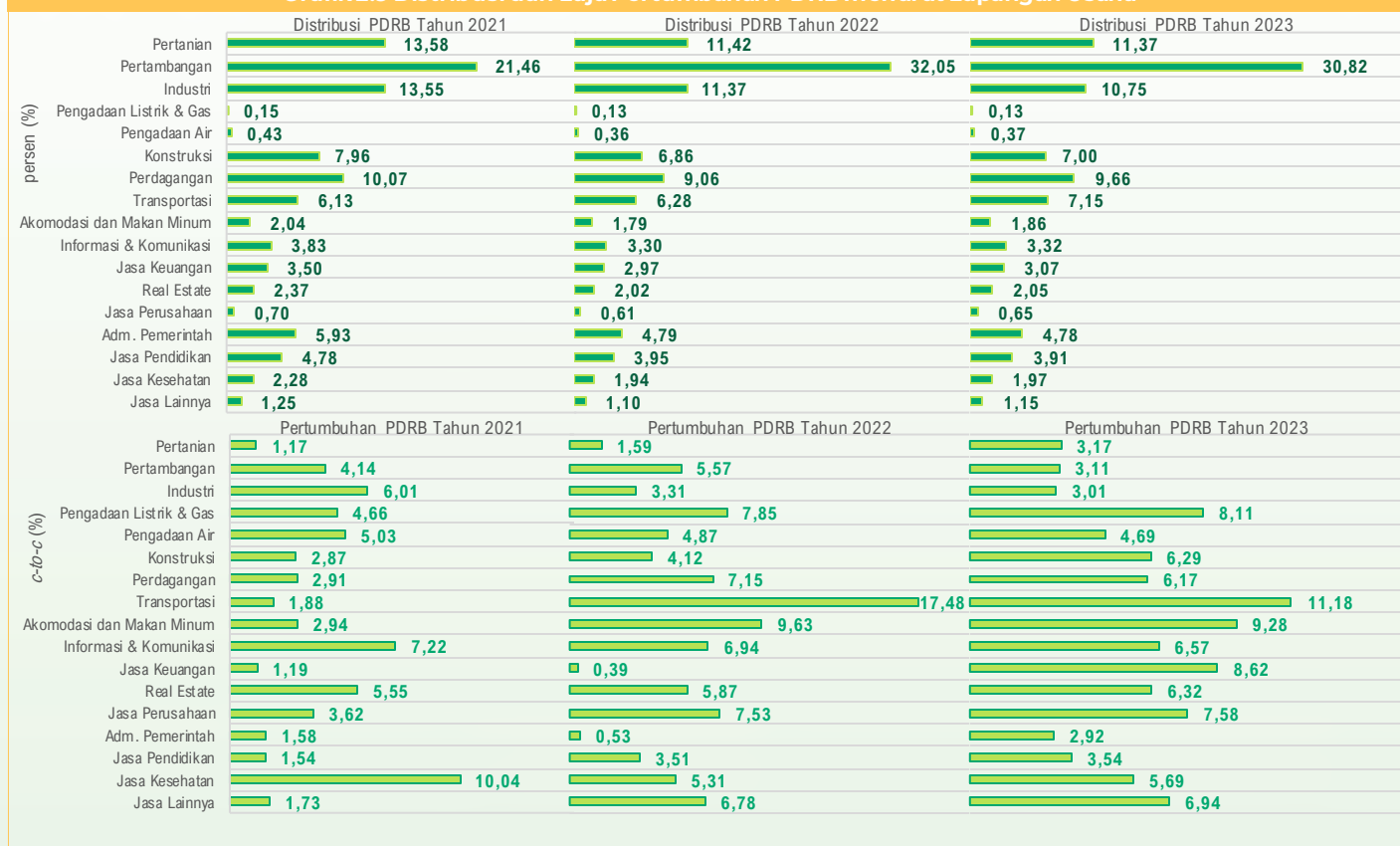
Sumber: KemenESDM (diolah)

Grafik 2.8 Harga Referensi CPO



Sumber: Kemendag (diolah)

Grafik 2.9 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan tertingginya, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh hingga 8,32% dibanding tahun lalu. Perkembangan pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRM ini didorong oleh aktivitas persiapan pemilu tahun 2024, berbagai event nasional yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan, perayaan keagamaan yang secara masif dilaksanakan di Kalsel, serta berbagai kegiatan insidental lainnya juga turut menggerakkan aktivitas LNPRM secara keseluruhan pada tahun 2023.

b. PDRB berdasarkan Lapangan Usaha

PDRB dari sisi penawaran dibentuk berdasarkan LU dan menunjukkan perkembangan peran atau kontribusi sektor-sektor pendorong pertumbuhan ekonomi regional. Struktur PDRB di Kalsel berdasarkan Lapangan Usaha pada tahun 2023 masih didominasi oleh LU Pertambangan yang menjadi kontributor utama ekonomi di Provinsi Kalsel sebagai penghasil tambang. Sedangkan dari sisi pertumbuhan PDRB, LU Transportasi menjadi LU

yang memiliki pertumbuhan tertinggi seperti yang dapat dilihat pada grafik.

Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha (LU) di Kalsel didominasi oleh LU Pertambangan. Sedangkan pertumbuhan dibanding tahun lalu paling tinggi disumbang oleh LU Transportasi.

Pada tahun 2023 ini, LU Pertambangan masih menjadi kontributor utama dalam perekonomian di Kalimantan Selatan, karena menyumbang hingga 30,82% dari total PDRB Kalsel. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kontribusi LU Pertambangan tahun 2023 mengalami penurunan yang merupakan dampak dari pelemahan harga komoditas unggulan di Kalsel, yaitu komoditas batu bara. Berbeda halnya dengan kontribusi tahun 2022 yang mengalami kenaikan relatif tinggi dibanding tahun 2021 karena adanya lonjakan harga batu bara sehingga mendorong naik kontribusinya LU Pertambangan terhadap PDRB di Kalimantan Selatan.

Pertumbuhan pada Lapangan Usaha

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, seluruh Lapangan Usaha mengalami kenaikan positif dibandingkan tahun lalu. Kenaikan tertinggi dialami oleh LU Transportasi yang tumbuh

mencapai 11,18% dari tahun 2022. Walaupun laju pertumbuhan LU Transportasi ini mengalami penurunan paling tinggi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh hingga 17,48%, namun jenis LU ini tetap memiliki pertumbuhan tertinggi dalam PDRB Kalsel. Kinerja LU Transportasi yang cukup baik ini menandakan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat serta angkutan barang yang terlihat dari tingginya laju pertumbuhan transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak pada perekonomian Kalsel.

Pertumbuhan terendah berdasarkan Lapangan Usaha di Kalimantan Selatan dialami oleh LU Administrasi Pemerintahan yang tumbuh hanya 2,92% dari tahun 2022. Namun demikian, laju pertumbuhan ini sudah lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 0,53% dari tahun 2021.

c. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB ADHB perkapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.



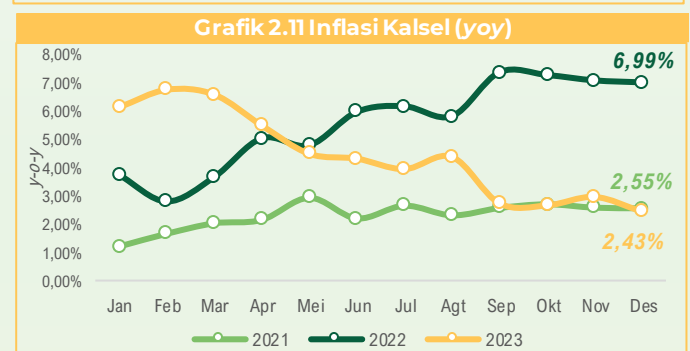
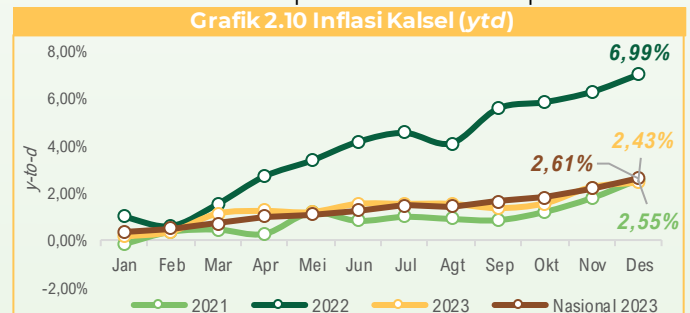
Sumber: BPS (diolah)

PDRB ADHB per kapita Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mencapai Rp63,78 juta, lebih rendah dari PDB per kapita nasional sebesar Rp75 juta. Pada tahun 2023 ini, terjadi peningkatan PDRB per kapita baik nasional maupun dari

regional Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan ini merupakan dampak dari tingginya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat sepanjang tahun 2023 yang kemudian mempengaruhi besaran PDRB per kapita secara keseluruhan.

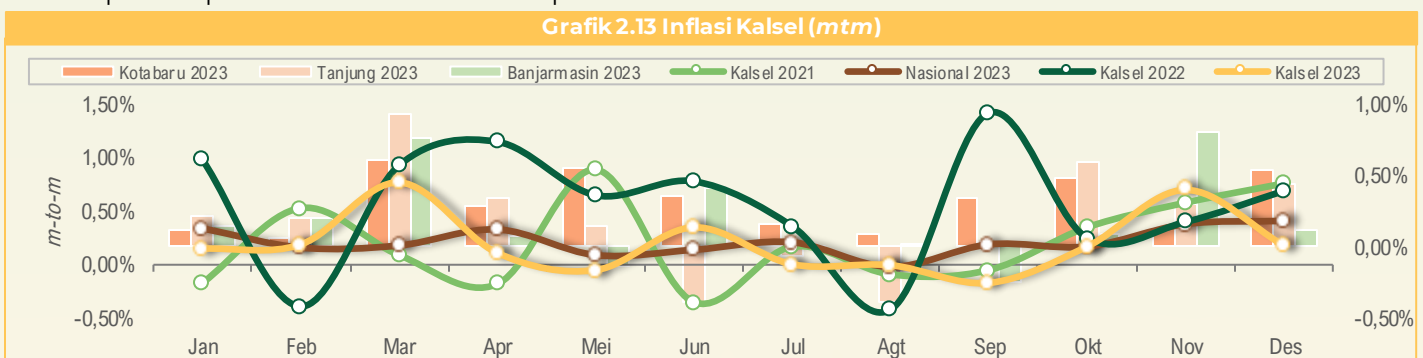
2.1.2 Inflasi

Inflasi ditandai dengan naiknya harga barang dan jasa secara umum dengan jumlah besar pada jangka waktu atau periode tertentu. Terjadinya inflasi tidak dapat dihindari, namun dapat dikendalikan dari sisi permintaan atau penawaran.



Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan trennya, inflasi di Kalsel secara *month-to-month* maupun *year-to-date* menunjukkan angka yang lebih terkendali dari tahun 2022. Sementara itu, jika dilihat secara *year-on-year*, inflasi di Kalsel menunjukkan pola menurun hingga akhir tahun 2023, berbeda halnya dengan tahun 2022 yang inflasinya meningkat hingga akhir tahun. Hal ini disebabkan harga komoditas yang semakin terkendali pada tahun 2023.



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Kinerja inflasi di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai 2,43% *year-to-date* (ytd), sementara pada periode yang sama tahun 2022, inflasi ytd mencapai 6,99%. Selisih yang cukup besar antara inflasi pada tahun 2022 dan 2023 ini merupakan dampak dari guncangan perekonomian global pada tahun 2022 yang salah satunya berakibat pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama BBM bersubsidi menjelang akhir tahun, sehingga turut menggerek naik berbagai harga komoditas akibat biaya distribusi yang melonjak naik. Kondisi ini utamanya terlihat pada inflasi secara *month-to-month* bulan September 2022 yang melonjak naik. Kinerja inflasi Kalsel tahun 2023 yang mencapai 2,43% masih lebih terkendali jika dibandingkan dengan sasarnya seperti pada RKPD tahun 2023 yang sebesar 3,25%. Kondisi ini menunjukkan capaian yang cukup baik karena besaran inflasi mampu lebih terjaga dari target yang ditetapkan.

Jika dilihat pada perkembangan inflasi setiap bulannya di Kalsel tahun 2023 secara *year-on-year*, inflasi tertinggi berada pada bulan Februari yang mencapai 6,73%, hal ini disebabkan oleh inflasi yang terjadi setelah kebijakan naiknya harga BBM di akhir tahun membuat angka inflasi secara yoy meningkat tajam, ditambah pada bulan Februari tersebut inflasi juga didorong oleh peningkatan harga rokok kretek dan rokok kretek filter sejalan dengan peningkatan harga Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan rata-rata peningkatan sebesar 10% pada tahun 2023. Selain itu, harga minyak goreng juga mengalami peningkatan sebagai akibat dari naiknya permintaan, namun diiringi dengan keterbatasan pasokan. Sementara itu, inflasi terendah tahun 2023 secara yoy terjadi pada bulan Desember yang mencapai 2,43% seiring dengan semakin stabilnya harga komoditas ditambah dengan termoderasinya permintaan setelah berakhirnya *event* skala besar seperti POMNAS 2023 di Kalsel.

Di sisi lain, jika dilihat berdasarkan *month-to-month*, inflasi tertinggi di Kalsel tahun 2023 terjadi pada bulan Maret yang menyentuh 0,77%, hal ini disebabkan pada bulan Maret memasuki bulan Ramadhan sehingga terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat, sehingga banyak pedagang makanan minuman musiman yang membuka usaha. Selain itu, kenaikan permintaan komoditas

transportasi menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri juga turut mendorong naik inflasi pada bulan tersebut. Dari sisi komoditas pangan, harga komoditas cabai juga melonjak naik akibat cuaca ekstrem sehingga mengganggu distribusi. Sementara itu, deflasi terendah tahun 2023 secara *mtm* terjadi pada bulan September sebesar -0,17%. Kondisi ini disebabkan pada bulan September terjadi penurunan harga berbagai komoditas karena meningkatnya pasokan dan menurunnya permintaan karena memasuki *low season*.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi sampai dengan akhir tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran utama yang menyumbang inflasi tertinggi di Kalimantan Selatan sebagaimana pada tabel berikut.

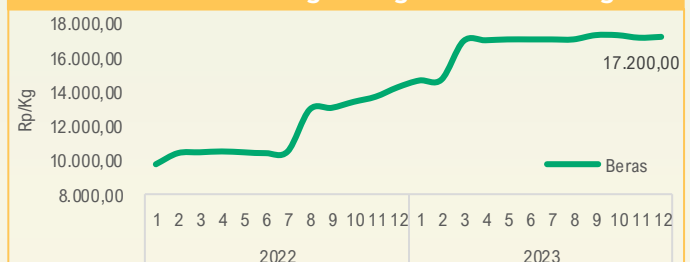
Tabel 2.1 Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Inflasi 2023 (%yoy)												Tren
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Makanan, minuman, dan tembakau	7.68	9.35	8.84	7.27	6.36	4.50	3.88	4.84	4.27	4.97	5.38	3.69	
Pakaian dan alas kaki	6.85	6.42	5.60	5.82	3.72	3.04	2.99	2.94	2.95	3.18	2.68	2.36	
Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya	3.65	3.55	2.76	2.44	3.04	3.34	3.10	2.32	0.97	0.78	0.75	0.85	
Perengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga	5.67	5.55	5.80	4.74	4.10	3.76	3.79	3.44	2.49	2.62	2.35	2.55	
Kesehatan	1.63	2.16	1.48	1.18	1.62	1.50	1.38	0.86	0.96	0.92	0.89	0.85	
Transportasi	12.59	14.57	16.54	11.61	8.35	10.07	8.55	11.20	1.72	-0.38	1.68	1.68	
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	-0.23	-0.46	-0.25	-0.93	-0.98	-1.00	-0.98	-0.72	-0.41	-0.42	-0.29	-0.40	
Rekreasi, olahraga, dan budaya	10.19	9.71	8.69	8.39	5.67	4.41	5.39	7.21	6.13	5.60	5.16	4.21	
Pendidikan	6.17	6.17	6.13	6.13	6.13	6.02	5.21	4.10	4.62	4.68	4.68	4.68	
Penyediaan makanan dan minuman/restoran	0.98	0.93	1.00	0.97	0.96	0.83	1.17	1.11	1.07	1.09	0.98	1.02	
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	9.28	9.13	8.22	8.59	8.31	7.55	7.53	7.94	6.37	6.40	6.18	5.73	
Inflasi Kalsel	6.11	6.73	6.56	5.47	4.74	4.30	3.93	4.36	2.72	2.65	2.95	2.43	

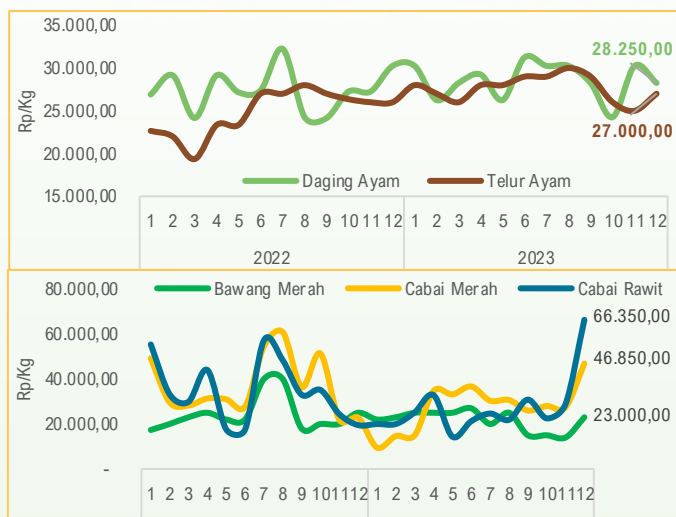
Sumber: BPS (diolah)

Kelompok pengeluaran makanan yang bersumber dari komoditas pangan memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap inflasi secara umum. Selain itu, kenaikan harga pada komoditas pangan berdampak langsung terhadap masyarakat secara keseluruhan. Berikut perkembangan harga beberapa komoditas pokok di Kalsel.

Grafik 2.14 Perkembangan Harga Komoditas Pangan



Sumber: PIHPS (diolah)



Sumber: PIHPS (diolah)

Kelompok Pengeluaran utama inflasi bulan Oktober 2023:

- Pada kelompok **Transportasi**, deflasi didorong oleh tekanan tarif angkutan udara yang mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pada saat *low season* setelah berakhirnya *festive season* di tengah biaya input bahan bakar avtur yang masih tinggi. Akan tetapi, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas bensin sejalan dengan penyesuaian tarif BBM Non-subsidi jenis Pertamina dan Pertamina Turbo.
- Pada kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau**, inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya harga daging ayam ras yang meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan di level konsumen. Di samping itu, harga beras juga mengalami kenaikan akibat naiknya harga Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dan penggilingan sejalan dengan peningkatan harga beras nasional. Selain itu, komoditas cabai rawit juga mengalami kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan pada musim tanam serta produktivitas yang berkurang akibat musim kemarau.
- Pada kelompok **Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT**, inflasi didorong oleh peningkatan bahan bakar rumah tangga yang terjadi akibat kenaikan harga gas LPG 3 kg akibat pasokan yang terbatas dan tidak kontinu.

Kelompok Pengeluaran utama inflasi bulan November 2023:

- Pada kelompok **Transportasi**, inflasi didorong oleh tekanan tarif angkutan udara yang mengalami kenaikan karena dipengaruhi oleh peningkatan permintaan akibat berlangsungnya event berskala besar yakni POMNAS 2023 di tengah biaya input bahan bakar avtur yang masih tinggi. Akan tetapi, kenaikan yang lebih dalam tertahan oleh penurunan harga komoditas bensin sejalan dengan penyesuaian tarif BBM Non-subsidi jenis Pertamina dan Pertamina Turbo.
- Pada kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau**, inflasi pada kelompok ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya harga cabai rawit dan cabai merah yang mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan pada musim tanam serta produktivitas yang berkurang pada musim peralihan. Selain itu, harga ikan gabus juga tercatat naik didorong oleh menurunnya hasil tangkapan di tengah kenaikan permintaan. Di samping itu, bawang merah mengalami kenaikan akibat naiknya harga GKG dan GKP di tingkat petani dan penggilingan.
- Pada kelompok **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**, inflasi didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas dunia didorong oleh ketidakpastian global dan menguatnya mata uang USD terhadap Rupiah.

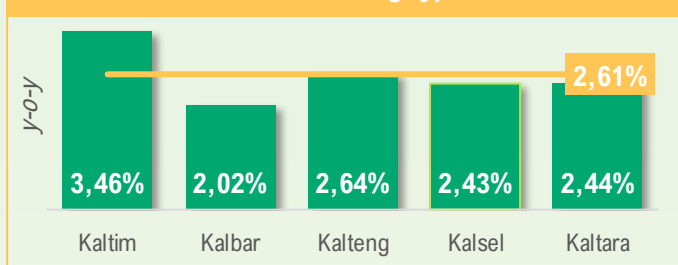
Kelompok Pengeluaran utama inflasi bulan Desember 2023:

- Pada kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau**, inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya harga ikan gabus yang naik karena penurunan hasil tangkapan pada musim hujan di tengah kenaikan permintaan selama 2 bulan terakhir. Harga bawang merah dan cabai rawit mengalami kenaikan akibat keterbatasan pasokan pada musim tanam serta produktivitas yang berkurang pada musim peralihan. Di samping itu, daging dan telur ayam ras meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan memasuki HBKN Nataru.

- b) Pada kelompok **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**, inflasi didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas dunia didorong oleh ketidakpastian global dan menguatnya mata uang USD terhadap Rupiah.
- c) Pada kelompok **Transportasi**, inflasi didorong oleh tekanan tarif angkutan udara yang mengalami penurunan dipengaruhi oleh normalisasi permintaan setelah berakhirnya event berskala besar yakni POMNAS 2023 di tengah biaya input bahan bakar avtur yang menurun 5,48% (*mtm*) pada periode 15-31 Desember 2023. Di samping itu, bahan bakar rumah tangga juga melandai sejalan dengan penurunan harga gas LPG 12 dan 5,5 kg sejak akhir November 2023.

Jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada provinsi di Kalimantan secara tahunan, Kalimantan Selatan menduduki urutan ke-2 inflasi terendah di Kalimantan. Selain itu, angka inflasi ini juga berada di bawah angka nasional seperti yang ditunjukkan pada grafik.

Grafik 2.15 Inflasi di Kalimantan tahun 2023 (yoy)



Sumber: BPS (diolah)

Langkah-langkah pengendalian inflasi terus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta berbagai instansi terkait yang bergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan untuk menjaga kestabilan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Berikut beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan pada tahun 2023:

1. Penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi oleh masing-masing pemerintah daerah;
2. Penguatan komunikasi efektif berupa penguatan kapasitas TPID melalui giat *Capacity Building* dengan seluruh TPID Prov dan Kabupaten/Kota, Koordinasi Rutin TPID Prov, Kabupaten/Kota serta TPIP, *High Level Meeting* (HLM) TPID dan Turun ke desa

(Turdes) Pengendalian Inflasi bersama Gubernur Kalsel;

3. Penyelenggaraan Pasar Murah yang rutin dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dengan disertai penyaluran komoditas pangan bersubsidi;
4. Pemberian subsidi harga komoditas tertentu yang memicu inflasi, misalnya pangan;
5. Penyaluran beras Bantuan Pangan untuk masyarakat dengan alokasi 10kg/KPM/bulan;
6. Kegiatan Turun ke Desa “Lintas Beribu Sungai Banua” ke 11 Kabupaten dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Selatan bersama jajaran dalam rangka pengendalian inflasi;
7. Berbagai inovasi seperti budidaya padi apung, program Ojek Jual Iwak dan Sayur Kawal Inflasi (JULAKWASI), Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit berbasis Kemitraan Usaha Inti Plasma (SISKA KU INTIP), implementasi *Smart Greenhouse* dalam proses pembibitan dan manipulasi klimatologi, pembuatan aplikasi Deteksi Dini Kendalikan Inflasi Banjarmasin Barasih Wan Nyaman (DEDIKASI BAIMAN), dan berbagai inovasi lainnya yang menunjang ketersediaan komoditas dan pengendalian inflasi di Kalsel;
8. Pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM);
9. Pelaksanaan bantuan Gernas Penanganan Dampak El Nino;
10. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah pemasok utama, misalnya bawang merah;
11. Pemantauan perkembangan harga atau sidak pasar;
12. Pemanfaatan sistem resi gudang untuk menjaga ketahanan pangan di beberapa kabupaten;
13. Upaya lainnya dalam menjaga pasokan pangan, misalnya perluasan tanam dan peningkatan irigasi teknis dalam rangka produktivitas lahan, serta peningkatan produksi cabai dengan pembagian bibit cabai pada kelompok tani.

Dalam penanganan inflasi di Kalimantan Selatan, APBN sebagai instrumen fiskal juga turut berkontribusi dalam mengendalikan inflasi harga dari berbagai sisi. Berikut pagu dan realisasi

belanja APBN untuk pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan pada tahun 2023.

Tabel 2.2 Alokasi dan Realisasi Belanja Pengendalian Inflasi di Kalimantan Selatan

Program	K/L	Rp Miliar (s.d. 14 Des 2023)		
		Pagu	Realisasi	%Realisasi
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pertanian	41.34	29.63	71.67%
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	KKP	6.71	5.45	81.22%
Program Ketahanan Sumber Daya Air	PUPR	334.69	247.27	73.88%
Program Infrastruktur dan Konektivitas	PUPR	264.77	36.84	13.91%
	Perhubungan	42.89	170.30	397.06%
Program Perumahan dan Kawasan	PUPR	6.12	5.71	93.30%
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	BPS	2.97	2.60	87.54%
Program Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	3.00	2.48	82.67%

Sumber: Aplikasi MEBE (diolah)

Belanja K/L yang secara langsung dialokasikan untuk program pengendalian inflasi sebesar Rp702,49 Miliar dengan realisasi belanja untuk program pengendalian inflasi s.d. 14 Desember 2023 sebesar 500,29 Miliar (71,22%). Selain Belanja K/L, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD) juga diupayakan dalam pengendalian inflasi, terutama dari sisi ketahanan pangan yang didukung dari penggunaan Dana Desa maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.3 Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan yang digambarkan dengan selisih antara perkembangan ekspor dan impor di Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2023 menunjukkan angka yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Tren besaran neraca perdagangan di Kalimantan Selatan yang lebih rendah dari tahun 2022 merupakan akibat dari turunnya jumlah ekspor tahun 2023 sebesar 19,08% dari tahun 2022 yang kemudian juga diiringi dengan turunnya impor sebesar 4,04% dari tahun lalu. Ekspor di Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2023 mengalami penurunan yang disebabkan oleh melandainya harga komoditas batu bara dan *Crude Palm Oil* (CPO).

Kinerja neraca perdagangan di Kalimantan Selatan walaupun memiliki tren penurunan pada tahun 2023, namun hingga akhir tahun 2023 masih mengalami surplus hingga 14.880,30 juta USD dengan besaran ekspor 16.369,46 juta USD dan impor sebesar 1.489,16 juta USD.

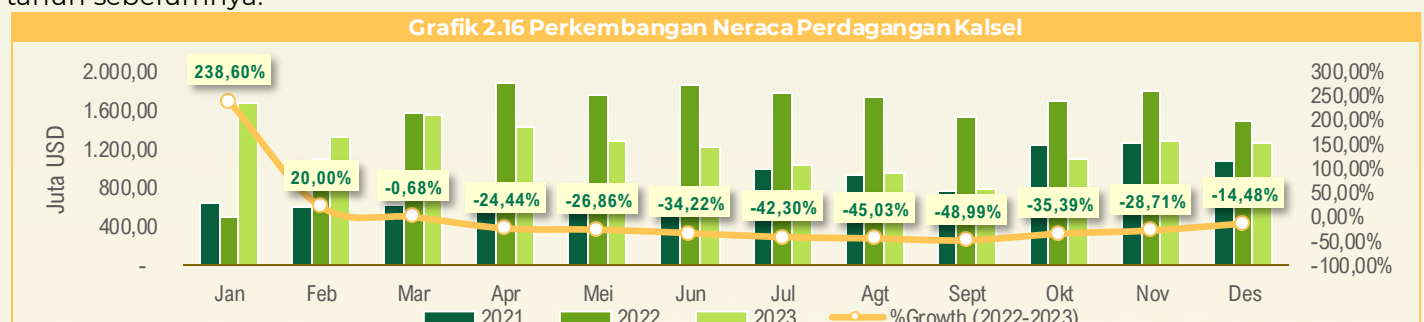
Kelompok barang yang memiliki andil ekspor tertinggi di Kalimantan Selatan yaitu (1) bahan bakar mineral/batu bara; (2) lemak dan minyak hewan/nabati; (3) kayu dan barang dari kayu; (4) berbagai produk kimia/produk olahan kimia, dan (5) barang tambang mineral logam. Di sisi lain, kelompok barang yang memiliki nilai impor tertinggi di Kalimantan Selatan berasal dari (1) bahan bakar mineral; (2) mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya; (3) kapal, perahu, dan struktur terapung/kapal; (4) parts dan aksesoris mobil; dan (5) berbagai produk kimia/produk olahan kimia.

2.2 Analisis Indikator Kesejahteraan

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui beberapa komponen dasar kualitas hidup yang terbentuk dari tiga dimensi dasar.

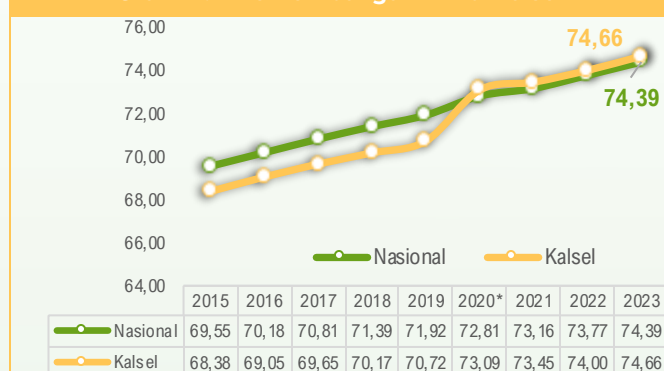
Secara umum, pembangunan manusia di Kalimantan Selatan yang diukur dengan IPM menunjukkan perkembangan yang semakin membaik di tiap tahunnya.



Sumber: Kanwil DJBC Kalbagsel (diolah)

Pada tahun 2023, IPM Kalimantan Selatan tercatat sebesar 74,66 atau lebih tinggi dari besaran IPM secara nasional.

Grafik 2.17 Perkembangan IPM di Kalsel

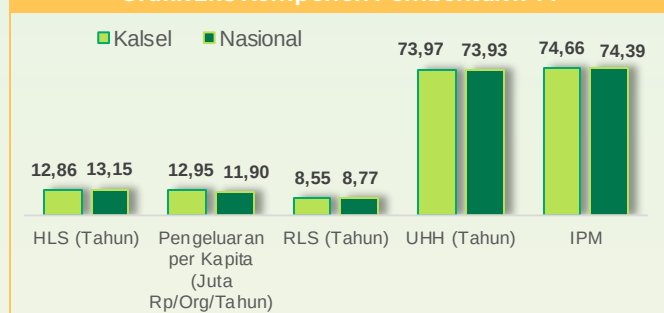


Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

*) Update IPM 2020 s.d. 2023 menggunakan data hasil Sensus Penduduk Long Form 2020

IPM Kalsel tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,89% dibanding tahun 2022. Kenaikan ini terjadi pada semua dimensi pembentuknya. Dimensi standar hidup layak berupa Pengeluaran Riil per Kapita memiliki kenaikan tertinggi yaitu dengan pertumbuhan hingga 3,88%. Sementara itu, kenaikan terendah dimiliki oleh dimensi pengetahuan berupa Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas yang naik sebesar 0,31%.

Grafik 2.18 Komponen Pembentuk IPM



Sumber: BPS (diolah)

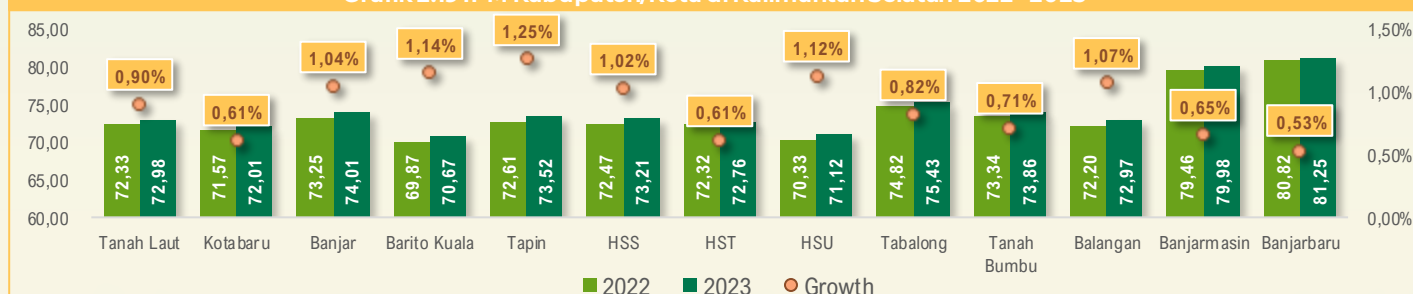
Sebagian komponen pementuk IPM Kalsel memiliki besaran yang lebih rendah dari nasional. Komponen tersebut berupa dimensi pengetahuan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas yang pada tahun 2023 ini meningkat 0,04 tahun.

Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Hal ini perlu menjadi perhatian penuh oleh Pemda di Kalsel, karena indikator tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan belum maksimal di Kalsel.

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan tiap komponen pembentuknya dari tahun 2022, komponen yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Pengeluaran per Kapita yang tumbuh hingga 3,88% dari tahun lalu. Komponen ini mencerminkan naiknya Dimensi Standar Hidup Layak di Kalimantan Selatan yang meningkat hingga 484 ribu Rupiah. Sementara itu, komponen yang memiliki pertumbuhan terendah berasal dari komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) yang naik sebesar 0,31% dari tahun 2022. Komponen ini merupakan salah satu bagian dari Dimensi Pengetahuan yang menunjukkan Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas yang pada tahun 2023 ini meningkat 0,04 tahun. Di sisi lain, komponen pada Dimensi Pengetahuan, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan hingga 1,06% dari tahun 2022 atau naik 0,09 tahun. Selanjutnya, Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang direpresentasikan dari Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) mengalami peningkatan 0,37% atau naik 0,27 tahun.

Berdasarkan capaiannya IPM dari kabupaten/kota yang memiliki capaian tertinggi berasal dari Kota Banjarbaru (81,25), sedangkan IPM terendah berasal dari Kabupaten Barito Kuala (70,67). Peningkatan IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada seluruh kabupaten/kota sebagaimana dapat dilihat pada grafik. Pada tahun 2023 ini, kenaikan tertinggi IPM berasal dari Kabupaten Tapin, Barito Kuala, dan Hulu

Grafik 2.19 IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2022 - 2023

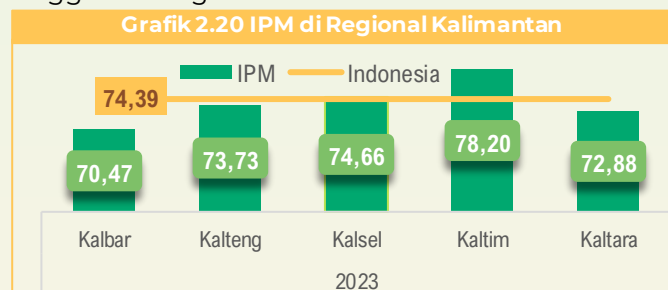


Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Sungai Utara dengan peningkatan IPM masing-masing sebesar 1,25%, 1,14%, dan 1,12% dari tahun 2022. Sementara itu, jika dilihat pada pertumbuhan masing-masing komponen pembentuknya dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, indikator Harapan Lama Sekolah dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari Kabupaten Tapin yang naik sebesar 2,41% dari tahun 2022, pertumbuhan tertinggi indikator Pengeluaran per Kapita berasal dari Kabupaten Barito Kuala yang naik sebesar 5,08%, selanjutnya untuk pertumbuhan tertinggi indikator Rata-rata Harapan Lama Sekolah berasal dari Kabupaten Banjar yang naik 2,98%, sedangkan untuk pertumbuhan tertinggi indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang naik hingga 0,51%.

Pada tahun 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Barito Kuala meningkat dari "sedang" menjadi "tinggi", dengan capaian IPM 70,67. Selain Barito Kuala, dalam kurun waktu 2020-2023 peningkatan status dari "sedang" ke "tinggi" juga dialami Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu sejak 2022. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 12 dan tidak ada kabupaten dengan status "sedang" ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Sementara itu, Kota Banjarbaru menjadi kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" ($\text{IPM} \geq 80$).

IPM pada provinsi di Kalimantan, Kalimantan Selatan menduduki urutan ke-2 tertinggi setelah Kalimantan Timur dan lebih tinggi dari angka nasional.



Sumber: BPS (diolah)

Dalam mengupayakan pembangunan manusia di Kalimantan Selatan, pemerintah pusat maupun daerah di Kalimantan Selatan telah mengupayakan berbagai cara, di antaranya:

1. Pengalokasian anggaran yang dikhususkan pada pengembangan pendidikan dan kesehatan baik dari Belanja K/L, TKD, dan Belanja Daerah.
2. Pelaksanaan Program Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) melalui kegiatan pembinaan dan intervensi pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
3. Peningkatan kualitas pengajar di Kalsel.
4. Penambahan infrastruktur sekolah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
5. Kerja sama pendidikan vokasi di Kalimantan Selatan dan Tengah.
6. Pemerataan jumlah dan peningkatan kompetensi nakes di Kalimantan Selatan.

2.2.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan yang terjadi akan berdampak dan menimbulkan masalah lain seperti kelaparan, kesehatan, kriminalitas, dan sanitasi. Rendahnya kualitas hidup, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, serta rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi, dan layanan pendidikan menjadi beberapa penyebab dari kemiskinan. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator kesejahteraan yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah dan masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan atau yang disebut dengan penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,36% atau menurun 0,46 juta orang yang awalnya pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang.

Penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada Maret 2023 tercatat sebesar 188,93 ribu orang atau berkurang 13 ribu orang dibandingkan September 2022 yang mencapai 201,95 ribu orang dan berkurang 6,77 ribu orang terhadap Maret 2022. Pada Maret 2023 ini, Kalimantan Selatan masih menduduki kemiskinan terendah ke-2 di Indonesia.

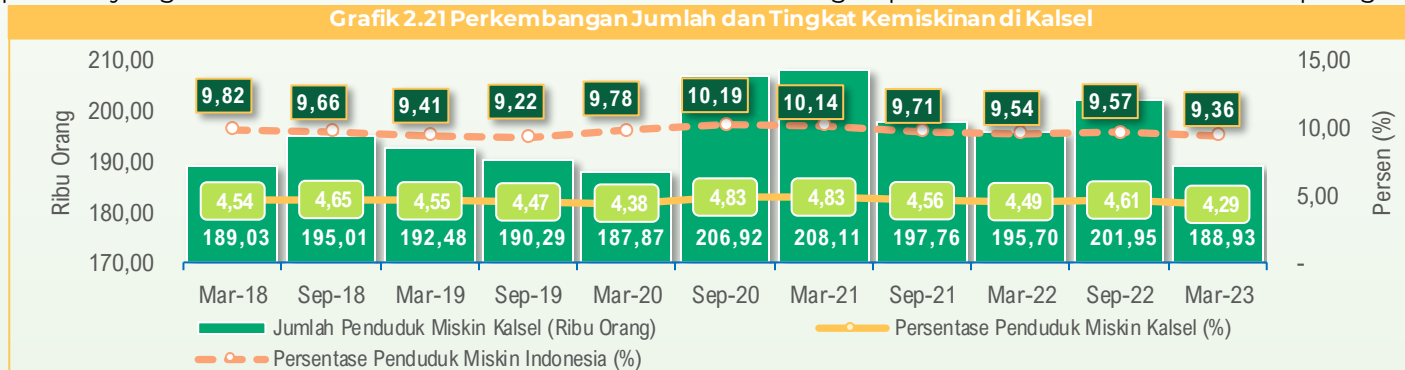
Tingkat kemiskinan Kalsel yang tergolong cukup rendah ini dipengaruhi oleh berbagai

kejadian sosial ekonomi yang terjadi pada tahun 2023 di Kalimantan Selatan, misalnya kondisi menurunnya inflasi pada tahun 2023, peningkatan konsumsi per kapita, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), serta peningkatan produksi padi terutama pada bulan Maret 2023 dibanding periode yang sama tahun 2022.

dikategorikan miskin pada Maret 2023 ini adalah sebesar Rp604.266 per kapita per bulan. Garis pemisah penduduk miskin dan tidak miskin ini mengalami kenaikan 3,96% dibandingkan September 2022 dan naik 9,26% dibandingkan Maret 2022.

Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis

Grafik 2.21 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Kemiskinan di Kalsel

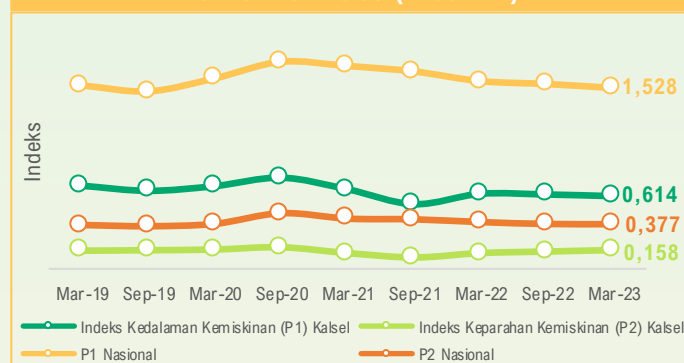


Sumber: BPS (diolah)

Pada Maret 2023, disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Kalimantan Selatan masih menunjukkan besaran yang tergolong tinggi. Penduduk miskin di Kalsel yang tinggal di kawasan perdesaan berjumlah 104,93 ribu orang yang setara dengan 4,72% dari total penduduk di perdesaan. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan tercatat sejumlah 83,99 ribu orang atau setara dengan 3,84% dari total penduduk di kawasan perkotaan. Penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebesar 4,71% dari September 2022 dan mengalami peningkatan 5,49% dari Maret 2022, sedangkan penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan sebesar 8,70% dari September 2022 dan mengalami penurunan hingga 11,11% dibanding Maret 2022.

kemiskinan diukur dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1), sedangkan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dicerminkan dengan indeks keparahan kemiskinan (P2).

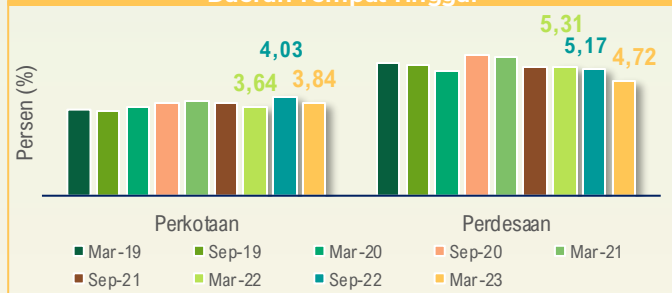
Grafik 2.22 Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Kalsel (P1 dan P2)



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Secara umum Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kalimantan Selatan mengalami penurunan 2,23% dari September 2022 dan 3,15% dari Maret 2022, sementara Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan 8,22% dari September 2022 dan 18,80% dari Maret 2022. Penurunan pada P1 menunjukkan semakin mendekatnya jarak rata-rata pengeluaran penduduk dengan garis kemiskinan, sedangkan peningkatan P2 menunjukkan semakin tingginya nilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kalsel.

Grafik 2.23 Persentase Penduduk Miskin di Kalsel menurut Daerah Tempat Tinggal

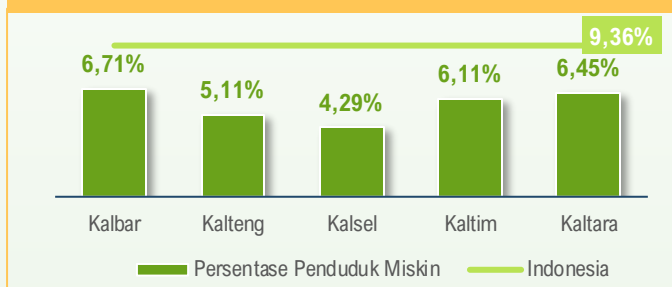


Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Garis Kemiskinan yang merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak

Jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin secara regional di Kalimantan, Kalimantan Selatan menduduki urutan terendah pertama di Kalimantan, yang kemudian diiringi oleh Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur seperti yang ditunjukkan grafik.

Grafik 2.24 Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Selain tingkat kemiskinan, suatu daerah juga memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (*purchasing power parity*/PPP) di bawah US\$1,9 per hari. Berikut persentase penduduk miskin ekstrem seperti yang ditunjukkan grafik.

Grafik 2.25 Perkembangan Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2022 di Kalimantan Selatan



Sumber: TNP2K (diolah)

Kemiskinan ekstrem di wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Agustus 2022, masih berada di bawah angka nasional dan tidak termasuk dalam wilayah prioritas penurunan angka kemiskinan ekstrem. Walaupun demikian, penghapusan kemiskinan ekstrem terus menjadi perhatian pemerintah agar dapat mencapai target dengan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada tahun 2024. Hal ini juga berkesesuaian dengan target yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia.

Dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, yang di antaranya sebagai berikut:

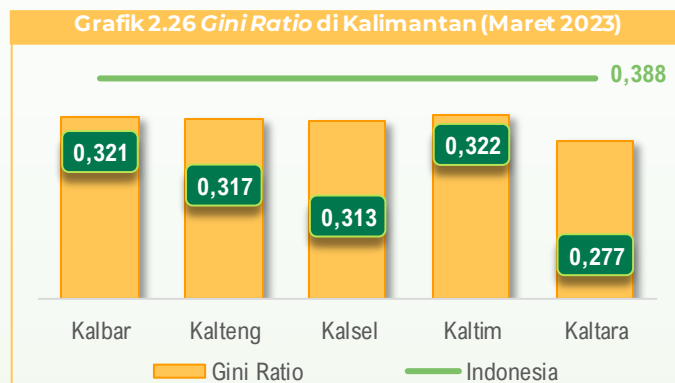
1. Pembentukan peraturan terkait pengentasan kemiskinan, misalnya Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Pemberian bantuan sosial telah disalurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu misalnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Sembako yang pada tahun 2023 ini telah disalurkan masing-masing sebesar Rp253,43 miliar, Rp385,91 miliar, dan Rp60,78 miliar.
3. Subsidi pada berbagai komoditas yang memicu kenaikan harga agar dapat menjaga daya beli masyarakat.
4. Program-program tertentu seperti pemberian dana permodalan bagi masyarakat penghasilan rendah.
5. Pemberian prioritas pada berbagai kegiatan

untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat miskin.

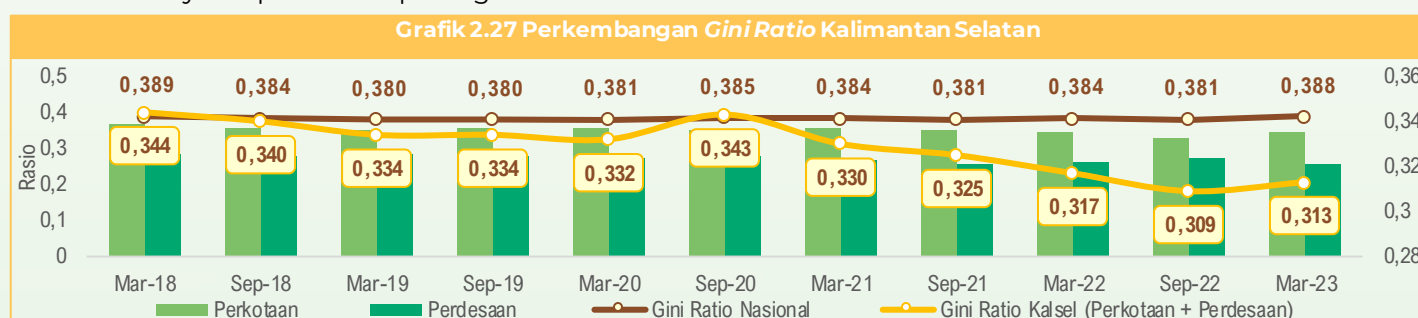
6. Program “Satu Rumah Satu Sarjana” untuk membiayai pendidikan anak dari keluarga miskin.
7. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
8. Bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P), bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
9. Kegiatan atau program lainnya yang mendukung pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

2.2.3 Ketimpangan (Rasio Gini)

Rasio Gini (*Gini Ratio*) menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk secara menyeluruh. Selain *Gini Ratio*, pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk juga diukur menggunakan persentase pengeluaran (distribusi pengeluaran) pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran *World Bank* dengan membagi ketimpangan menjadi 3 kategori. Perkembangan *Gini Ratio* di Kalimantan Selatan dan sebarannya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS (diolah)



Sumber: BPS (diolah)

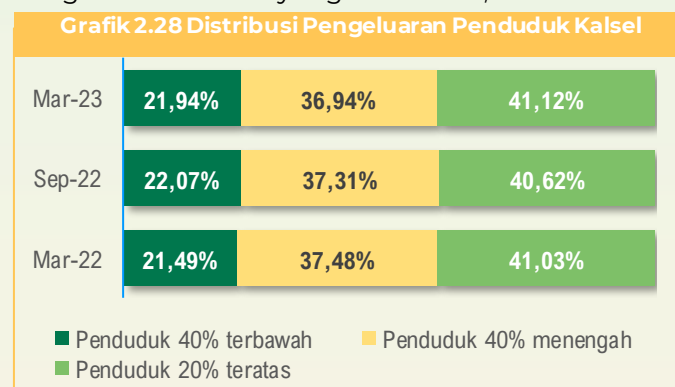
Gini Ratio pada Maret 2023 di Kalimantan Selatan mencapai angka 0,313 yang meningkat 1,29% dibanding September 2022 atau turun 1,26% dibandingkan Maret 2022.

Jika dilihat dari tahun 2020 sampai dengan 2022, terjadi tren penurunan besaran *Gini Ratio* namun pada tahun 2023 kemudian mengalami kenaikan tipis hingga 0,004 poin. Kenaikan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh tinggi namun belum berdampak langsung terhadap masyarakat kalangan bawah. Sehingga, masih terdapat ketimpangan antar masyarakat. Berdasarkan wilayahnya, pada Maret 2023 ini ketimpangan paling besar berada di wilayah perkotaan yang mencapai angka 0,313, sedangkan wilayah perdesaan mencapai angka 0,259.

Jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Kalimantan, Kalimantan Selatan berada di urutan ke-2 *Gini Ratio* terendah setelah Kalimantan Utara dan lebih rendah dari nasional.

Di samping *Gini Ratio*, indikator ketimpangan lain yang biasanya digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori

yang terdiri dari tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%. Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah di Kalimantan Selatan adalah sebesar 21,94% yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase ini turun dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 22,07% dan meningkat dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 21,49%.



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Dalam memperkecil ketimpangan di Kalimantan Selatan, berbagai upaya serupa seperti dalam pengentasan kemiskinan juga turut dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kalimantan Selatan

terutama guna menjaga daya beli masyarakat, berikut upaya lainnya yang telah dilakukan:

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
2. Pemberian subsidi di berbagai sektor untuk menjaga daya beli masyarakat.
3. Penyaluran berbagai jenis bantuan sosial.
4. Pengembangan kredit program yang bunganya telah disubsidi untuk berbagai lapisan masyarakat seperti KUR dan UMi agar masyarakat dapat meperluas usaha dan meningkatkan pendapatan, serta usaha-usaha lainnya.

2.2.4 Tingkat Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Selatan pada bulan Agustus 2023 mencapai 2,17 juta orang dan menurun 1,05% dari periode yang sama tahun lalu. Pada sejumlah angkatan kerja tersebut, terdapat 2,08 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,09 juta orang pengangguran. Penurunan angkatan kerja di Kalsel seiring dengan menurunnya penduduk usia kerja pada Agustus 2023 dibanding tahun lalu.

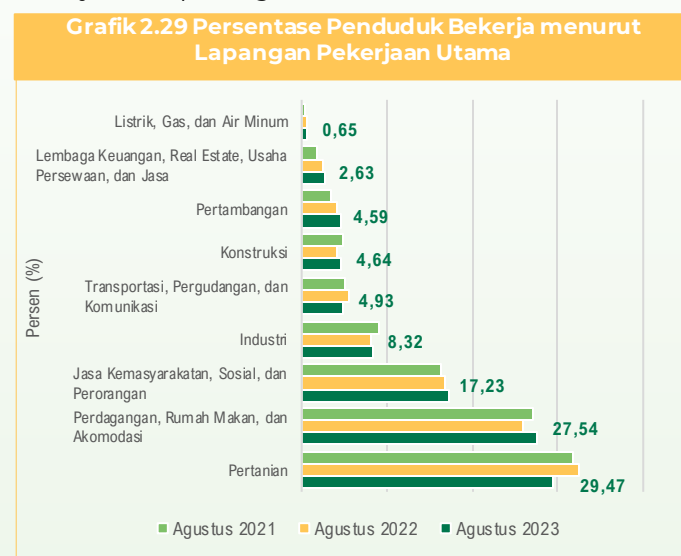


Sumber: BPS (diolah)

Pada periode ini, TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari periode yang sama tahun 2022. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Pada Agustus 2023, TPAK di Kalimantan Selatan mencapai 69,76% atau meningkat 3,27% dari Agustus 2022.

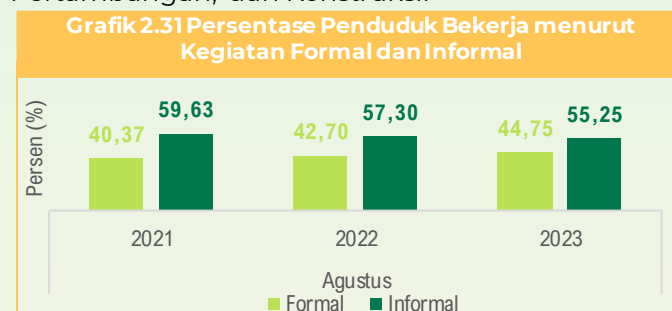
Dalam menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja Kalimantan Selatan untuk masing-masing sektor, terdapat beberapa lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja

paling banyak di Kalimantan Selatan seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut ini.



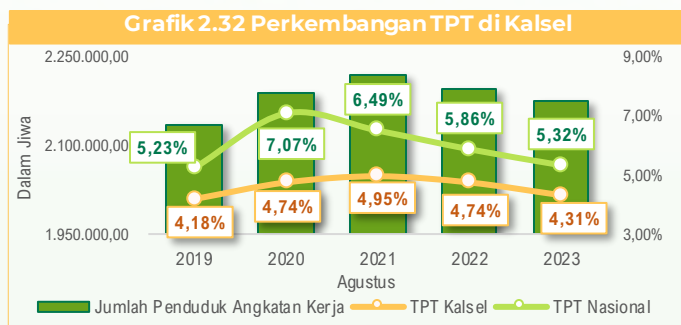
Sumber: BPS (diolah)

Sektor Pertanian; Perdagangan; Rumah Makan dan Akomodasi; Pertambangan; serta Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan mendominasi jenis lapangan pekerjaan utama di Kalimantan Selatan. Di sisi lain, lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 yaitu sektor Listrik, Gas, dan Air Minum; Pertambangan; dan Konstruksi.



Sumber: BPS (diolah)

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan persentase penduduk bekerja menurut kegiatan formal/informal, pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,15 juta orang (55,25%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 0,93 juta orang (44,75%). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 4,80% sedangkan kegiatan informal mengalami penurunan sebesar 3,58%. Kegiatan informal masih mendominasi pekerjaan yang dilakukan masyarakat di Kalimantan Selatan.



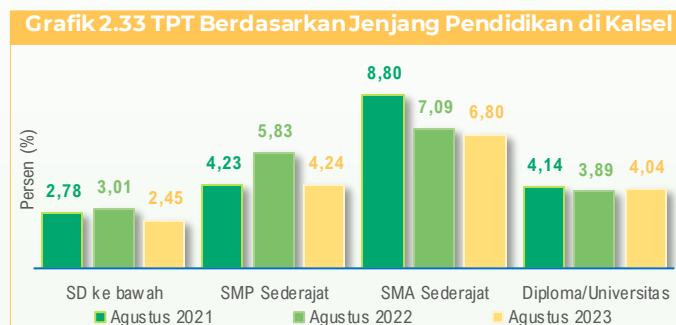
Sumber: BPS (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada tahun 2023 ini, TPT Kalsel menurun sebesar 9,07% dari Agustus 2022. Penurunan ini juga sejalan dengan besaran TPT secara nasional yang angkanya lebih tinggi dari TPT Kalsel.

Pada bulan Agustus 2023, TPT di Kalimantan Selatan mencapai 4,31%, hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur.

Tren besaran Tingkat Pengangguran Terbuka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan. Sebelumnya, TPT di Kalsel pada tahun 2020 dan 2021 sempat meningkat karena adanya pandemi Covid-19. Pada periode tersebut berbagai kebijakan seperti pembatasan aktivitas masyarakat pada akhirnya menyebabkan sejumlah pelaku usaha tutup sementara waktu bahkan gulung tikar karena kemampuan serta aktivitas ekonomi masyarakat yang turun signifikan. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan dan menyebabkan naiknya jumlah pengangguran saat pandemi. Pada tahun 2022 hingga Agustus 2023 ini, sejalan dengan pulihnya pandemi dan kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat, TPT di Kalimantan Selatan berangsur-angsur mengalami penurunan sejalan dengan banyaknya pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya kembali serta tumbuhnya berbagai lapangan usaha baru yang kemudian menyerap tenaga kerja.

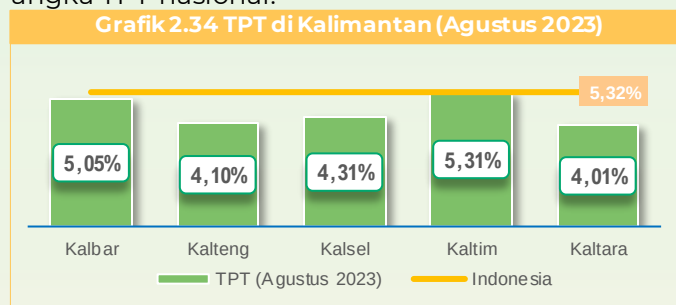
Pada bulan Agustus 2023, TPT yang berasal dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih mendominasi TPT dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Walaupun demikian, TPT lulusan SMA memiliki tren penurunan dari periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Pada Agustus 2023 ini, hampir seluruh TPT berdasarkan jenjang pendidikan mengalami penurunan dari Agustus 2022, terkecuali TPT dari jenjang pendidikan Diploma/Universitas yang meningkat sebesar 3,86%. Tingkat TPT terendah terjadi pada kelompok pendidikan SD ke bawah dikarenakan tenaga kerja pada kelompok tersebut merupakan tenaga kerja kasar yang bisa masuk di semua jenis lapangan usaha, selain itu hal ini juga menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik karena minimnya jumlah masyarakat yang berhenti sekolah hingga tamat SD dan menjadi pengangguran.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di regional Kalimantan, TPT Kalsel berada pada urutan terendah ke-2 dan masih berada di bawah angka TPT nasional.



Sumber: BPS (diolah)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk menurunkan tingkat pengangguran, yang di antaranya sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan berupa Kartu Pra Kerja yang pada tahun 2023 telah tersalurkan sebesar Rp58,65 miliar. Selain itu, program ini juga disosialisasikan ke lapisan pelajar pada tingkat SMA.
2. Pelaksanaan pelatihan keterampilan dan kejuruan untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri seperti pelatihan otomotif, las, pembuatan kue, tata rias,

menjahit, hingga pelatihan di bidang *video editing*.

3. Pelaksanaan program pelatihan, sertifikasi, magang dan penempatan kerja untuk sarana alat berat, sarana roda empat, sertifikasi pekerja berstandar perusahaan, dan jurusan lainnya.
4. Pelaksanaan pameran bursa kerja atau *job fair* dengan menyediakan 1.000 lowongan pekerjaan yang telah diikuti oleh puluhan perusahaan.
5. Berbagai inovasi seperti inovasi Bengkel Sahabat Bina Tenaga Kerja dan Pelatihan Wira Usaha dari Pemkab Tabalong.
6. Berbagai kegiatan pelatihan dari BLK yang didukung dana CSR dari perusahaan tambang dan mitra kerja.
7. Dukungan pembiayaan berupa subsidi pada pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran.

2.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

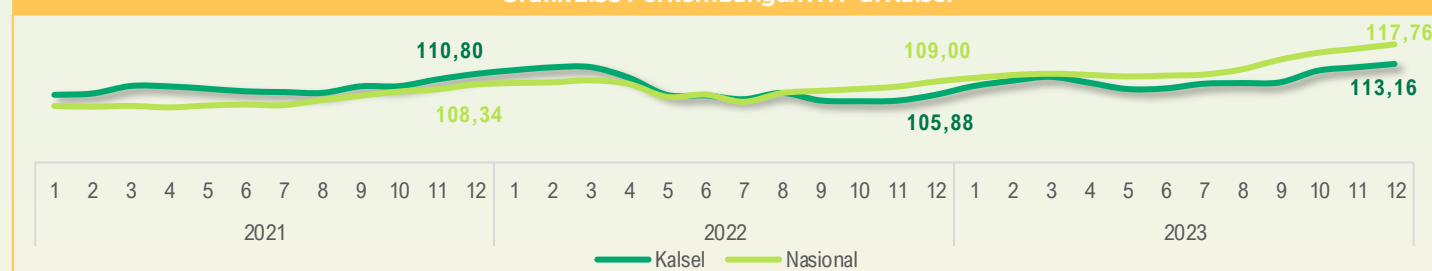
Perekonomian di Kalimantan Selatan salah satunya banyak ditopang oleh sektor pertanian yang memiliki kontribusi cukup tinggi. Untuk mengukur kesejahteraan petani, terdapat indikator berupa Nilai Tukar Petani (NTP) yang mampu menggambarkan tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan dan menunjukkan daya tukar dari produk pertanian

dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP dihasilkan dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Oleh karena itu, dapat disimpulkan semakin besar NTP pada suatu periode maka semakin besar pendapatan petani yang diterima daripada pengeluarannya dan relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

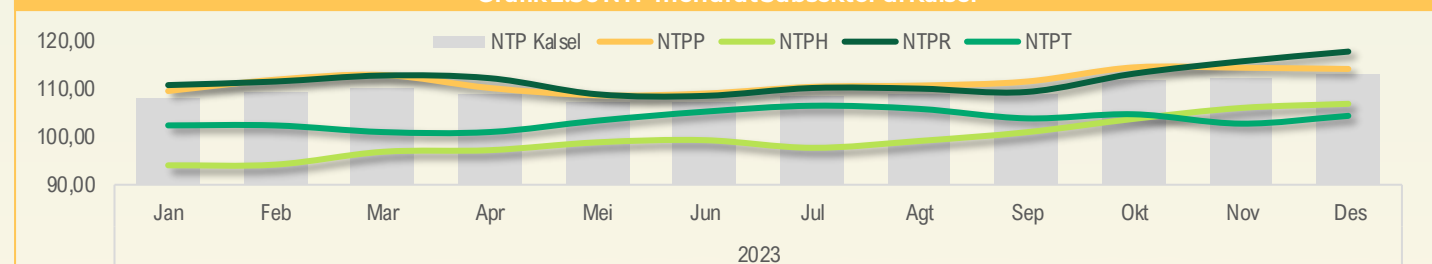
NTP di Kalimantan Selatan secara gabungan pada Januari hingga Desember 2023 adalah sebesar 109,48 atau meningkat 2% dari tahun lalu dengan It sebesar 127,82 dan Ib sebesar 116,75. Capaian NTP ini masih lebih rendah dari NTP nasional.

Kenaikan NTP secara terus menerus terjadi pada beberapa bulan terakhir, yaitu dimulai pada bulan Mei 2023. Jika dilihat secara gabungan pada tahun 2023 ini, tiga subsektor mengalami penurunan NTP, sementara dua subsektor lainnya mengalami kenaikan. Kenaikan NTP terjadi pada subsektor Tanaman Pangan (NTPP) dan Peternakan (NTPT) yaitu masing-masing sebesar 12,76% dan 1,15% dibandingkan tahun 2022. Sementara penurunan terjadi pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR), Tanaman Hortikultura (NTPH), dan Perikanan (NTNP) yaitu sebesar 9,23%, 5,26%, dan 2,03%. Berdasarkan NTP per subsektor, diketahui NTPP dan NTPR memiliki nilai yang paling besar dengan tren serta angka yang relatif serupa. Beda halnya dengan NTPR

Grafik 2.35 Perkembangan NTP di Kalsel



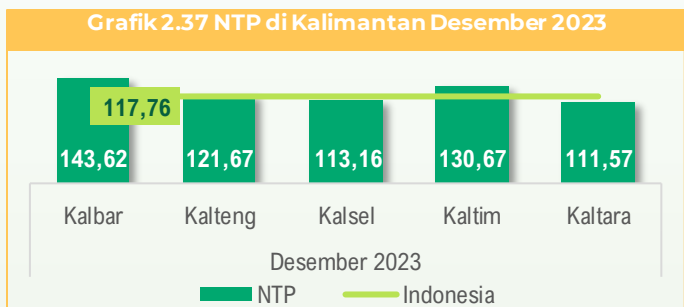
Grafik 2.36 NTP menurut Subsektor di Kalsel



Sumber: BPS (diolah)

yang memiliki tren cukup fluktuatif dan NTPH yang cenderung meningkat pada tahun 2023 ini.

Jika dibandingkan dengan NTP Desember 2023 pada provinsi di Kalimantan, Kalimantan



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Selatan menduduki urutan terendah di Kalimantan dan berada di bawah angka nasional.

Pada tahun 2023 ini, sektor pertanian mengalami berbagai tantangan yang di antaranya yaitu kemarau panjang, el nino, dan kebakaran hutan maupun lahan di beberapa wilayah sehingga juga mempengaruhi hasil produksi pertanian. Kekeringan pada lahan-lahan pertanian serta usaha perikanan perlu menjadi perhatian penuh oleh pemerintah. Terlebih lagi, Kalsel merupakan salah satu lumbung pangan nasional, khususnya sebagai penyangga pangan Pulau Kalimantan.

Dalam mengupayakan peningkatan produksi pertanian, pemerintah pusat maupun daerah terus mendorong berbagai program di Kalimantan Selatan, yang di antaranya yaitu:

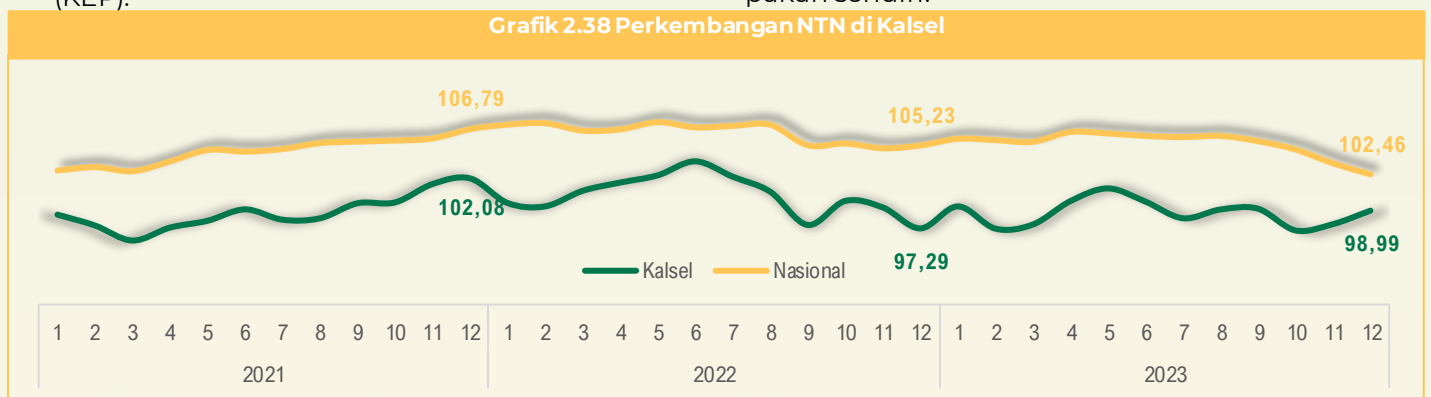
1. Pemberian subsidi pupuk yang pada tahun 2023 ini sudah tersalur 59.674,78 ton.
2. Pembangunan menggunakan dana dari DAK Fisik dan Dana Desa berupa infrastruktur pertanian seperti Jalan Usaha Tani, Balai Penyuluhan, Balai Perbenihan, Lumbung Desa, dan sarpras lainnya.
3. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

4. Peningkatan kualitas produk pertanian melalui teknologi pertanian.
5. Penyuluhan dan sekolah lapang untuk petani.
6. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi wirausaha pemula bidang pertanian.
7. Pelaksanaan Program Petani Sawit Milenial untuk mendorong generasi muda terlibat dalam upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
8. Pemberian stimulasi untuk kelompok tani di beberapa kabupaten/kota.

2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Besaran NTN hingga akhir tahun 2023 ini mengalami tren yang cukup fluktuatif, namun pada tiga bulan terakhir telah mengalami peningkatan hingga Desember 2023 NTN mencapai angka 98,99. Walaupun tren pada akhir tahun 2023 ini meningkat, namun NTN di Kalimantan Selatan besarnya masih di bawah angka 100 dan lebih kecil dari NTN nasional.

Dibanding tahun lalu, rata-rata NTN Kalsel selama satu tahun ini lebih kecil dari tahun 2022 dengan penurunan sebesar 1,61%. Hasil tangkapan ikan nelayan yang lebih rendah dari tahun lalu ini salah satunya disebabkan karena ditemukannya sejumlah kapal cantrang yang datang ke wilayah Kalsel. Selain itu, para nelayan juga masih dihadapkan oleh beberapa tantangan lainnya misalnya keterbatasan solar bersubsidi, masyarakat dan struktur kelembagaan desa yang masih minim informasi terkait aturan dan batasan-batasan terkait perikanan dan kelautan, minimnya pengetahuan cara pembudidayaan ikan dengan benar serta informasi lainnya dalam pengolahan pakan sendiri.



Sumber: BPS Prov. Kalsel (diolah)

Pada Desember 2023, NTN naik 1,32 % dari bulan sebelumnya. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 1,73% dan Ib hanya naik sebesar 0,39%. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan yang terjadi pada salah satu kelompok penyusunnya yaitu penangkapan di perairan umum terjadi kenaikan sebesar 1,42% (khususnya komoditas ikan sepat dan gabus), sementara pada kelompok penangkapan di laut naik sebesar 1,79% (khususnya komoditas tenggiri, teri, kepiting laut, cumi-cumi, rajungan, kakap, dan bawal).

Jika dibandingkan dengan NTN pada bulan Desember 2023 di regional Kalimantan, Kalimantan Selatan menduduki urutan ke-2 terendah di Kalimantan setelah Kalimantan Tengah. Capaian NTN pada periode ini di provinsi Kalimantan sebagian besar masih di bawah angka nasional, terkecuali Kalimantan Utara.



Sumber: BPS (diolah)

Berbagai upaya oleh pemerintah pusat maupun daerah telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, yang di antaranya sebagai berikut:

1. Pemberian subsidi solar kepada nelayan.
2. Pembangunan SPBU khusus nelayan di berbagai daerah.
3. Penanggulangan *illegal fishing* dan penebaran (*restocking*) ikan lokal di kawasan perairan.
4. Penanaman kembali mangrove di kawasan pesisir kritis, dan upaya-upaya lainnya.
5. Bantuan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas dalam pengawasan terhadap *illegal fishing*.
6. Bantuan sejumlah bibit udang kepada Kelompok Pembudidaya Ikan.

2.3 Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional

Target capaian kinerja pemerintah daerah sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan di daerah, di antaranya Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJMN. Sementara itu, RKPD merupakan dokumen yang menuangkan visi, misi, dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

Dengan berdasarkan pada perbandingan antara target pada RKPD Tahun 2023 dan capaian atas beberapa indikator makro dan indikator kesejahteraan, efektivitas kebijakan makro ekonomi dan pembangunan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Hasil Reviu Efektivitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sasaran Makro Kesra	Target 2023	Realisasi 2023	Hasil Reviu
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,5% – 5,2%	4,84%	a. Kinerja pertumbuhan ekonomi di Kalsel masih berada di kisaran target yang telah ditentukan, walaupun pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada 2023 ini cenderung melambat dari tahun 2022. Perlambatan ekonomi yang terjadi secara global pada tahun 2023 merupakan awal perlambatan ekonomi, sehingga pertumbuhan masih dalam kisaran yang ditentukan. Capaian yang cukup baik ini salah satunya disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi masyarakat di tengah termoderasinya harga beberapa komoditas unggulan Kalsel dan melambatnya ekonomi secara global. b. Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan pada tahun 2024 akan tumbuh sedikit lebih rendah dari 2023 namun tetap tumbuh positif dan dengan kondisi wajar. Hal ini mengingat struktur ekonomi Kalsel yang didominasi oleh sektor pertambangan, sehingga ketika harga komoditas tambang sedang termoderasi seperti tahun 2023, maka akan berdampak pada kondisi pertumbuhan ekonomi Kalsel yang cenderung melambat.
2.	Inflasi	3,25%	2,43%	a. Inflasi Kalsel pada tahun 2023 lebih rendah dari target yang ditentukan serta trennya lebih stabil dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan pengendalian inflasi di Kalsel yang diusahakan oleh TPID telah menunjukkan hasil yang semakin membaik dengan terjaganya harga sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi utama, seperti komoditas pangan yang terus diupayakan ketersediaan pasokannya sehingga inflasi pangan tidak melonjak tinggi. b. Inflasi di Kalimantan Selatan diproyeksikan akan menghadapi tantangan yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan stabilitas harga serta inflasi pangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk menjaga kestabilan sisi <i>supply</i> (berupa produksi dan arus distribusinya) maupun <i>demand</i> (pengendalian <i>demand</i> misalnya menggalakan diversifikasi pangan) atas sejumlah komoditas.

3.	Indeks Pembangunan Manusia	72,20	74,66	a. IPM Kalsel menunjukkan angka lebih tinggi dari yang ditargetkan. Capaian yang baik ini merupakan dampak dari pembangunan manusia di Kalsel yang semakin membaik, terutama dari sisi pelayanan pendidikan maupun kesehatan yang semakin optimal dengan dukungan yang semakin besar dari berbagai pihak, sehingga mampu meningkatkan angka IPM sebagai hasilnya. b. Berkaca dari IPM yang selalu meningkat di tiap tahunnya dan berbagai program pembangunan manusia yang semakin membaik di Kalsel, IPM pada tahun 2024 turut diasumsikan dapat meningkat dengan optimis.
4.	Kemiskinan	4,60% – 4,40%	4,29%	a. Capaian tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan lebih rendah dari sasaran dan merupakan tingkat kemiskinan terendah ke-2 di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya dan sinergi pemerintah di Kalimantan Selatan dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai program. b. Sebagaimana capaian pada beberapa tahun belakangan, Kalsel memiliki angka kemiskinan yang relatif rendah, sehingga diasumsikan tingkat kemiskinan tahun 2024 juga terus lebih baik atau sedikit menurun seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat Kalsel.
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,22%	4,31%	a. TPT tahun 2023 ini masih belum dapat memenuhi target yang ditentukan. Dalam merealisasikan capaian atas sasaran TPT tersebut, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kompetensi dan menyerap tenaga kerja di Kalimantan Selatan dengan berbagai program. b. Dengan melihat tren besaran TPT di Kalsel yang cukup fluktuatif, TPT di Kalsel diasumsikan akan cukup berat untuk berkurang, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang melambat, sehingga untuk mengurangi TPT maka diperlukan dukungan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi, memperluas lapangan kerja serta peningkatan kompetensi tenaga kerja terus ditingkatkan ke depannya.

6.	Rasio Gini	0,326	0,313	a. Capaian Rasio Gini di Kalsel lebih rendah dari sasaran yang ditentukan. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi yang sedang <i>slow down</i> sehingga pemerataan akan lebih membaik. Besaran tingkat ketimpangan ini juga menandakan berbagai program yang diupayakan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan di masyarakat semakin membaik pula. b. Rasio Gini di Kalsel pada tahun 2023 ini mengalami sedikit peningkatan, sementara itu tahun 2022 terus mengalami penurunan, sehingga besaran ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena jika tidak maka diasumsikan Rasio Gini di Kalsel ke depannya juga dapat meningkat lagi.
7.	Nilai Tukar Petani	102,7	109,48	a. NTP di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 ini secara gabungan menunjukkan capaian yang lebih tinggi dari target. Walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan iklim seperti El Nino dan kemarau panjang, NTP pada tahun 2023 mampu menunjukkan capaian yang cukup baik sebagai indikator kesejahteraan petani. b. Besaran NTP ke depannya diasumsikan dapat meningkat lebih tinggi dari tahun 2023 dengan melihat tren beberapa bulan terakhir yang menunjukkan peningkatan dari berbagai subsektor. Walaupun demikian, upaya pemerintah sangat penting untuk dapat mewujudkan hal tersebut melalui berbagai program untuk kesejahteraan petani.

BAB III:

ANALISIS FISKAL REGIONAL

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kabimantan Sebatan

1

Pendapatan APBN di Kalsel tahun 2023 ini telah terkumpul 130,06% dari target yang ditetapkan dan lebih tinggi 32,55% dari tahun 2022. Komponen yang mendominasi pendapatan APBN di Kalsel adalah penerimaan perpajakan.

2

Belanja APBN di Kalsel telah terserap 99,11% dari pagu dengan kinerja yang lebih tinggi 18,73% dari tahun sebelumnya. Kontributor utama komponen belanja APBN di Kalsel berasal dari Transfer ke Daerah (TKD).

3

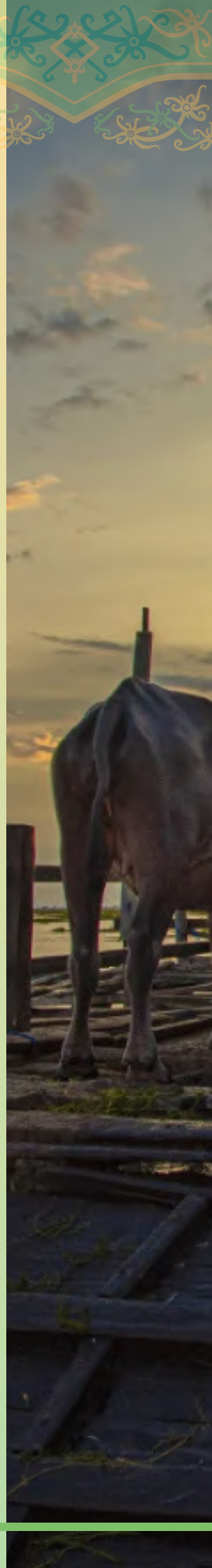
Pendapatan APBD pada tahun 2023 mencapai 108,21% dari target yang ditetapkan dengan kenaikan sebesar 21,44% dibandingkan tahun 2022. Komponen terbesar pendapatan APBD di Kalsel terbesar disumbang oleh pendapatan transfer.

4

Kinerja belanja APBD di Kalsel telah terealisasi sebesar 86,70% dari pagu yang ditentukan, capaian ini mengalami kenaikan 23,05% dari tahun 2022. Kontribusi terbesar realisasi belanja APBD di Kalsel berasal dari belanja operasi.

5

Pendapatan dan belanja konsolidasian di Kalsel masing-masing terealisasi lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, yaitu naik 31,08% dan 21,01%.





BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL

3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. APBN pada tahun 2023 memiliki tema Optimis dan Waspada, yaitu “Optimis” terhadap Kinerja Positif

Perekonomian dan “Waspada” atas Risiko atas Ketidakpastian yang Masih Tinggi.

Capaian APBN tahun 2023 di Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang semakin baik sehingga mampu tumbuh positif dari tahun 2022 dan mampu menjalankan perannya dalam menjaga angka pertumbuhan ekonomi sesuai target, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut disajikan perkembangan APBN di Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2023.

Tabel 3.11-Account Realisasi APBN Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021-2023

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (%) (2022 - 2023)
	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	9.948,47	11.877,23	119,39	14.526,48	18.237,23	125,54	18.586,96	24.173,82	130,06	32,55
Pendapatan Perpajakan	8.965,19	10.708,77	119,45	13.457,80	16.806,24	124,88	17.256,15	21.475,31	124,45	27,78
Pendapatan Negara Bukan Pajak	983,28	1.168,46	118,83	1.068,68	1.431,00	133,90	1.330,81	2.698,51	202,77	88,58
Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA NEGARA	26.805,42	26.409,22	98,52	38.953,99	34.000,34	87,28	40.731,88	40.370,02	99,11	18,73
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	9.484,88	9.293,40	97,98	8.400,96	8.097,88	96,39	8.899,32	8.687,48	97,62	7,28
Belanja Pegawai	3.529,09	3.568,09	101,11	3.623,43	3.558,52	98,21	3.635,32	3.603,13	99,11	1,25
Belanja Barang	3.166,86	3.041,05	96,03	2.950,36	2.827,20	95,83	3.839,61	3.690,20	96,11	30,52
Belanja Modal	2.777,40	2.672,72	96,23	1.815,66	1.700,65	93,67	1.409,82	1.379,57	97,85	(18,88)
Belanja Bantuan Sosial	11,55	11,55	100,00	11,51	11,51	100,00	14,58	14,58	100,00	26,66
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFER KE DAERAH (TKD)	17.320,54	17.115,82	98,82	30.553,03	25.902,45	84,78	31.832,56	31.682,54	99,53	22,31
Dana Transfer Umum (DTU)	11.551,65	11.551,62	100,00	25.409,44	21.110,26	83,08	26.581,59	26.579,87	99,99	25,91
Dana Alokasi Umum	7.486,17	7.486,17	100,00	7.488,14	7.488,14	100,00	7.831,24	7.830,84	99,99	4,58
Dana Bagi Hasil	4.065,48	4.065,45	100,00	17.921,30	13.622,12	76,01	18.750,35	18.749,03	99,99	37,64
Dana Transfer Khusus (DTK)	3.797,29	3.602,96	94,88	3.582,61	3.232,99	90,24	3.484,64	3.355,96	96,31	3,80
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.450,86	1.332,25	91,82	1.279,17	1.146,19	89,60	1.144,09	1.064,87	93,08	(7,09)
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.346,43	2.270,71	96,77	2.303,45	2.086,81	90,59	2.340,55	2.291,09	97,89	9,79
Dana Insentif Daerah (DID)	445,83	445,83	100,00	134,47	134,47	100,00	255,99	255,99	100,00	90,36
Dana Insentif Daerah	445,83	445,83	100,00	134,47	134,47	100,00	255,99	255,99	100,00	90,36
Dana Desa	1.525,77	1.515,41	99,32	1.426,51	1.424,73	99,88	1.490,81	1.489,99	99,94	4,58
Dana Desa	1.525,77	1.515,41	99,32	1.426,51	1.424,73	99,88	1.490,81	1.489,99	99,94	4,58
Hibah Daerah	-	-	-	-	-	-	19,53	0,73	3,76	100,00
Hibah Daerah	-	-	-	-	-	-	19,53	0,73	3,76	100,00
SURPLUS/DEFISIT	(16.856,95)	(14.531,99)	86,21	(24.427,51)	(15.763,10)	64,53	(22.144,92)	(16.196,20)	73,14	2,75

Sumber: OM SPAN, SIMTRADA, DJP, DJBC, DJPb, ALCo (diolah)

3.1.1 Pendapatan Negara

3.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan baik yang berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional secara keseluruhan mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

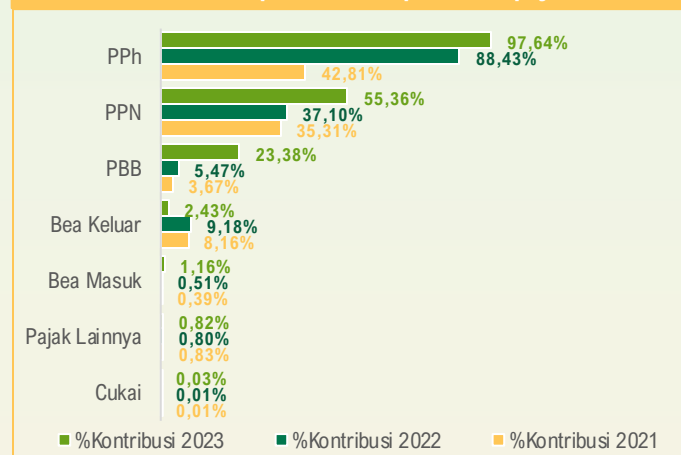
Tabel 3.2 Nominal Komponen Pendapatan Perpajakan

Komponen Pendapatan Perpajakan	Miliar Rp		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Cukai	0,89	1,09	3,35
Pajak Lainnya	98,97	94,65	97,59
Bea Masuk	46,58	60,89	137,49
Bea Keluar	968,79	1.090,54	288,37
PBB	435,92	649,90	2.776,60
PPN	4.193,51	4.406,69	6.574,73
PPh	5.084,34	10.502,47	11.597,18

Sumber: DJP, DJBC, ALCo (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, kinerja pendapatan APBN di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 didominasi oleh penerimaan perpajakan yang berkontribusi hingga 88,83% secara keseluruhan. Sedangkan menurut komponennya, capaian pendapatan perpajakan tahun 2023 ini paling besar disumbangkan oleh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dengan masing-masing komposisi seperti yang ditunjukkan pada grafik.

Grafik 3.2 Komposisi Pendapatan Perpajakan

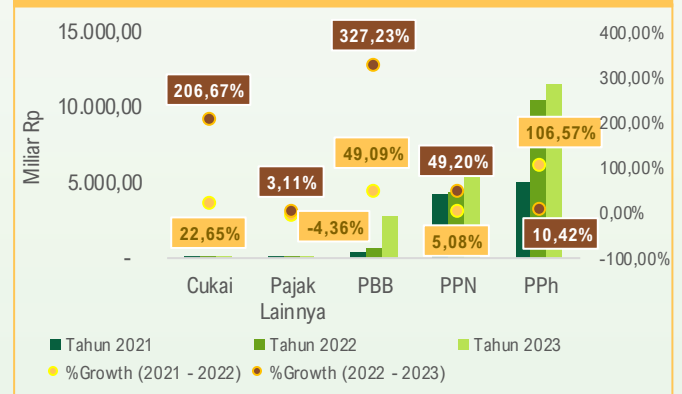


Sumber: DJP, DJBC, ALCo (diolah)

Berdasarkan perkembangan kontribusi dari masing-masing komponen pendapatan perpajakan seiring meningkatnya jumlah pendapatan yang diterima, kenaikan kontribusi

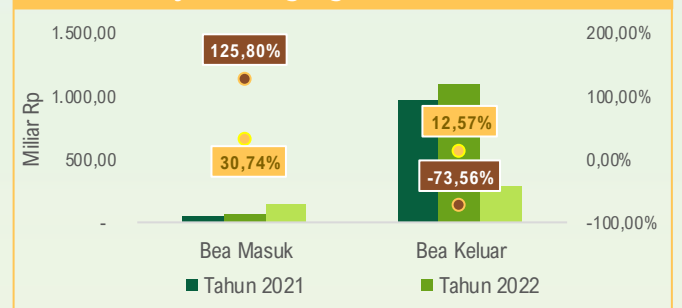
tertinggi berasal dari komponen PPN dan PBB dengan peningkatan masing-masing sebesar 18,25% dan 17,51% dari proporsi tahun 2022. Sementara itu, komponen yang memiliki penurunan kontribusi terbesar dari tahun 2022 berasal dari komponen Bea Keluar yang turun hingga 6,75%. Hal ini sejalan dengan peningkatan dan penurunan nominal komponen pendapatan perpajakan seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.1 Pajak Dalam Negeri 2021 - 2023



Sumber: DJP, ALCo (diolah)

Grafik 3.3 Pajak Perdagangan Internasional 2021 - 2023



Sumber: DJBC, ALCo (diolah)

Pendapatan perpajakan di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 secara keseluruhan telah terkumpul hingga Rp21.475,31 miliar yang secara total mengalami kenaikan dari Rp4.669,07 miliar atau 27,78% dari tahun 2022. Peningkatan yang cukup signifikan ini didorong oleh kinerja pajak dalam negeri maupun perdagangan internasional di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2023, seluruh komponen pajak dalam negeri memiliki kinerja impresif karena mampu tumbuh lebih tinggi dari capaian tahun 2022. Pertumbuhan tertinggi secara persentase pada periode ini berasal dari komponen PBB yang tumbuh hingga 327,23% atau senilai Rp2.126,70 miliar dikarenakan adanya perubahan pembayaran perusahaan tambang kontrak karya

generasi 1 yang semula *lumpsum payment* sesuai dengan nominal kontrak menjadi seperti Undang-Undang PBB yang berlaku. Kenaikan juga terjadi pada komponen PPN yang tumbuh hingga 49,20% atau senilai Rp2.168,04 miliar yang didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi Kalsel disertai dengan penerapan tarif PPN 11%. Kinerja PPh non Migas juga turut mengalami kenaikan sebesar 10,42% atau senilai Rp1.094,71 miliar. Peningkatan penerimaan PPh masih didominasi oleh PPh 25/29 Badan akibat naiknya harga batu bara yang terjadi pada tahun 2022, sehingga walaupun harga batu bara saat ini sudah menurun masih terdapat pertumbuhan. Penerimaan dari pajak lainnya juga mengalami kenaikan sebesar 3,11% atau senilai Rp2,94 miliar dari 2022. Sementara itu, pendapatan yang disumbang dari penerimaan cukai juga turut mengalami kenaikan sebesar 206,67% atau Rp2,26 miliar yang disumbang oleh komoditas Liquid Vape.

Berbeda dari capaian pajak dalam negeri yang mengalami pertumbuhan seluruhnya, komponen pada pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea keluar dan bea masuk mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun 2023. Capaian bea keluar pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu hingga 73,56% atau senilai Rp802,17 miliar salah satunya disebabkan karena turunnya harga komoditas CPO dan turunannya. Hal ini sejalan dengan turunnya capaian komponen ekspor pada PDRB tahun 2023 dan neraca perdagangan

yang juga mengalami penurunan. Di sisi lain, kinerja bea masuk mengalami peningkatan hingga 125,80% atau 76,60 miliar dibanding tahun 2022.

Pendapatan perpajakan juga dapat dikategorikan berdasarkan sektor atau lapangan usaha dimana asal pajak tersebut dikumpulkan. Berikut perkembangan penerimaan pajak sektoral pada komponen PPh, PPN, PBB, dan Pajak Lainnya seperti yang disajikan pada tabel.

Pada tahun 2023, sebagian sektor mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi; serta sektor Real Estat. Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2023 masih mendominasi penerimaan perpajakan yang berkontribusi masing-masing sebesar 37,44% dan 25,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak di Kalimantan Selatan masih bergantung dengan sektor pertambangan yang merupakan struktur ekonomi utama Kalsel. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat berupa perdagangan masih terus menjadi salah satu faktor pendorong utama perekonomian di Kalimantan Selatan. Walaupun dihadapkan dengan termoderasinya harga komoditas pada sektor pertambangan, penerimaan pajak pada sektor ini masih mampu tumbuh hingga 45,96% dibanding tahun 2022.

Sektor Pengangkutan dan Pergudangan memiliki pertumbuhan tertinggi pada periode ini, yaitu sebesar 71,88% dengan kontribusi

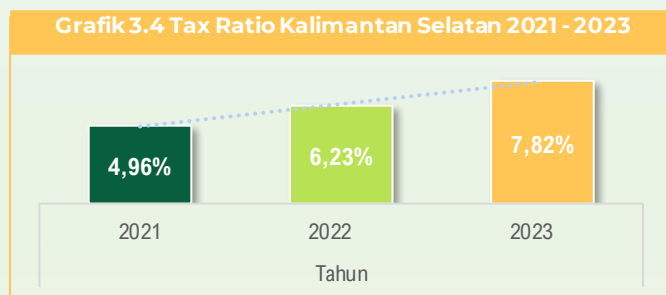
Tabel 3.3 Kontribusi Sektor LU terhadap Penerimaan Pajak

No.	Nama Sektor	Realisasi (Miliar Rp)		Growth	Kontribusi thd Total Penerimaan Pajak	
		2022	2023		2022	2023
1	Pertambangan dan Penggalian	5.398,26	7.879,36	45,96%	34,49%	37,44%
2	Perdagangan Besar dan Eceran	4.064,95	5.271,82	29,69%	25,97%	25,05%
3	Pengangkutan dan Pergudangan	1.572,25	2.702,40	71,88%	10,05%	12,84%
4	Administrasi Pemerintahan	1.437,75	2.102,36	46,23%	9,19%	9,99%
5	Industri Pengolahan	369,61	615,09	66,42%	2,36%	2,92%
6	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	601,26	546,15	-9,17%	3,84%	2,59%
7	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	445,30	428,89	-3,68%	2,85%	2,04%
8	Aktivitas Penyewaan	258,35	402,77	55,90%	1,65%	1,91%
9	Konstruksi	298,05	341,44	14,56%	1,90%	1,62%
10	Real Estat	264,14	224,08	-15,17%	1,69%	1,06%

Sumber: DJP, ALCo (diolah)

sebesar 12,84% dari total pendapatan pajak. Sektor ini diperkirakan akan terus tumbuh melihat potensi dengan telah ditetapkannya Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sedangkan Kalimantan Selatan akan menjadi gerbang IKN sekaligus menjadi salah satu jalur transportasi/distribusi dengan IKN. Sementara itu, di posisi pertumbuhan tertinggi ke-2 terdapat sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan 66,42% dibanding tahun 2022. Walaupun memiliki kontribusi yang tergolong kecil pada pendapatan perpajakan, namun industri pengolahan ini memiliki potensi untuk dapat tumbuh lebih tinggi seiring dengan berbagai rencana hilirisasi ke depannya.

Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak di suatu daerah, pengukuran dapat dilakukan atas *tax ratio* atau perbandingan antar jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan PDRB suatu daerah seperti yang disajikan pada grafik.



Sumber: BPS Prov. Kalsel, DJP, ALCo (diolah)

Tax Ratio di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 - 2023 menunjukkan tren peningkatan 3 tahun terakhir. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sejalan dengan pemulihan pandemi Covid-19 yang sebelumnya masih berdampak pada penerimaan pajak.

Dalam mendorong peningkatan kinerja *Tax Ratio*, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, misalnya penetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satunya mengatur penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak tahun 2022. Selain itu, UU HPP yang menawarkan berbagai ketentuan lain juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

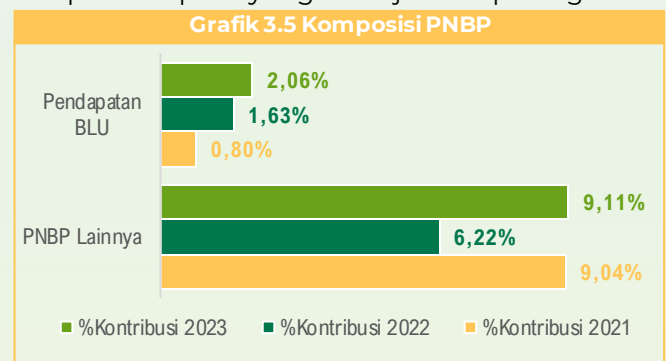
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kalimantan Selatan menunjukkan capaian yang semakin baik pada tiga tahun terakhir. Komponen PNBP lainnya dan pendapatan BLU mengalami peningkatan dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Nominal Komponen PNBP

Komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Miliar Rp		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PNBP Lainnya	1.073,69	1.134,07	2.201,43
Pendapatan BLU	94,78	296,93	497,08

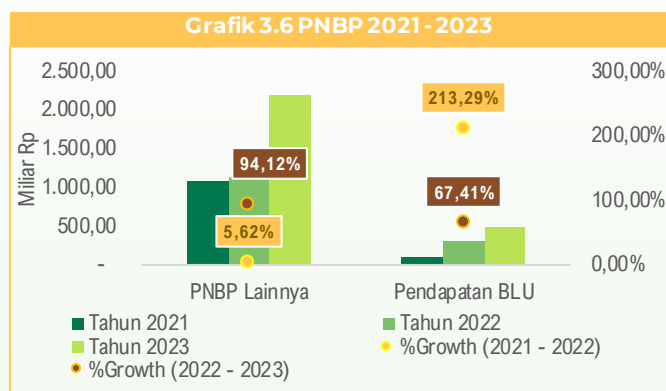
Sumber: OMSPAN, ALCo (diolah)

Kinerja PNBP pada tahun 2023 ini secara keseluruhan menyumbang 11,16% dari total pendapatan APBN di Kalimantan Selatan. Sedangkan menurut komponennya, capaian PNBP tahun 2023 ini paling besar disumbangkan oleh PNBP lainnya dengan perkembangan komposisi seperti yang ditunjukkan pada grafik.



Sumber: OMSPAN, ALCo (diolah)

Berdasarkan kontribusinya terhadap total pendapatan APBN, pendapatan BLU memiliki proporsi yang paling kecil pada komponen PNBP. Sementara itu, PNBP Lainnya yang merupakan kontributor terbesar di komponen PNBP pada tahun 2023 ini didominasi oleh pendapatan yang berasal dari Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informasi. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat pada tahun 2023 turut menyumbangkan PNBP dari sisi ini sehingga komposisinya meningkat lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan pada sisi kontribusi ini juga sejalan dengan peningkatan nominal komponen PNBP seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut.

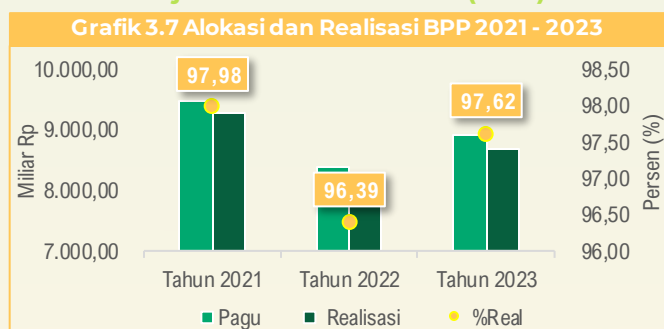


Sumber: OMSPAN, ALCo (diolah)

Kinerja PNPB pada tahun 2023 telah mencapai Rp2.698,51 miliar, atau lebih tinggi 88,58% yang senilai Rp1.267,52 miliar dari capaian tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi dari komponen PNPB ini disumbang dari PNPB Lainnya yang mengalami peningkatan hingga 94,12% atau senilai Rp1.067,36 miliar. Kenaikan signifikan ini terjadi pada komponen PNPB lainnya, tepatnya pada PNPB yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I. Di sisi lain, capaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan hingga 67,41% atau senilai Rp200,16 miliar. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh adanya tambahan penerimaan PNPB dari Politeknik Kesehatan Banjarmasin yang telah ditetapkan menjadi BLU pada Maret 2023 dan pendapatannya efektif tercatat menjadi pendapatan BLU pada Juli 2023, sehingga menyumbang naiknya besaran PNPB BLU tahun 2023 di Kalimantan Selatan. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2022 yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada pendapatan BLU di Kalimantan Selatan karena pada tahun 2022 juga terdapat penetapan BLU baru yaitu Universitas Lambung Mangkurat.

3.1.2 Belanja Negara

3.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)



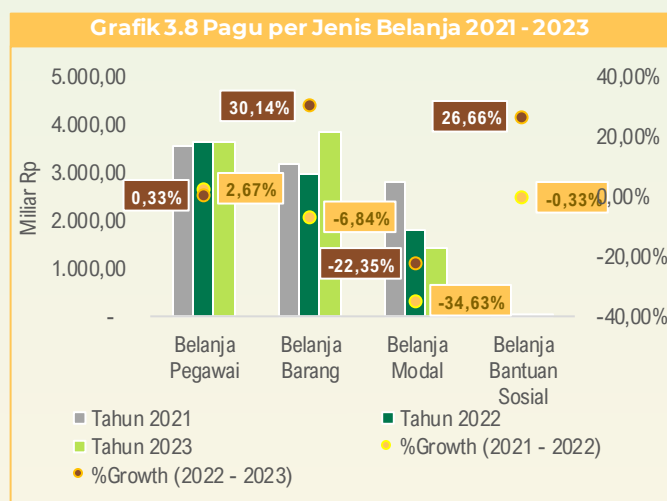
Sumber: OMSPAN, ALCo (diolah)

Alokasi dan realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2023 di Kalimantan Selatan menunjukkan angka yang lebih tinggi dari tahun 2022. Sementara itu, jika dibanding dengan tahun 2021, alokasi dan realisasinya menunjukkan penurunan pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, belanja masih difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional akibat adanya pandemi Covid-19 yang memperbolehkan belanja melebihi defisit yang ditentukan. Sementara pada tahun 2022, belanja sudah mulai diarahkan untuk kembali ke besaran defisit sesuai aturan yaitu maksimum defisit 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

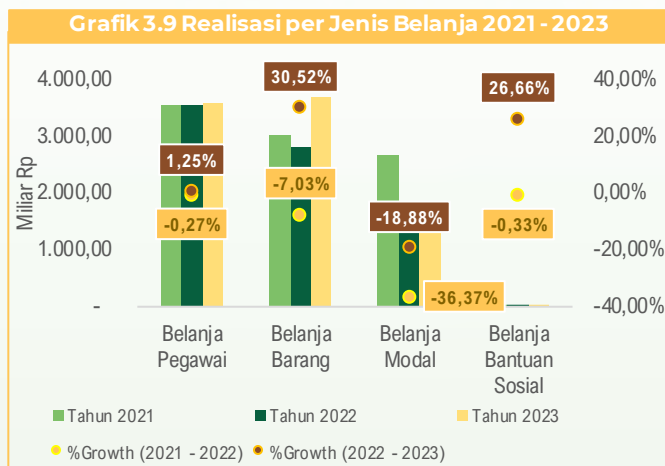
Belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 diutamakan untuk mewujudkan pengembangan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari belanja fungsi di Kalimantan Selatan (tanpa BA 99) yang didominasi oleh belanja fungsi pendidikan dengan proporsi 25,87%. Selain itu, belanja fungsi ekonomi juga menjadi salah satu kontributor utama dengan proporsi 22,83% dari total belanja fungsi APBN (tanpa BA 99). Hal ini menunjukkan *concern* pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program yang membuka akses terhadap pendidikan serta mendorong pembangunan ekonomi di daerah.

3.1.2.2 Berdasarkan Jenis Belanja

Pagu dan realisasi berdasarkan jenis belanja APBN di Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan dan penurunan sebagai berikut.



Sumber: OMSPAN, SINTESA, ALCo (diolah)



Sumber: OMSPAN, SINTESA, ALCo (diolah)

Pada tahun 2023, belanja pegawai mengalami peningkatan realisasi hingga 1,25% atau senilai Rp44,61 miliar dari tahun 2022. Hal ini sejalan dengan peningkatan pagu yang naik 0,33% dari tahun lalu. Peningkatan realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 terutama dikontribusikan dari peningkatan realisasi gaji dan tunjangan PPPK yang naik sebesar Rp30,35 miliar atau 474,69% yoy, gaji dan tunjangan TNI/Polri naik sebesar Rp16,48 miliar atau 1,59%, realisasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai non PNS naik sebesar Rp13,75 miliar atau 9,58% yoy, serta tunjangan kinerja naik sebesar Rp5,64 miliar atau 1,00% dari tahun 2022.

Pada tahun 2023, capaian belanja barang di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan hingga 30,52% atau senilai Rp863,00 miliar. Peningkatan realisasi belanja barang terutama dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (Banper) naik sebesar Rp319,74 miliar atau 128,66% yoy, belanja barang non operasional naik sebesar Rp223,62 miliar atau 41,31% yoy, belanja barang BLU naik sebesar 134,06 miliar atau 65,28% yoy, belanja barang perjalanan dinas dalam negeri naik sebesar Rp98,82 miliar atau 25,72% yoy, belanja barang operasional naik sebesar Rp46,75 miliar atau 7,31% yoy, belanja jasa (sewa kendaraan, gedung, photocopy, dan lainnya) naik sebesar Rp19,12 miliar atau 7,20% yoy. Peningkatan pada realisasi ini sejalan dengan naiknya pagu belanja barang hingga 30,14% dari tahun 2022. Kondisi peningkatan realisasi ini salah satunya disebabkan naiknya belanja untuk pelaksanaan tahapan pemilu 2024 pada lingkungan satker KPU dan Bawaslu.

Kinerja belanja modal pada tahun 2023 menunjukkan kontraksi hingga 18,88% atau senilai Rp321,08 miliar. Walaupun mengalami penurunan dari sisi realisasi, namun jika dilihat berdasarkan kinerja persentase hingga akhir tahun, pada tahun 2023 ini kinerja belanja modal meningkat 4,20% (tahun 2023 sebesar 97,85%, sedangkan tahun 2022 sebesar 93,67%). Di samping itu pagu belanja modal tahun 2023 juga menurun Rp405,89 miliar atau 22,35% dibanding tahun 2022. Penurunan pagu terutama untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan turun Rp309,04 miliar atau 30,20% yoy, belanja modal gedung dan bangunan pagu turun Rp101,50 miliar atau 20,71% yoy, dan pagu belanja modal peralatan dan mesin turun Rp48,45 miliar atau 23,45% yoy. Alokasi yang menurun pada tahun 2023 ini salah satunya disebabkan oleh pembangunan yang sudah selesai pada tahun 2022, sehingga alokasi untuk belanja modal cenderung menurun. Sedangkan dari sisi realisasi, kinerja belanja modal masih dihadapkan tantangan berupa implementasi TKDN, kontrak payung, *force majeure* kondisi alam, vendor yang wanprestasi, serta tantangan Pengadaan Barang dan Jasa lainnya yang turut memengaruhi kinerja belanja modal tahun 2023.

Belanja bantuan sosial pada tahun 2023 mengalami peningkatan capaian hingga 26,66% atau senilai Rp3,07 miliar. Belanja bantuan sosial yang dikelola oleh tiga satuan kerja pada dua K/L yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Sosial, realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 ini sebesar Rp14,58 miliar atau 100,00%.

3.1.2.3 Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan organisasi/sektoral dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga (K/L). Berdasarkan perkembangan pagu dan realisasi belanja APBN menurut K/L, diketahui bahwa pada tahun 2023 sebagian Kementerian/Lembaga telah merealisasikan anggarannya lebih tinggi dari capaian periode yang sama pada tahun lalu seiring dengan alokasi belanjanya yang juga ikut tumbuh. Pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang pagu maupun realisasinya naik cukup signifikan pada tahun ini.

Hal ini disebabkan realisasi belanja pada kedua lembaga ini dilaksanakan untuk tahapan persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Di sisi lain, juga terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki kinerja lebih rendah dari tahun lalu. Namun demikian kondisi ini sejalan dengan menurunnya pagu belanja di K/L tersebut seperti pada Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perkembangan pagu realisasi pada 20 K/L dengan pagu anggaran terbesar sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

setiap satuan kerja dan bagian anggaran. Berdasarkan belanja per fungsi pada tahun 2023, fungsi Pelayanan Umum menjadi fungsi yang memiliki nilai dan pertumbuhan tertinggi pada periode ini. Hal ini utamanya disebabkan oleh penyaluran seluruh jenis TKD yang kini disalurkan oleh KPPN daerah berkenaan. Sehingga, besaran pagu dan realisasi tercatat sebagai pelaksanaan anggaran di provinsi berkenaan sebagai fungsi Pelayanan Umum.

Selanjutnya pada tahun 2023, belanja fungsi Pendidikan berada pada urutan ke-2 alokasi terbesar belanja APBN di Kalimantan Selatan. Tingginya alokasi belanja fungsi Pendidikan dibanding belanja lain menunjukkan bahwa

Tabel 3.5 Pagu dan Anggaran Belanja per K/L Tahun 2021 - 2023

Kementerian/Lembaga	PAGU (Miliar Rp)			Trendline Pagu	REALISASI (Miliar Rp)			Trendline Realisasi	Growth Pagu (2022 - 2023)	Growth Realisasi (2022 - 2023)
	2021	2022	2023		2021	2022	2023			
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.771,72	1.509,07	1.558,76		2.715,25	1.410,89	1.530,03		3,29%	8,44%
KEMENTERIAN AGAMA	1.607,97	1.615,50	1.533,57		1.614,05	1.569,64	1.505,75		-5,07%	-4,07%
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.163,37	1.341,35	1.352,63		1.158,71	1.335,06	1.349,81		0,84%	1,10%
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI	826,58	810,48	837,92		792,21	760,63	809,61		3,39%	6,44%
KEMENTERIAN PERTAHANAN	637,69	622,58	646,73		634,12	620,59	635,90		3,88%	2,47%
KOMISI PEMILIHAN UMUM	99,17	70,60	401,53		97,21	65,93	380,45		468,73%	477,00%
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	269,28	209,72	278,43		265,89	208,07	271,05		32,76%	30,27%
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	203,47	241,42	251,58		199,24	236,69	247,38		4,21%	4,52%
MAHKAMAH AGUNG	217,79	207,54	239,11		212,14	200,15	233,94		15,21%	16,88%
KEMENTERIAN PERTANIAN	348,37	253,15	233,42		337,33	238,40	228,84		-7,79%	-4,01%
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	50,30	63,78	217,17		46,51	57,23	178,08		240,49%	211,19%
KEMENTERIAN KESEHATAN	147,69	174,07	169,12		135,98	154,40	160,34		-2,85%	3,85%
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	120,37	139,99	156,00		119,41	138,70	153,25		11,43%	10,49%
BADAN PUSAT STATISTIK	85,60	168,22	155,87		83,27	166,41	152,56		-7,34%	-8,32%
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	243,30	209,56	155,78		212,30	192,93	153,82		-25,66%	-20,27%
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	160,11	146,14	145,41		158,79	144,65	143,95		-0,50%	-0,48%
KEMENTERIAN KEUANGAN	131,05	166,28	88,10		126,76	161,27	82,28		-47,02%	-48,98%
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	70,26	79,62	84,06		66,43	75,68	82,22		5,57%	8,64%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	41,92	35,80	46,78		41,55	35,67	46,62		30,65%	30,72%
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	47,36	66,07	39,81		44,70	64,92	39,75		-39,75%	-38,78%

Sumber: SINTESA (diolah)

3.1.2.4 Berdasarkan Fungsi

Klasifikasi anggaran menurut fungsi merupakan pengelompokkan alokasi anggaran yang mencerminkan fungsi pemerintahan pada

belanja terkait kebutuhan dasar berupa pendidikan di Kalimantan Selatan terus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Tabel 3.6 Pagu dan Anggaran Belanja per Fungsi Tahun 2021 - 2023

Belanja per Fungsi	PAGU (Miliar Rp)			Trendline Pagu	REALISASI (Miliar Rp)			Trendline Realisasi	Growth Pagu (2022 - 2023)	Growth Realisasi (2022 - 2023)
	2021	2022	2023		2021	2022	2023			
PELAYANAN UMUM	4.152,61	4.084,67	32.783,16		3.989,42	3.865,43	32.576,75		702,59%	742,77%
PERTAHANAN	637,69	622,58	646,73		634,12	620,59	635,90		3,88%	2,47%
KETERBITAN DAN KEAMANAN	1.723,41	1.954,33	2.025,16		1.707,63	1.934,37	2.009,99		3,62%	3,91%
EKONOMI	2.933,04	1.911,15	2.012,94		2.875,21	1.792,58	1.983,02		5,33%	10,62%
LINGKUNGAN HIDUP	366,61	303,04	253,17		334,38	285,00	249,83		-16,46%	-12,34%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	566,70	162,51	129,19		550,82	160,98	117,34		-20,50%	-27,11%
KESEHATAN	239,29	297,93	268,03		226,86	278,17	260,87		-10,04%	-6,22%
PARIWISATA DAN BUDAYA	-	1,40	1,39		-	1,35	1,38		-0,72%	100,00%
AGAMA	213,37	232,18	254,05		211,51	228,85	248,19		9,42%	8,45%
PENDIDIKAN	2.307,77	2.323,75	2.303,67		2.273,86	2.225,25	2.247,66		-0,86%	1,01%
PERLINDUNGAN SOSIAL	33,98	27,18	38,56		33,51	26,06	38,41		41,89%	47,38%

Sumber: SINTESA (diolah)

(SDM) di Kalimantan Selatan. Walaupun di sisi lain, capaian belanja fungsi pendidikan pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dari sisi pagu maupun realisasinya yang mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahun 2022.

Sementara itu, kinerja belanja fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum memiliki penurunan kinerja terdalam pada tahun 2023 yang juga sejalan dengan turunnya kinerja belanja modal. Hal ini dikarenakan belanja fungsi ini erat hubungannya dengan belanja modal yang memiliki berbagai tantangan dalam merealisasikannya, misalnya implementasi kebijakan TKDN, kontrak payung, kondisi alam, vendor wanprestasi, dan kendala teknis lainnya yang kemudian menyebabkan capaian belanja modal masih belum maksimal.

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD)

Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam *intergovernmental fiscal relations*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota serta pembagian urusan pemerintah antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. TKD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan yang kemudian ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Perkembangan TKD di Kalimantan Selatan secara rinci disajikan sebagai berikut.

Transfer ke Daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, serta Dana Desa. Kontribusi TKD ini masih menjadi tumpuan utama pendapatan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya.

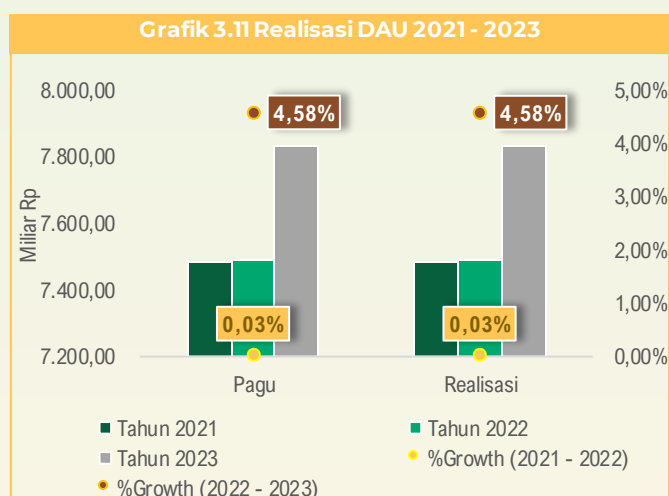


Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, ALCo (diolah)

Alokasi dan realisasi TKD pada tahun 2023 di Kalimantan Selatan menunjukkan nominal serta kinerja yang lebih tinggi dari tahun 2022 maupun 2021. Kenaikan yang cukup signifikan pada alokasi TKD tahun 2022 di Kalimantan Selatan disebabkan oleh adanya penyaluran Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH yang kemudian menyebabkan pagu TKD pada tahun 2022 meningkat di akhir tahun. Selanjutnya pada tahun 2023, kinerja TKD semakin menunjukkan capaian yang impresif karena dengan alokasi yang lebih tinggi, namun kinerja penyalurannya menunjukkan hasil yang nyaris sempurna. Perkembangan penyaluran TKD yang semakin besar pada tiga tahun terakhir menunjukkan kontribusi belanja negara yang semakin tinggi terhadap komponen pendapatan daerah dalam APBD, sehingga diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah lebih tinggi ke depannya.

3.1.3.1 Dana Transfer Umum (DTU)

3.1.3.1.1 Dana Alokasi Umum

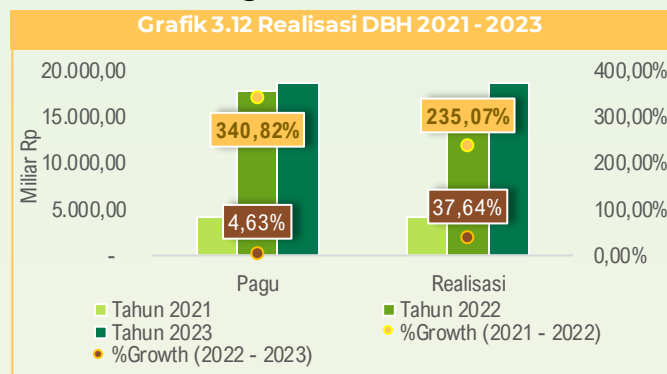


Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, ALCo (diolah)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah.

Secara keseluruhan, DAU di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 telah disalurkan sebesar Rp7.830,84 miliar atau 99,99% dari pagu. Perkembangan DAU baik dari sisi alokasi maupun realisasinya pada tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2023, alokasi DAU mengalami kenaikan 4,58% atau senilai Rp343,10 miliar. Alokasi yang meningkat ini disebabkan oleh karena pengalihan sebagian alokasi DAU sebagai tindak lanjut dari pengalihan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah. Pada tahun 2023, sebagian alokasi DAU per daerah telah ditentukan penggunaannya atau *earmarked*, antara lain untuk penggajian PPPK, pendanaan kelurahan dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Diharapkan dengan penyaluran DAU yang telah optimal ini akan dapat turut meningkatkan taraf perekonomian, sarana dan prasarana pelayanan publik, pembangunan manusia, serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

3.1.3.1.2 Dana Bagi Hasil



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, ALCo (diolah)

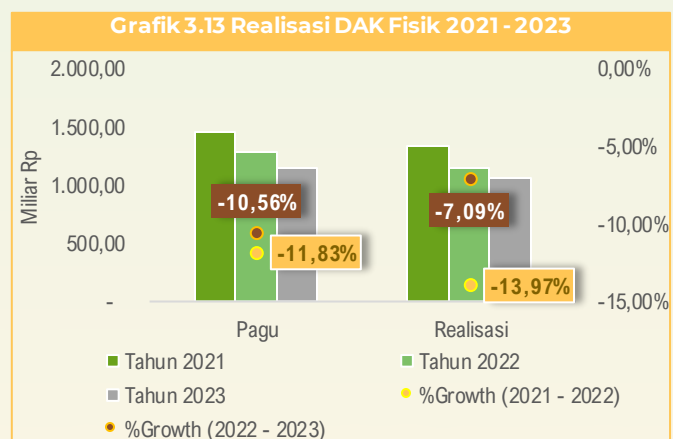
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Secara keseluruhan, DBH di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 telah disalurkan sebesar Rp18.749,03 miliar atau 99,99% dari pagu. Perkembangan DBH baik dari sisi alokasi maupun realisasinya pada tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi baik alokasi dan realisasi DBH terjadi pada tahun 2022, hal ini disebabkan oleh adanya penyaluran Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 pada TA 2022 di bulan Oktober 2022 dan PMK 127/PMK.07/2022 di bulan Desember 2022. Sementara itu, pada tahun 2023, alokasi DBH mengalami kenaikan Rp829,05 miliar yang salah satunya disumbang dari penyaluran kekurangan DBH tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp4,87 miliar. Pada akhir tahun 2023, alokasi DBH yang semula telah dialokasikan pada awal tahun kemudian mendapatkan tambahan alokasi hingga Rp3,38 triliun sehingga menjadi tantangan dalam penyaluran DBH pada tahun 2023.

DBH yang dibagihasilkan di Kalimantan Selatan terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH PBB Migas Bagian Daerah, DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah, DBH PBB Perhutanan Bagian Daerah, DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah, DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25/29 OP, DBH SDA Gas Bumi, DBH SDA Kehutanan – Dana Reboisasi, DBH SDA Kehutanan – PSDH, DBH SDA Minerba – Iuran Tetap, DBH SDA Minerba – Royalti, DBH SDA Minyak Bumi, dan DBH SDA Perikanan.

3.1.3.2 Dana Transfer Khusus (DTK)

3.1.3.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, ALCo (diolah)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) disalurkan dalam rangka mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.

Secara keseluruhan, DAK Fisik di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 telah disalurkan sebesar Rp1.064,847 miliar atau 93,08% dari pagu. Perkembangan alokasi dan realisasi DAK Fisik pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2023 ini, alokasi DAU mengalami penurunan 10,56% dari tahun lalu atau senilai Rp135,08 miliar, sedangkan realisasinya turun 7,09% atau senilai Rp81,31 miliar. Walaupun mengalami penurunan dari sisi alokasi maupun realisasi, namun jika dilihat berdasarkan persentase kinerjanya, penyaluran DAK Fisik pada tahun 2023 (93,08% dari pagu) lebih tinggi dari tahun 2022 (89,60% dari pagu).

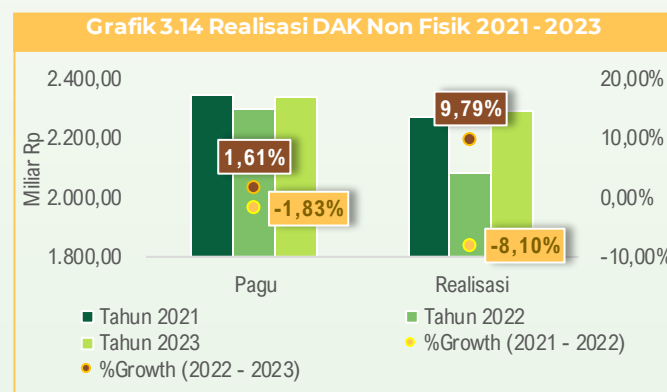
Tematik DAK Fisik pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
2. Mendukung Konektivitas Daerah
3. Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur
 - a. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
 - b. Tematik Penanganan Kawasan Kumuh
 - c. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi
4. Mendukung Ketahanan Pangan
 - a. Tematik Pengembangan *Food Estate*
 - b. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan

Penurunan kinerja penyaluran DAK Fisik kepada pemerintah daerah beberapa di antaranya disebabkan oleh beberapa tantangan, yaitu masih adanya SKPD terlambat melaksanakan kegiatan pelelangan pekerjaan, koordinasi di Pemda antara OPD, APIP, dan

BPKAD/BPKPAD yang belum optimal, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut di tingkat pusat terkait akselerasi pengadaan alkes DAK Fisik Penguatan Sistem Kesehatan, serta masih adanya pemda yang memiliki tren pengajuan pembayaran tagihan di akhir batas waktu dan cenderung lambat dalam melakukan pencatatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah sehingga memperlambat penyaluran.

3.1.3.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, ALCo (diolah)

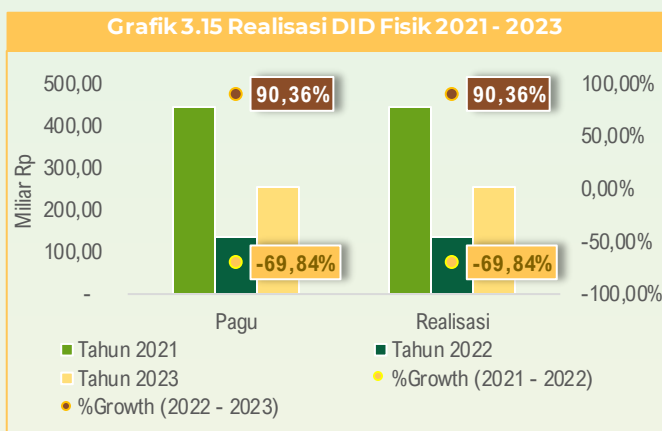
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) disalurkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.

Secara keseluruhan, DAK Non Fisik di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 telah disalurkan sebesar Rp2.291,09 miliar atau 97,89% dari pagu. Perkembangan DAK Non Fisik baik dari sisi alokasi maupun realisasinya pada tiga tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2022, alokasi dan realisasinya mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2023, alokasi DAK Nonfisik mengalami kenaikan 1,61% atau senilai Rp37,10 miliar, sementara realisasinya mengalami peningkatan 9,79% atau senilai Rp204,29 miliar. Jika dilihat berdasarkan persentase kinerjanya, penyaluran DAK Non Fisik pada tahun 2023 (97,89% dari pagu) lebih tinggi dari tahun 2022 (90,59% dari pagu). Pada tahun 2023 ini, terjadi pemisahan dana BOK menjadi dana BOK Dinas dan BOK Puskesmas yang menjadi salah satu penyebab naiknya alokasi DAK Non Fisik tahun 2023.

Penyaluran DAK Non Fisik di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan dengan *output* di antaranya:

1. Bantuan Operasional Sekolah kepada 589.264 siswa pada 3.869 sekolah dengan penyaluran Rp683,86 miliar.
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada 117.024 siswa pada 3.690 sekolah dengan penyaluran Rp77,23 miliar.
3. Bantuan Operasional Kesehatan Dinas (BOK) kepada 14 pemerintah daerah dengan penyaluran Rp96,65 miliar.
4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) kepada 23.192 siswa pada 165 sekolah dengan penyaluran Rp41,37 miliar.
5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kepada 13 pemerintah daerah dengan penyaluran Rp65,47 miliar.
6. Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (BOK Puskesmas) kepada 237 puskesmas dengan penyaluran Rp185,43 miliar.
7. DAK Non Fisik Lainnya kepada 14 pemerintah daerah dengan penyaluran Rp31,30 miliar.

3.1.3.3 Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, ALCo (diolah)

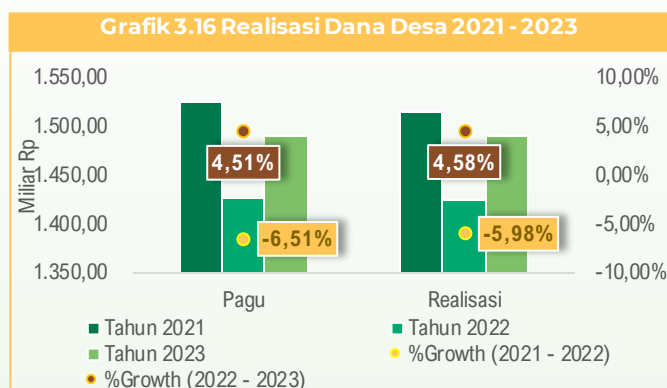
Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, DID di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 telah disalurkan sebesar Rp255,99 miliar atau 100% dari pagu. Perkembangan DID baik dari sisi alokasi maupun

realisasinya pada tiga tahun terakhir menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2022, alokasi dan realisasinya mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2023, alokasi dan realisasi DID mengalami kenaikan 90,36% atau senilai Rp121,51 miliar. Pada tahun 2023 ini, DID atau Insentif Fiskal telah diberikan kepada sebagian pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, di antaranya yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Kesejahteraan Masyarakat; Insentif Fiskal Reguler.
2. Pemerintah Kabupaten Banjar: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Kesejahteraan Masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Kesejahteraan Masyarakat; Insentif Fiskal Reguler.
4. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Kesejahteraan Masyarakat.
5. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Kesejahteraan Masyarakat.
6. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Kesejahteraan Masyarakat.
7. Pemerintah Kabupaten Tabalong: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Kesejahteraan Masyarakat; Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Pengendalian Inflasi; Insentif Fiskal Reguler.
8. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Kesejahteraan Masyarakat.
9. Pemerintah Kabupaten Balangan: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Kesejahteraan Masyarakat; Insentif Fiskal Reguler.
10. Pemerintah Kota Banjarmasin: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Kesejahteraan Masyarakat; Insentif Fiskal Reguler.
11. Pemerintah Kota Banjarbaru: Insentif Fiskal Tahun Anggaran Berjalan – Kinerja Pengendalian Inflasi; Insentif Fiskal Reguler.

3.1.3.4 Dana Desa



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, ALCo (diolah)

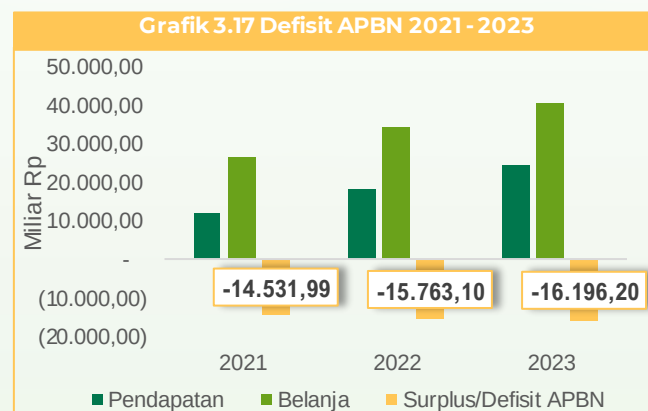
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Secara keseluruhan, Dana Desa di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 telah disalurkan sebesar Rp1.489,99 miliar atau 99,94% dari pagu. Perkembangan alokasi dan realisasi Dana Desa pada tiga tahun terakhir menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2022, alokasi dan realisasinya mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2023, alokasi Dana Desa mengalami kenaikan 4,51% atau senilai Rp64,31 miliar, sementara realisasinya mengalami peningkatan 4,58% atau senilai Rp65,26 miliar. Jika dilihat berdasarkan persentase kinerjanya, penyaluran Dana Desa pada tahun 2023 (99,94% dari pagu) lebih tinggi dari tahun 2022 (99,88% dari pagu). Kenaikan alokasi Dana Desa ini salah satunya disebabkan oleh perolehan alokasi Tambahan Dana Desa sebagai insentif atas kinerja tahun berjalan pada 375 desa di 11 kabupaten.

Kinerja penyaluran Dana Desa kepada pemerintah daerah mengalami beberapa tantangan yang di antaranya disebabkan oleh kemampuan SDM perangkat desa yang masih terbatas sehingga belum menguasai aplikasi yang kemudian penyusunan dokumen syarat penyaluran menjadi terkendala; kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil menyebabkan terlambatnya penyampaian dokumen *hardcopy* yang disampaikan ke kantor DPMD; serta masih adanya Pemda yang memberikan penambahan

syarat salur di mana penyaluran Dana Desa dapat dilakukan setelah Desa menyelesaikan laporan aset desa.

3.1.4 Surplus/Defisit APBN



Sumber: OMSPAN, SIMTRADA, ALCo (diolah)

Jika dilihat tren perkembangannya, defisit APBN di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan defisit dari tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, defisit APBN mencapai Rp16.196,20 miliar atau meningkat sebesar 2,75% yang senilai Rp433,10 miliar dari tahun 2022. Peningkatan defisit yang terjadi ini disebabkan adanya peningkatan pada sisi belanja yang lebih tinggi dari peningkatan pada sisi pendapatan pada tahun 2023. Peningkatan pada realisasi belanja ini utamanya disebabkan oleh peningkatan pada penyaluran TKD. Walaupun di sisi lain, kinerja pendapatan juga mengalami peningkatan yang utamanya disebabkan oleh pendapatan perpajakan sebagai dampak meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta penerapan UU HPP dan adanya pembayaran pajak yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Namun demikian, besaran pendapatan ini masih lebih rendah dari belanja APBN di Kalimantan Selatan sehingga menyebabkan defisit APBN yang semakin melebar di Kalimantan Selatan.

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat

Jumlah satuan kerja BLU Pusat di wilayah Kalimantan Selatan hingga tahun 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) satuan kerja (satker) BLU yang terdiri dari Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, dan Politeknik Kesehatan Banjarmasin. Berikut profil masing-masing dari satker BLU pusat di Kalimantan Selatan:

Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin merupakan BLU yang bergerak di bidang kesehatan dan salah satu sarana kesehatan Polri di wilayah Polda Kalimantan Selatan yang memberikan pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan pada tugas operasional Kepolisian di wilayah Polda Kalsel. Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin mulai menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum secara penuh pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 203/KMK.05/2014 tanggal 09 September 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Pada tahun 2018, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin berhasil mencapai predikat akreditasi tingkat Paripurna (bintang lima) versi akreditasi 2012 dari KARS.

Universitas Lambung Mangkurat

Universitas Lambung Mangkurat adalah BLU yang bergerak di bidang pendidikan dan salah satu perguruan tinggi yang berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Universitas Lambung

dengan lingkungan. Universitas Lambung Mangkurat ditetapkan menjadi BLU sejak tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.05/2022 tentang Penetapan Universitas Lambung Mangkurat sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Politeknik Kesehatan Banjarmasin

Politeknik Kesehatan Banjarmasin adalah BLU yang bergerak di bidang pendidikan dan salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Kota Banjarbaru. Politeknik Kesehatan Banjarmasin telah ditetapkan menjadi satker BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.05/2023 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Jambi, Politeknik Kesehatan Palangka Raya, Politeknik Kesehatan Palembang dan Politeknik Kesehatan Banjarmasin pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Kemandirian BLU

Dalam menerapkan pola keuangan BLU, Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekkes Banjarmasin mencatatkan realisasi pendapatan

Tabel 3.7 Pendapatan dan Belanja BLU s.d. Triwulan III 2023

Nama BLU	Pendapatan s.d. Sept 2023					Belanja s.d. Sept 2023					
	Target PNBPNP (Miliar Rp)	Realisasi PNBPNP (Miliar Rp)	Realisasi PNBPNP (%)	Realisasi Pendapatan 2022 (Miliar Rp)	Growth (%2022 - 2023)	Jenis Belanja	Anggaran Belanja (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (%)	Realisasi Belanja 2022 (Miliar Rp)	Growth (%2022 - 2023)
Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin	64,70	66,64	103,01	46,01	44,86	51	3,84	2,83	73,69	2,65	6,84
						52	77,40	54,86	70,88	42,15	30,16
						53	2,49	1,09	43,92	0,51	113,80
Universitas Lambung Mangkurat	297,43	303,94	102,19	108,01	181,39	51	189,32	140,22	74,06	130,92	7,10
						52	309,39	146,47	47,34	103,75	41,18
						53	46,85	17,06	36,41	20,14	(15,28)
Politeknik Kesehatan Banjarmasin	12,24	11,84	96,70	11,30	4,77	51	27,71	20,60	74,36	19,66	4,82
						52	28,65	28,65	100,00	10,82	164,92
						53	33,96	14,36	42,30	6,24	130,26

Sumber: LK BLU Triwulan III 2023 (diolah)

Mangkurat merupakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya

dan belanja BLU sebagaimana tabel berikut.

Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin dalam menjalankan pelayanannya hingga triwulan III 2023 telah mengumpulkan

pendapatan sebesar Rp66,64 miliar yang didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit. Jumlah pendapatan ini mengalami kenaikan hingga 44,86% atau meningkat senilai Rp20,64 miliar dari periode yang sama tahun 2022. Sementara itu, dari sisi realisasi belanja, jumlah belanja yang telah direalisasikan hingga September 2023 adalah sebesar Rp58,79 miliar. Belanja pada Rumkit ini didominasi oleh belanja barang yang telah direalisasikan sebesar Rp54,86 miliar yang tumbuh 30,16% atau senilai Rp12,71 miliar. Berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah belanja yang direalisasikan hingga triwulan III 2023 ini, pendapatan berupa PNBPN yang diterima Rumkit lebih tinggi dari belanjanya, sehingga mengindikasikan kemandirian Rumkit dalam membiayai belanjanya sendiri.

Berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memiliki PNBPN terbesar di antara ketiga BLU di Kalimantan Selatan. Sampai dengan triwulan III 2023, ULM telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp303,94 miliar yang meningkat hingga 181,39% atau Rp195,93 miliar dari periode yang sama tahun 2022. Pendapatan yang diterima Universitas Lambung Mangkurat didominasi oleh Pendapatan Jasa Badan Layanan Umum yang berupa Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan. Jika dilihat dari realisasi belanjanya, jumlah belanja yang telah direalisasikan ULM hingga

lebih tinggi dari belanjanya, sehingga mengindikasikan kemandirian ULM dalam membiayai belanjanya sendiri.

Politeknik Kesehatan Banjarmasin telah mengumpulkan pendapatan berupa PNBPN sebesar Rp11,84 miliar yang meningkat 4,77% atau Rp0,54 miliar dari periode yang sama tahun 2022. Pendapatan yang diterima Universitas Lambung Mangkurat didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan. Jika dilihat dari realisasi belanjanya, jumlah belanja yang telah direalisasikan Poltekkes Banjarmasin hingga September 2023 adalah sebesar Rp63,62 miliar. Belanja barang memiliki kontribusi terbesar realisasi belanja hingga triwulan III 2023 ini yaitu sebesar Rp28,65 miliar dan meningkat 164,92% atau senilai Rp17,84 miliar. Berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah belanja yang direalisasikan hingga triwulan III 2023 ini, pendapatan berupa PNBPN yang diterima Poltekkes Banjarmasin lebih rendah dari belanjanya, sehingga mengindikasikan kemandirian Poltekkes Banjarmasin masih belum optimal, oleh karena itu masih memerlukan porsi APBN untuk dalam membiayai belanjanya.

Perkembangan BLU

Jika dilihat berdasarkan neraca hingga triwulan III 2023, berikut perkembangan besaran aset, kewajiban, dan ekuitas dari ketiga BLU di Kalimantan Selatan.

Tabel 3.8 Neraca BLU s.d. Triwulan III 2023

Nama BLU	Neraca s.d. Sept 2023								
	Aset (Miliar Rp)	Aset 2022 (Miliar Rp)	Growth (%2022 - 2023)	Kewajiban (Miliar Rp)	Kewajiban 2022 (Miliar Rp)	Growth (%2022 - 2023)	Ekuitas (Miliar Rp)	Ekuitas 2022 (Miliar Rp)	Growth (%2022 - 2023)
Rumkit Bhayangkara Banjarmasin	135,87	138,89	(2,18)	0,34	10,59	(96,80)	135,53	128,30	5,63
Universitas Lambung Mangkurat	7.925,66	7.649,31	3,61	128,89	128,89	-	7.796,78	7.602,91	2,55
Politeknik Kesehatan Banjarmasin	204,95	216,11	(5,17)	1,22	0,06	1.911,84	203,73	216,05	(5,70)

Sumber: LK BLU Triwulan III 2023 (diolah)

September 2023 adalah sebesar Rp303,75 miliar. Belanja barang memiliki porsi terbesar realisasi belanja hingga triwulan III 2023 ini yaitu sebesar Rp146,47 miliar dan meningkat 41,18% atau senilai Rp42,72 miliar. Berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah belanja yang direalisasikan hingga triwulan III 2023 ini, pendapatan berupa PNBPN yang diterima ULM

Berdasarkan neraca masing-masing BLU hingga triwulan III 2023, aset terbesar dimiliki oleh Universitas Lambung Mangkurat. Hal ini salah satunya disebabkan karena Universitas Lambung Mangkurat merupakan BLU pendidikan terbesar di Kalimantan Selatan yang berlokasi pada dua kota, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Jika dilihat berdasarkan

pertumbuhan asetnya, Universitas Lambung Mangkurat menjadi BLU yang memiliki peningkatan aset sebesar 3,61%. Sementara itu, Rumkit Tk III Bhayangkara Banjarmasin dan Politeknik Kesehatan Banjarmasin memiliki penurunan masing-masing 2,18% dan 5,17% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

3.1.6.1 Penerusan Pinjaman

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor ND-13/PB.4/2022 tanggal 05 Januari 2022 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi *Outstanding* Pinjaman Pemda, BUMD, dan Koperasi per 31 Desember 2021, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan tidak melaksanakan rekonsiliasi karena tidak terdapat debitur Pemda, BUMD dan Koperasi di wilayah kerja Kanwil DJPb bersangkutan.

3.1.6.2 Kredit Usaha Rakyat

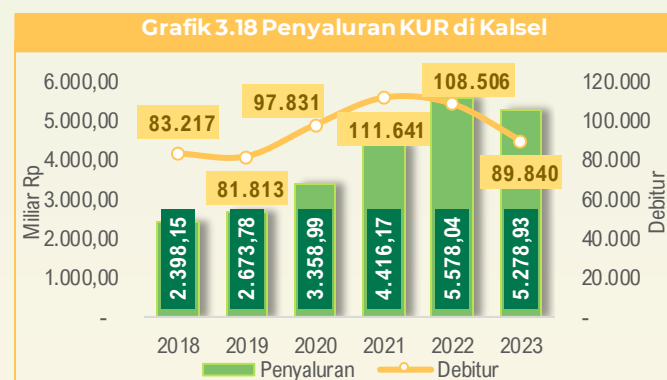
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia. UMKM menyumbang 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional serta berkontribusi hingga 60,5% terhadap PDB. Peran strategis yang dimiliki UMKM ini turut menjadi perhatian oleh pemerintah, sehingga berbagai upaya turut dilakukan untuk mengembangkan UMKM dapat tumbuh dan mendorong perekonomian Indonesia lebih baik lagi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perseorangan skala UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kinerja penyaluran KUR di Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun terus

cenderung meningkat seiring dengan program Pemerintah untuk terus memberdayakan UMKM sebagaimana nampak pada grafik berikut.

Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan s.d. Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp5,28 triliun pada 89.840 debitur. Realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 5,36% dari sisi nominal, dan penurunan 17,20% dari sisi jumlah debitur dibandingkan tahun 2022. Penyaluran KUR di Kalsel didominasi oleh sektor perdagangan (45,85%) yaitu sebesar Rp2,42 triliun kepada 37.960 debitur. Sementara berdasarkan skemanya, penyaluran KUR di Kalsel didominasi oleh skema Mikro (66,10%) yaitu sebesar Rp3,49 triliun kepada 76.789 debitur. Berdasarkan wilayahnya, penyaluran KUR tahun 2023 masih berada di bawah capaian penyaluran KUR tahun 2022, dengan rata-rata penurunan sebesar -13,25% di 12 Kab/Kota di Kalsel. Kota Banjarmasin satu-satunya yang mengalami peningkatan penyaluran KUR sebesar 31,04% dibandingkan tahun lalu dengan penyaluran mencapai Rp1,31 triliun kepada 17.758 debitur.

Dalam mengetahui dampak penyaluran KUR terhadap sisi perekonomian di Kalimantan Selatan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan analisis terkait Pengaruh Penyaluran KUR terhadap Tingkat Ketimpangan (*Gini Ratio*) di Kalimantan Selatan. Analisis dilakukan terhadap data penyaluran KUR, data sebaran tenaga kerja, dan *gini ratio* dari tahun 2017 s.d. 2022 meliputi 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari analisis tersebut diketahui penyaluran KUR baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan/*gini ratio* di Kalimantan Selatan. Hubungan antara penyaluran KUR dengan tingkat ketimpangan memiliki korelasi negatif dimana setiap 1% peningkatan penyaluran KUR akan menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0,028%. Meskipun pengaruhnya signifikan, kontribusi penyaluran KUR masih relatif rendah, yaitu sebesar 12,79% terhadap tingkat ketimpangan, sehingga 87,21% lainnya adalah pengaruh dari variabel lain di luar analisis yang telah dilakukan.

Analisis lainnya yang telah dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan



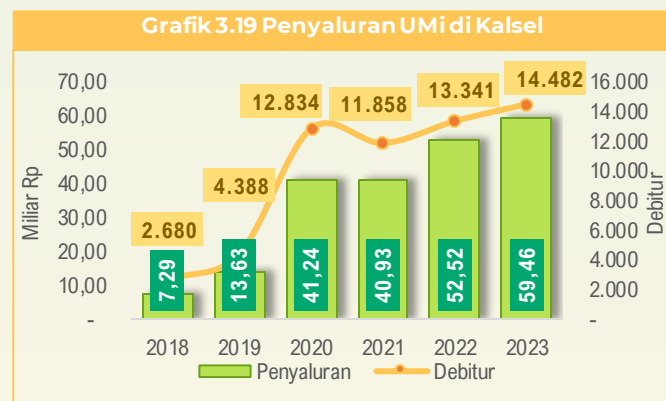
Sumber: SIKP (diolah)

Selatan adalah analisis terkait Penyaluran KUR terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan. Berdasarkan analisis tersebut, diketahui bahwa setiap 1% kenaikan penyaluran KUR di Kalimantan Selatan bersama faktor lainnya dapat menurunkan 0,412% penduduk miskin di Kalimantan Selatan. Selain itu, diketahui pula setiap 1% penyaluran KUR di Kalimantan Selatan meskipun kecil namun secara signifikan bersama faktor lainnya menyumbang secara tidak langsung terhadap PDRB Kalimantan Selatan sebesar 0,335%.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa penyaluran KUR yang dilaksanakan oleh pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi, maka diperlukan peningkatan penyaluran KUR kepada UMKM dengan menjaring debitur-debitur produktif dan berpotensi di Kalimantan Selatan. Selain penyaluran KUR, pemerintah dan berbagai instansi terkait perlu melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM agar dampak dari penyaluran KUR tidak hanya dapat diukur namun dapat dirasakan pula kualitas manfaatnya.

3.1.6.3 Kredit Ultra Mikro

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program pembiayaan yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan atau belum *bankable*. Oleh karena itu, agar usaha mikro tersebut dapat berkembang dengan modal yang cukup namun belum bisa mengikuti program KUR, maka



Sumber: SIKP (diolah)

pemerintah menyediakan program pembiayaan

UMi sebagai tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha.

Penyaluran UMi di Kalimantan Selatan hingga tahun 2023 ini memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Penyaluran UMi di Kalsel s.d. 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp59,46 miliar kepada 14.482 debitur. Penyaluran UMi mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun lalu dengan persentase peningkatan sebesar 13,37%. Jumlah debitur mengalami peningkatan sebesar 8,72% (yoy). Tren penyaluran UMi di Kalsel s.d. 31 Desember 2023 cukup berfluktuasi dengan *growth* penyaluran tertinggi terjadi pada bulan Juli (941%) yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Penyaluran UMi di Kalsel didominasi oleh sektor perdagangan (93,51%) yaitu sebesar Rp55,60 miliar kepada 13.483 debitur. Sementara berdasarkan skemanya, penyaluran UMi di Kalsel didominasi oleh skema Kelompok (96,75%) yaitu sebesar Rp57,52 miliar kepada 14.144 debitur. Berdasarkan wilayahnya, rata-rata capaian penyaluran UMi tahun 2023 telah melampaui capaian penyaluran UMi tahun 2022. Kontraksi penyaluran UMi secara yoy terjadi di 2 kab/kota, yaitu Kab. HST dan Kota Banjarmasin yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar -20,42% dan -11,32%. Penyaluran UMi tertinggi berada di Kota Banjarmasin yaitu sebesar Rp13,89 miliar kepada 3.279 debitur.

3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

Pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan yang ditandai dengan peningkatan dari sisi pendapatan maupun belanja menunjukkan capaian yang impresif pada tahun 2023. Diketahui, pendapatan APBN telah terealisasi hingga 130,06% dari target, sedangkan belanja APBN telah terealisasi sebesar 99,11% dari pagu yang ditetapkan. Kinerja pendapatan APBN yang sudah sangat baik ini diharapkan terus dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan perekonomian yang menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan. Beberapa isu strategis yang memicu kendala dan tantangan berkenaan pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya revisi pusat (blokir/*Automatic Adjustment* (AA)) yang tidak terdapat jadwal atas proses pengusulan dan penyelesaian AA pada internal K/L, sehingga menyebabkan rendahnya akurasi perencanaan kegiatan satker.
- 2) Seringnya K/L melakukan revisi *Automatic Adjustment* (perubahan komposisi) yang memakan waktu cukup lama sehingga satker harus menunda pelaksanaan kegiatannya karena harus menunggu revisi selesai dan melakukan penyesuaian alokasi dan rencana kegiatan kembali.
- 3) Adanya penambahan alokasi pagu di akhir tahun anggaran 2023 sehingga menyebabkan penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.
- 4) Proses perikatan kontrak tidak dilakukan pada periode awal tahun anggaran sehingga menyebabkan mundurnya pelaksanaan dan penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran, terlambatnya proses perikatan tersebut disebabkan oleh: (1) Proses perencanaan dan pelelangan (masa sanggah) yang memakan waktu cukup panjang, serta (2) Keterbatasan SDM dalam melaksanakan proses PBJ.
- 5) Adanya Inpres 2 Tahun 2022 yang mewajibkan pemenuhan kandungan dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa, sementara vendor/penyedia barang jasa yang memenuhi standar sangat terbatas dan terkadang barang TKDN tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- 6) Kinerja realisasi belanja modal terhambat karena sulitnya mendapatkan material yang berada di luar pulau, sehingga jika faktor cuaca tidak mendukung maka terjadi keterlambatan bahan baku dan berdampak pada rendahnya capaian proyek. Keterbatasan jumlah SDM atau tenaga kerja pada musim tertentu dalam penyelesaian proyek juga turut memperlambat progres.
- 7) Terlambatnya penetapan calon penerima bantuan/manfaat dari kantor pusat K/L untuk penyaluran bantuan pemerintah terutama di lingkungan Kementerian Pertanian sehingga memperlambat penyaluran.
- 8) Progres realisasi DAK Fisik di wilayah Kalimantan Selatan yang cukup lambat salah satunya disebabkan karena Pemda terlambat melaksanakan proses lelang dikarenakan menunggu selesainya proses penyusunan revisi DPA yang memerlukan waktu lama.
- 9) Lambatnya penyaluran DAK Fisik juga dikarenakan pemda memiliki tren pengajuan pembayaran tagihan di akhir batas waktu dan cenderung lambat dalam melakukan pencatatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.

Dalam mengatasi kendala atau permasalahan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya penjadwalan atas proses pengusulan dan penyelesaian AA dalam satu tahun anggaran, agar satker dapat menyesuaikan rencana kegiatannya.
- 2) Perlu adanya batasan untuk revisi perubahan komposisi AA.
- 3) Perlunya reformulasi IKPA atas indikator penyerapan anggaran agar penambahan pagu pada triwulan berkenaan dibebankan pada triwulan yang akan datang.
- 4) Perlu adanya kebijakan penetapan target jumlah kontrak pra DIPA/kontrak dini di setiap Satker, serta dilakukan pemberian *reward and punishment* dalam mewujudkannya.
- 5) Pertimbangan kebijakan yang lebih fleksibel dengan ketersediaan penyedia pada wilayah tertentu yang dapat memberikan barang/jasa sesuai standar yang dipersyaratkan (seperti TKDN) tanpa mengkompromi kualitas.
- 6) Memetakan kembali kegiatan/belanja yang dapat dicairkan pada saat terjadi gangguan cuaca sehingga dapat mengantisipasi rendahnya realisasi belanja apabila terdapat hambatan seperti cuaca buruk.
- 7) Diperlukan simplifikasi aturan penetapan penerima bantuan dan satker agar aktif berkoordinasi dengan penerima dan yang berwenang menetapkan penerima bantuan.
- 8) Pemerintah daerah sebaiknya melakukan lelang pra DPA seperti yang sudah

diaplikasikan pada pemerintah pusat. Selain itu, diharapkan juknis pelaksanaan DAK Fisik juga dapat diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga jika pada awal tahun terdapat revisi DPA maka revisi dapat dilakukan dengan lebih cepat, proses lelang juga lebih cepat, dan penyaluran dapat dilakukan dengan segera.

- 9) Diperlukannya aturan jadwal pengajuan pembayaran tagihan hingga proses penatausahaan dan pertanggungjawabannya agar penyaluran DAK Fisik dapat terakselerasi.

3.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan menghadapi berbagai tantangan berupa isu strategis yang terjadi di daerah. Isu strategis tersebut di antaranya sebagai berikut: (1) Masih Terjadinya Kerusakan Lingkungan (Pencemaran Air, Lubang Tambang, dan Deforestasi) dan Belum Optimalnya Mitigasi Bencana (Banjir dan Kebakaran Hutan Lahan); (2) Belum Mantapnya Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (termasuk Energi dan Konektivitas); (3) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Belum Terdiversifikasinya Sektor Ekonomi di Kalimantan Selatan dalam Mendukung Transformasi Struktur Ekonomi Daerah (Pertanian, Pariwisata, Hilirisasi Komoditas Unggulan, dan Pelaku UMKM); (5) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Ke Masyarakat Berbasis Digital; dan (6) Kalimantan Selatan yang memiliki Peluang Besar Menjadi Gerbang *Food Estate* di Kalteng dan Ibu Kota Negara di Kaltim (Jalur Logistik dan Konektivitas).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yaitu: “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan” yang diharapkan dapat mengatasi isu-isu strategis tersebut dengan empat fokus pembangunan yaitu (1) Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan; (2) UMKM dan Ketenagakerjaan; (3) Investasi

Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata; dan (4) Banjir dan Covid-19.

Fokus dan tema pembangunan tersebut kemudian dituangkan dalam beberapa prioritas daerah yang di antaranya (1) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (2) Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata; (3) Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah; (4) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik; (5) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana; (6) Mewujudkan Kalsel sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung *Food Estate*.

RKPD yang telah disusun Provinsi Kalimantan Selatan juga memperhatikan arahan dan kebijakan umum serta strategi dari sudut pandang nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan RKPD dan prioritas daerah tersebut, rencana anggaran dituangkan dalam APBD oleh pemerintah di Kalimantan Selatan yang menjadi dasar serta pedoman pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pada periode berkenaan. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian sesuai tujuan dan prioritas daerah. Dalam penyusunannya sendiri, APBD berdasar pada kebijakan yang diatur dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan prioritas daerah, berikut disajikan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah di Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2023.

Tabel 3.9 I-Account Realisasi APBD Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2023

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (%) (2022 - 2023)
	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	
PENDAPATAN DAERAH	23.850,83	24.331,50	102,02	28.868,98	31.033,60	107,50	34.825,43	37.685,96	108,21	21,44
PAD	5.689,57	6.065,51	106,61	6.733,63	7.006,48	104,05	7.508,99	8.944,65	119,12	27,66
Pendapatan Transfer (TKD)	16.066,92	16.456,92	102,43	19.760,92	21.772,05	110,18	25.237,75	26.423,20	104,70	21,36
Transfer Antar Daerah	1.618,19	1.186,90	73,35	1.773,93	2.081,36	117,33	1.885,46	2.221,88	117,84	6,75
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	476,15	622,16	130,66	600,49	173,71	28,93	193,23	96,23	49,80	(44,60)
BELANJA DAERAH	26.490,57	25.292,58	95,48	31.281,27	27.951,46	89,36	39.673,15	34.395,48	86,70	23,05
Belanja Operasi	17.810,19	17.008,73	95,50	20.392,36	18.095,20	88,74	24.019,46	20.816,74	86,67	15,04
Belanja Pegawai	9.088,63	8.543,18	94,00	9.781,04	8.818,36	90,16	10.548,57	9.326,06	88,41	5,76
Belanja Barang dan Jasa	7.376,63	7.207,83	97,71	9.521,89	8.305,64	87,23	11.632,19	9.847,81	84,66	18,57
Belanja Bunga	25,05	9,24	36,88	24,34	16,66	68,46	24,83	21,67	87,26	30,05
Belanja Subsidi	-	-	-	5,01	1,06	21,25	2,77	1,40	50,42	31,50
Belanja Hibah	1.178,91	1.132,19	96,04	878,99	789,55	89,82	1.596,58	1.413,90	88,56	79,08
Belanja Bantuan Sosial	140,97	116,28	82,49	181,09	163,92	90,52	214,51	205,90	95,99	25,61
Belanja Modal	4.791,91	4.400,78	91,84	6.053,55	5.154,98	85,16	10.048,38	8.301,90	82,62	61,05
Belanja Modal	4.791,91	4.400,78	91,84	6.053,55	5.154,98	85,16	10.048,38	8.301,90	82,62	61,05
Belanja Tidak Terduga	332,95	267,80	80,43	212,07	96,01	45,27	283,42	45,44	16,03	(52,68)
Belanja Tidak Terduga	332,95	267,80	80,43	212,07	96,01	45,27	283,42	45,44	16,03	(52,68)
Belanja Transfer	3.555,51	3.615,28	101,68	4.623,29	4.605,27	99,61	5.321,89	5.231,41	98,30	13,60
Belanja Bagi Hasil	1.255,41	1.229,76	97,96	2.141,90	2.132,41	99,56	2.302,86	2.300,37	99,89	7,88
Belanja Bantuan Keuangan	2.300,10	2.385,51	103,71	2.481,39	2.472,86	99,66	3.019,03	2.931,04	97,09	18,53
SURPLUS/DEFISIT	(2.639,74)	(961,09)	36,41	(2.412,29)	3.082,15	(127,77)	(4.847,71)	3.290,48	(67,88)	6,76
PEMBIAYAAN	3.266,88	3.629,49	111,10	2.459,74	2.470,02	100,42	4.933,11	4.115,99	83,44	66,64
Penerimaan Pembiayaan	3.364,22	3.749,54	111,45	3.006,46	2.945,61	97,98	5.656,45	4.812,92	85,09	63,39
Pengeluaran Pembiayaan	97,34	120,06	123,33	546,73	475,59	86,99	723,34	696,93	96,35	46,54
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	627,14	2.668,40	425,49	47,45	5.552,17	11.701,60	85,40	7.406,46	8.672,85	33,40

Sumber: LRA Pemda, SIKRI, ALCo (diolah)

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2023, APBD di Kalimantan Selatan telah mampu mengumpulkan pendapatan daerah sebesar Rp37,69 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2022 mencapai Rp31,03 triliun. Besaran ini menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja pendapatan pemda lingkup Kalsel. Walaupun secara total mengalami

kenaikan, namun tidak semua komponen pendapatan daerah mengalami kenaikan pada tahun 2023. Komponen seperti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022.

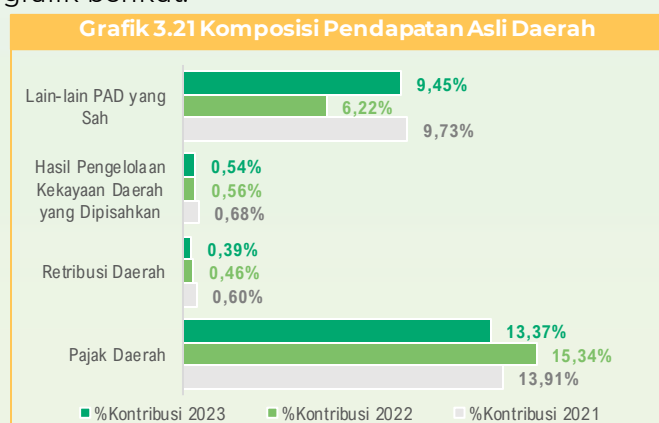
3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang diterima pemerintah di Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan pada tabel.

Tabel 3.10 Nominal Komponen PAD			
Komponen Pendapatan Asli Daerah	Miliar Rp		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pajak Daerah	3.384,41	4.760,88	5.036,79
Retribusi Daerah	147,14	142,27	145,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165,59	173,22	202,61
Lain-lain PAD yang Sah	2.368,38	1.930,12	3.560,02

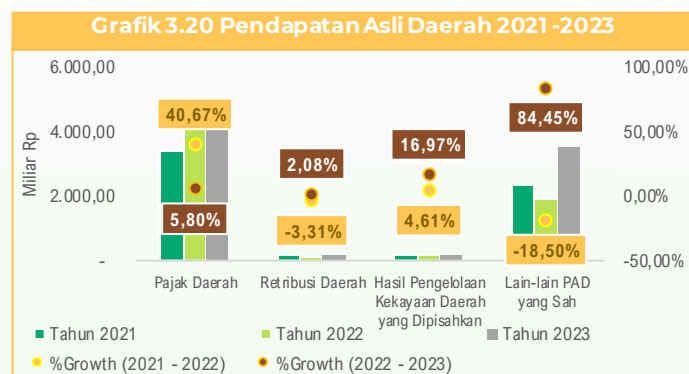
Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

Jika dilihat berdasarkan komposisinya, kinerja pendapatan APBD di Kalimantan Selatan didominasi oleh pendapatan transfer (TKD) yang memiliki kontribusi hingga 70,11% dan PAD dengan kontribusi 23,73% dari total pendapatan APBD. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan porsi pada masing-masing komponen PAD, pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah memiliki porsi yang paling besar seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut.



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

Komponen pajak daerah yang mendominasi PAD pada tahun 2023 ini mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,98%, walaupun di sisi lain komponen ini mengalami peningkatan secara nominal dari tahun 2022. Hal ini dikarenakan komponen pajak daerah memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan komponen lain-lain PAD yang sah, sehingga kontribusi komponen lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan kontribusi sebesar 3,23% dibanding tahun lalu. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan pada masing-masing komponen PAD yang ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 telah terkumpul hingga Rp8.944,65 miliar atau 119,12% dari target yang ditentukan. PAD pada tahun ini juga mampu tumbuh hingga 27,66% atau senilai Rp1.938,17 miliar. Peningkatan ini utamanya disumbangkan oleh semua komponen PAD pada tahun 2023.

Pertumbuhan tertinggi dibandingkan tahun 2022 dimiliki oleh komponen lain-lain PAD yang sah yang meningkat hingga 84,45% atau Rp1.629,91 miliar. Peningkatan ini disumbangkan oleh meningkatnya pendapatan bunga sebesar Rp1.424,83 miliar dari tahun lalu. Selain itu, jenis pendapatan yang mendominasi komponen lain-lain PAD yang Sah yaitu pendapatan BLUD juga turut menyumbangkan peningkatan pada tahun ini sebesar Rp59,22 miliar dibanding tahun 2022.

Sementara itu, komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami kenaikan 16,97% atau Rp29,39 miliar. Peningkatan pada komponen ini paling besar disumbangkan oleh bagian laba yang dibagikan kepada pemda (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yang naik sebesar Rp20,49 miliar.

Komponen pajak daerah yang menyumbang pendapatan pada PAD paling besar di tahun 2023 ini turut mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Pajak daerah mengalami pertumbuhan 5,80% atau senilai Rp275,91 miliar. Kenaikan pada pajak daerah ini disumbangkan oleh Pajak Bahan Bakar Bermotor yang meningkat hingga Rp153,37 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) meningkat Rp48,27 miliar, pajak restoran meningkat Rp47,43 miliar, pajak penerangan jalan sebesar Rp30,79 miliar. Jika dilihat berdasarkan persentase kenaikannya,

pajak air permukaan mengalami peningkatan hingga 105,39% dari tahun 2022 atau senilai Rp9,60 miliar.

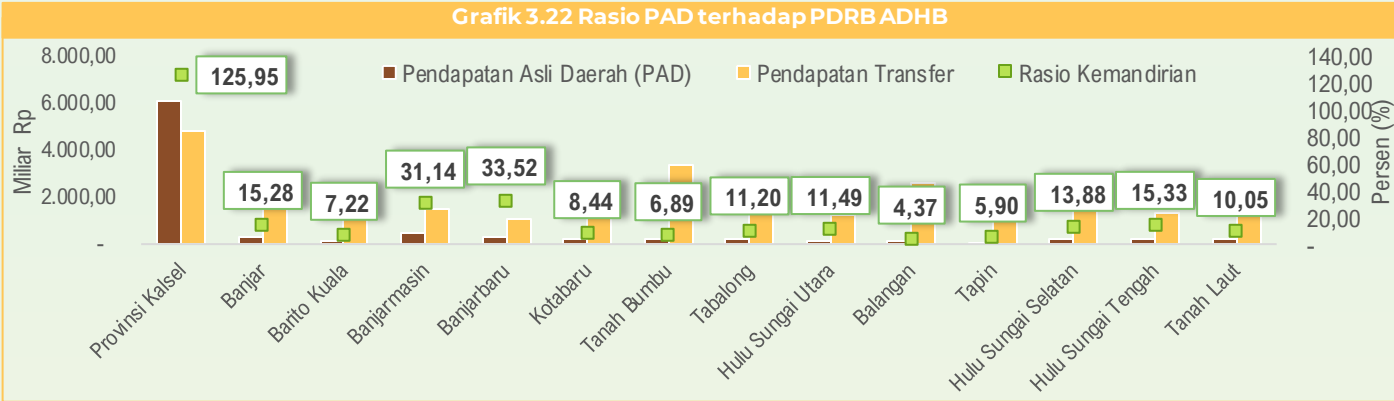
Dalam mendorong penerimaan pajak daerah berupa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kednaraan bermotor (BBNKB) yang mendominasi PAD, Pemprov Kalsel melaksanakan program relaksasi di dua sektor, yaitu penghapusan denda pajak dan pengurangan pokok pajak sebelum jatuh tempo. Program ini menjadi salah satu andalan pemerintah di Kalimantan Selatan dalam mendorong capaian PAD pada tahun 2023.

Retribusi daerah pada tahun 2023 ini juga turut mengalami kenaikan sebesar 2,08% atau Rp2,95 miliar. Peningkatan kinerja ini disumbang oleh peningkatan capaian pada komponen retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp4,64 miliar, retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp2,00 miliar, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp1,64 miliar. Selain itu,

Dalam rangka mengetahui kontribusi PAD terhadap kondisi perekonomian di daerah, berikut rasio PAD terhadap PDRB ADHB di Kalimantan Selatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik. Rasio PAD terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun 2023 yang ditunjukkan pada grafik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja walaupun di sisi lain kinerja PAD tahun 2022 mengalami peningkatan. Capaian pada rasio ini menggambarkan bahwa peningkatan pada PAD sejalan dengan meningkatnya jumlah PDRB ADHB pada tahun 2023.

Kemandirian Daerah

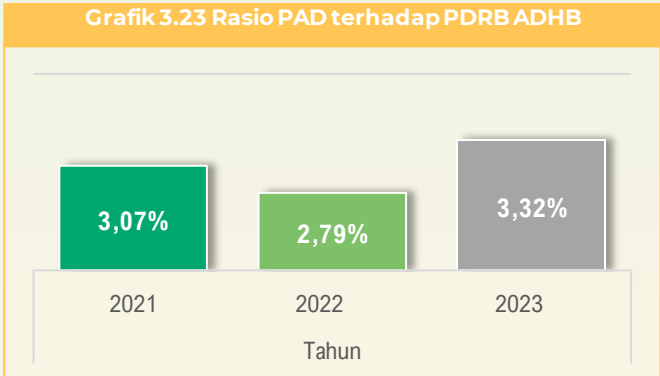
Rasio kemandirian daerah merupakan rasio yang merepresentasikan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan serta urusan pemerintahannya sendiri. Rasio kemandirian daerah dapat diukur dengan perhitungan



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

jenis pendapatan yang mendominasi komponen retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan juga turut menyumbangkan peningkatan pada tahun ini sebesar Rp1,05 miliar dibanding tahun 2022.

Kontribusi PAD terhadap PDRB



Sumber: LRA Pemda, GFS, BPS (diolah)

proporsi PAD terhadap pendapatan transfer dan pinjaman yang diterima oleh pemda berkenaan.

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	>25-50%	Konsultatif
Sedang	>50-75%	Partisipatif
Tinggi	>75-100%	Delegatif

Secara keseluruhan, rasio kemandirian Pemda di Kalimantan Selatan mencapai angka 31,23% atau memiliki kemampuan keuangan “rendah”. Dalam hal ini, hampir seluruh pemerintah di Kalimantan Selatan memiliki kemampuan kemandirian dengan kategori “rendah sekali”, kecuali Pemprov Kalsel yang memiliki kemandirian “tinggi” dan Pemkot Banjarmasin serta Banjarbaru yang memiliki

kemandirian “rendah”. Pemprov Kalsel memiliki kemandirian yang tinggi karena ditopang oleh jenis pajak yang memiliki volume dan nilai transaksi besar yang berada dalam wewenang provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan pusat aktivitas perekonomian. Namun, pada sejumlah PAD yang diterima Pemprov Kalsel masih terdapat bagian yang masih harus dibagihasilkan ke masing-masing pemerintah daerah dan merupakan hak masing-masing pemerintah daerah berkenaan. Pemkot Banjarmasin dan Banjarbaru memperoleh kategori kemandirian “rendah” karena merupakan daerah yang memiliki aktivitas perekonomian tertinggi di Kalimantan Selatan. Hal ini berkenaan dengan posisi Kota Banjarmasin sebagai pusat ekonomi di Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel.

Dalam mewujudkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan PAD untuk dapat membiayai belanjanya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan pengenaan opsen yang ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel dalam pemungutan PKB, BBNKB, pengenaan pajak alat berat serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang bertujuan untuk mengoptimalkan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tanpa menambah beban maksimum yang dapat ditanggung wajib pajak. Dengan tercapainya PAD yang optimal, maka diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan/TKD) dan dapat berupa transfer antar daerah. Pendapatan transfer di Kalimantan Selatan jika dilihat perkembangannya, memiliki tren yang fluktuatif, terutama pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat berupa transfer ke daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

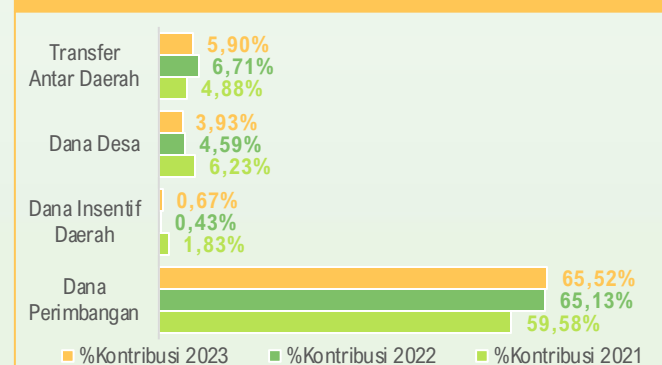
Tabel 3.11 Nominal Komponen Pendapatan Transfer

Komponen Pendapatan Transfer	Miliar Rp		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Dana Perimbangan	14.495,68	20.212,85	24.690,23
Dana Insentif Daerah	445,83	134,47	253,19
Dana Desa	1.515,41	1.424,73	1.479,78
Transfer Antar Daerah	1.186,90	2.081,36	2.221,88

Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

Komposisi pendapatan APBD lingkup Kalimantan Selatan paling tinggi dikontribusikan oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan transfer, menjadi kontributor utama total pendapatan APBD seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik 3.24 Komposisi Pendapatan Transfer

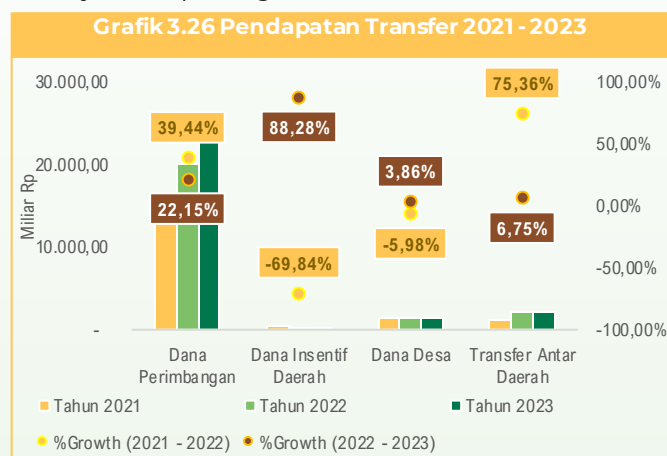


Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

Dana perimbangan dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung daerah dalam mendanai dan membiayai kebutuhan daerah serta bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dalam praktiknya, terutama berupa dana perimbangan yang tidak ditentukan peruntukannya, menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar daerah dalam membiayai belanjanya. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pemda di Kalsel dalam mendanai kegiatannya sendiri dengan bersumber dari PAD.

Berdasarkan perkembangan kontribusinya, dana perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID) mengalami kenaikan kontribusi yang disebabkan meningkatnya jumlah dana perimbangan dan DID yang diterima pemda dengan peningkatan masing-masing sebesar 0,38% dan 0,24% dari tahun 2022. Hal ini sejalan dengan peningkatan dan penurunan nominal

komponen pendapatan transfer seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut ini.



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

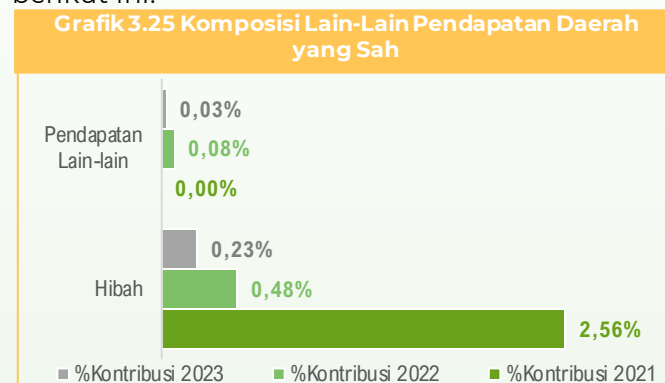
Pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi dan diterima pemda di lingkup Kalimantan Selatan sebesar Rp26.423,20 miliar atau meningkat 21,35% atau senilai Rp4.651,14 miliar. Sementara itu, transfer antar daerah telah terealisasi sebesar Rp2.221,88 miliar dengan peningkatan sebesar 6,75% atau Rp140,52 miliar. Pada tahun 2023 ini seluruh komponen pendapatan transfer mengalami kenaikan dari tahun 2022.

Berdasarkan persentasenya, kenaikan tertinggi berasal dari DID yang meningkat 88,28% atau Rp118,72 miliar. Kenaikan ini berkaitan dengan meningkatnya alokasi DID atas kinerja pemerintah di Kalimantan Selatan. Selain itu, berdasarkan nominalnya, dana perimbangan memiliki pertumbuhan paling tinggi yaitu 22,15% atau senilai Rp4.477,38 miliar. Peningkatan pada dana perimbangan ini seiring dengan meningkatnya alokasi pada Dana Bagi Hasil (DBH) akibat adanya penyaluran kekurangan DBH tahun 2021 dan 2022.

3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS)

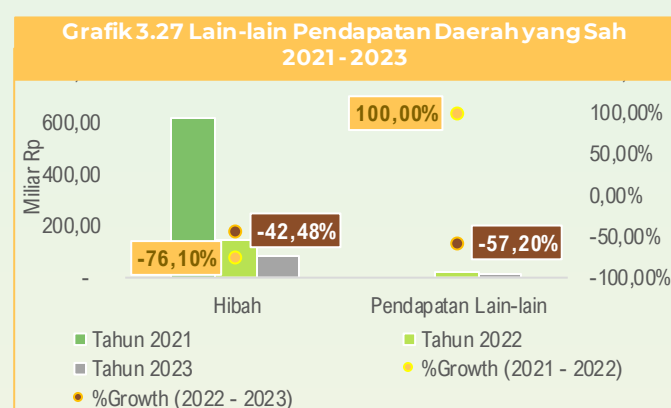
LLPDyS merupakan pendapatan daerah selain dari PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pendapatan ini memiliki porsi yang paling kecil pada pendapatan APBD dibanding dua jenis pendapatan sebelumnya. Pada tahun 2023 ini, komponen LLPDyS di Kalimantan Selatan

didominasi oleh pendapatan yang berasal dari hibah seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut ini.



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

Komponen hibah yang mendominasi PAD pada tahun 2023 ini mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,25%. Kondisi ini juga terjadi pada komponen pendapatan lain-lain yang mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,05%. Penurunan yang terjadi ini disebabkan oleh turunnya nominal penerimaan dari hibah dan pendapatan lain-lain pada tahun 2023 seperti yang ditunjukkan grafik berikut.



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

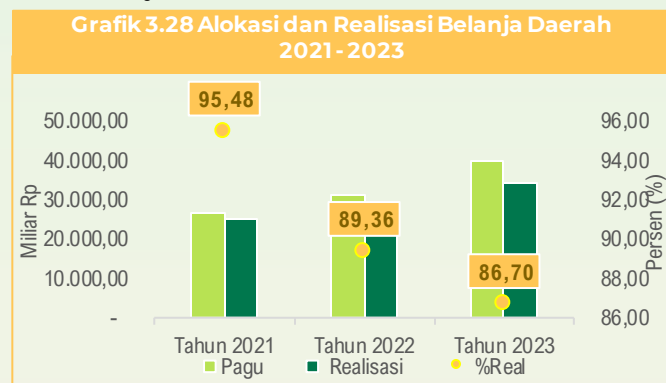
Penerimaan yang berasal dari komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2023 ini secara keseluruhan telah mencapai Rp96,23 miliar dan menurun 44,60% atau senilai Rp77,48 miliar dari tahun 2022. Pada tahun 2023, pendapatan hibah yang terkumpul mencapai Rp85,52 miliar dan pendapatan lain-lain mencapai Rp10,71 miliar.

Pada tahun 2023 ini seluruh komponen LLPDyS mengalami penurunan dari tahun 2022. Berdasarkan persentasenya, penurunan tertinggi berasal dari pendapatan lain-lain yang berkontraksi sebesar Rp14,31 miliar. Sementara

itu, jika berdasarkan nominalnya, penurunan tertinggi berasal dari pendapatan hibah yang menurun hingga Rp63,16 miliar. Kontraksi pendapatan hibah paling tinggi berada pada hibah dari pemerintah pusat yang turun hingga Rp33,78 miliar dan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri yang menurun sebesar Rp14,91 miliar. Pada jenis pendapatan ini, komponen pendapatan hibah mengalami penurunan paling besar dari tahun lalu karena jenis pendapatan hibah yang bersifat insidentil sehingga dapat turun/naik secara signifikan.

3.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.



Sumber: LRA Pemda, GFS, ALCo (diolah)

Pada tahun 2023, capaian realisasi belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan telah terealisasi sebesar Rp34.395,48 miliar atau 86,70%

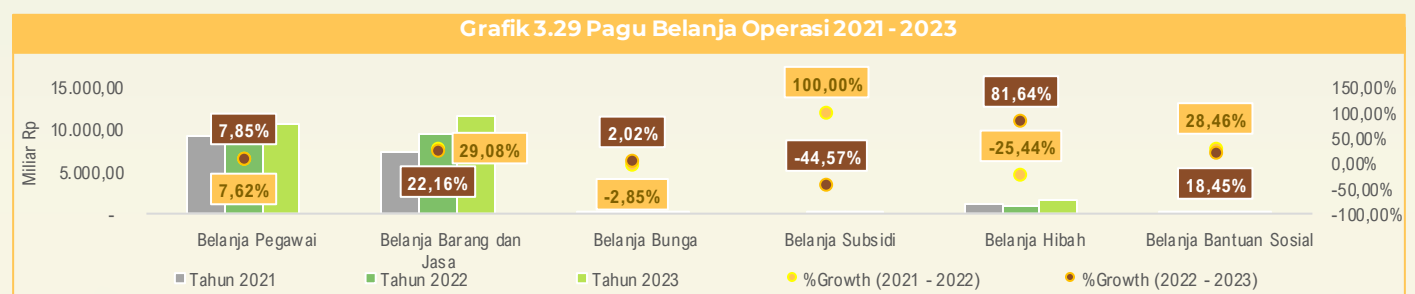
dari pagu yang telah ditetapkan. Kinerja belanja APBD ini dari sisi jumlah realisasi meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu naik hingga 23,05% atau senilai Rp6.444,03 miliar, namun jika dilihat dari sisi capaian terhadap pagu, kinerja realisasi belanja daerah hingga akhir tahun 2023 ini masih belum maksimal dan menunjukkan tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Belum maksimalnya capaian belanja ini kemudian menyebabkan sisa anggaran pada pagu yang telah ditentukan, sehingga mengurangi manfaat dari anggaran tersebut dalam rangka mengakselerasi tumbuhnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja APBD di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir tahun 2023 jika dilihat dari komposisinya masih didominasi oleh belanja operasi yang berkontribusi hingga 60,52% dari total belanja APBD, sedangkan sisanya berasal dari belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Jika dilihat berdasarkan komponennya, belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang utamanya digunakan untuk membiayai kompensasi kepada pegawai dan memenuhi keperluan sehari-hari menjadi komponen yang paling tinggi realisasi belanjanya pada tahun 2023 ini. Besarnya kontribusi jenis belanja ini perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan. Pasalnya, pemerintah daerah harusnya mampu mengalokasikan lebih besar belanja produktif yang berkaitan langsung dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak dalam jangka panjang agar mampu mengakselerasi pencapaian tujuan daerah.

2.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja

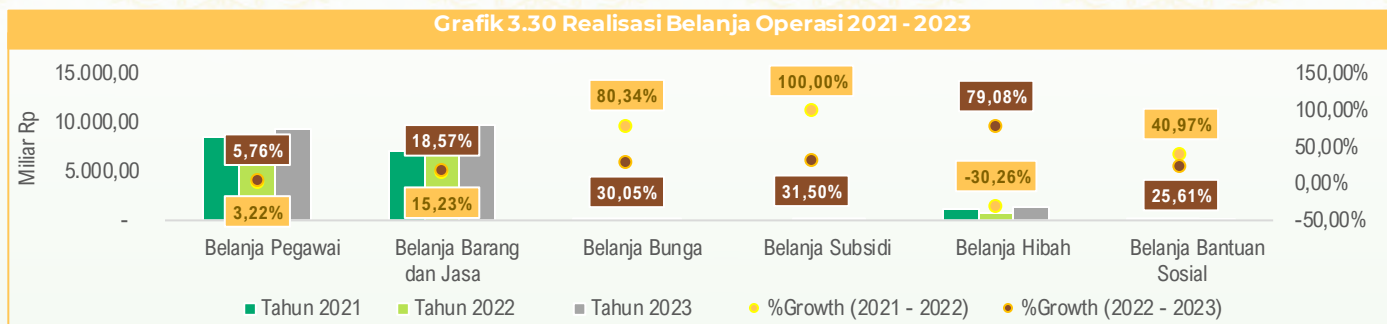
2.2.2.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja untuk memenuhi kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dan memberi manfaat dalam jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja



Sumber: LRA Pemda, GFS, ALCo (diolah)

Grafik 3.30 Realisasi Belanja Operasi 2021 - 2023



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Jika dilihat perkembangannya, masing-masing komponen belanja operasi memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun, terkecuali belanja hibah.

Pada tahun 2023, secara keseluruhan belanja operasi telah terealisasi sebesar Rp20.816,74 miliar yang meningkat sebesar 15,04% atau senilai Rp2.721,54 miliar dari tahun 2022. Pada tahun 2023 ini, seluruh komponen belanja operasi mengalami peningkatan realisasi dibanding tahun 2022. Berdasarkan nominal kenaikannya, pada tahun 2023 ini komponen belanja barang dan jasa memiliki pertumbuhan paling tinggi dibanding tahun 2022 yaitu naik hingga Rp1.542,16 miliar. Kenaikan pada belanja barang ini utamanya disumbangkan oleh kenaikan belanja bahan pakai habis yang meningkat Rp770,58 miliar dari tahun lalu.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan persentase kenaikannya, belanja hibah memiliki kenaikan yang paling tinggi yaitu mencapai 79,08%. Peningkatan pada belanja hibah utamanya dikontribusikan dari realisasi pada komponen belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang meningkat Rp368,81 miliar dan hibah kepada pemerintah pusat yang naik sebesar Rp281,98 miliar dibanding tahun 2022. Peningkatan pada seluruh komponen belanja operasi ini sejalan dengan meningkatnya pagu pada seluruh komponen belanja pada tahun 2023 yang kemudian mendorong realisasi lebih tinggi dari tahun 2022.

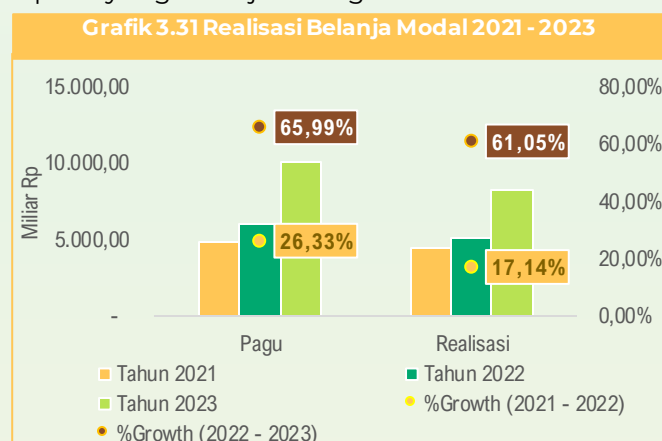
Belanja APBD secara keseluruhan pada tahun 2023 ini masih didominasi oleh belanja pegawai (27,11% dari total belanja APBD) serta belanja barang dan jasa (28,63% dari total belanja APBD), sehingga belanja daerah yang direalisasikan masih belum difokuskan untuk pembangunan daerah secara langsung. Sampai

dengan akhir tahun 2023, belanja pegawai serta belanja barang dan jasa masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp507,70 miliar dan Rp1.542,16 miliar dari tahun 2022.

2.2.2.1.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal oleh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang ditunjukkan grafik berikut.

Grafik 3.31 Realisasi Belanja Modal 2021 - 2023



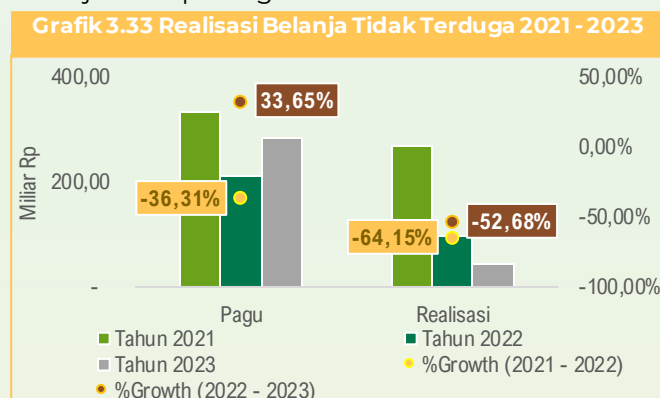
Sumber: LRA Pemda, GFS, ALCo (diolah)

Pada tahun 2023, belanja modal telah terealisasi hingga Rp8.301,90 miliar atau 82,62% dari pagu. Realisasi ini meningkat 61,05% atau Rp3.146,92 miliar dari tahun 2022. Peningkatan realisasi belanja modal ini sejalan dengan naiknya pagu belanja modal pada tahun 2023 ini. Jika dilihat berdasarkan kenaikan nominalnya, pada tahun 2023 ini komponen belanja modal yang mengalami peningkatan tertinggi adalah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang meningkat hingga Rp1.461,61 miliar. Belanja modal pengadaan jalan yang membutuhkan dana cukup besar menjadi kontributor utama komponen jenis belanja tersebut, sehingga nominal kenaikannya juga cukup besar.

Walaupun realisasi belanja modal pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan, namun jika dilihat berdasarkan kinerja persentase hingga akhir tahun, capaian belanja modal pada tahun 2023 ini (86,67% dari pagu) masih lebih rendah dari capaian tahun 2022 (88,74% dari pagu). Penyerapan belanja modal yang masih belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah daerah perlu menjadi perhatian oleh seluruh pihak, terutama untuk mewujudkan akselerasi pembangunan infrastruktur yang kemudian akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

2.2.2.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan tren realisasinya, jenis belanja ini memiliki tren yang cenderung menurun tiap tahunnya seperti yang ditunjukkan pada grafik.

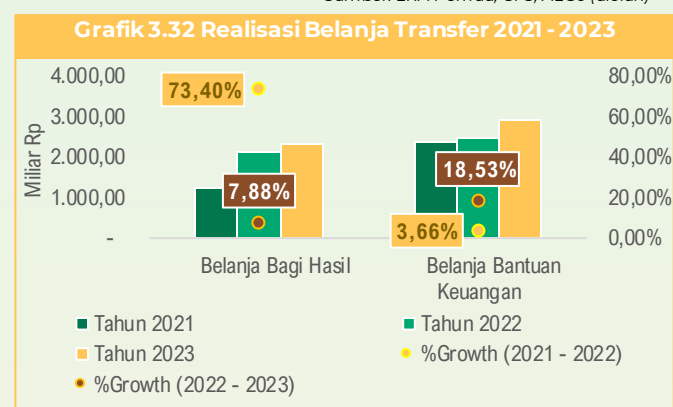
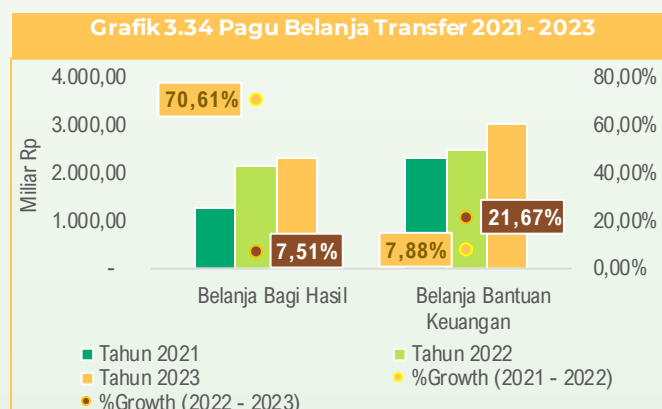


Belanja Tidak Terduga (BTT) pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp45,44 miliar atau 16,03% dari pagu yang ditentukan. Kinerja realisasi ini berkontraksi 52,68% atau Rp50,58 miliar dari tahun 2022. Pada periode ini, pagu yang dialokasikan untuk BTT lebih tinggi dari tahun 2022, sedangkan realisasinya lebih rendah dari tahun lalu yang kemudian menyebabkan capaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya (45,27% dari pagu tahun 2022). Kontraksinya kinerja BTT di satu sisi menunjukkan hal yang positif karena menandakan bahwa pada tahun 2023 ini kondisi berupa keperluan mendesak yang kemudian mengharuskan penggunaan dana BTT cukup minim dari tahun sebelumnya,

walaupun di sisi lainnya kondisi ini menyebabkan kinerja BTT lebih rendah dari capaian tahun 2022.

2.2.2.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Tren pagu maupun realisasi belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang ditunjukkan pada grafik.



Belanja transfer secara keseluruhan telah terealisasi sebesar Rp5.231,42 miliar atau 98,30% dari pagu. Jenis belanja ini mampu tumbuh 13,60% atau Rp608,12 miliar dari tahun 2022. Peningkatan ini merupakan dampak dari meningkatnya pagu maupun realisasi belanja dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan pada tahun 2023. Berdasarkan nominal peningkatannya, belanja bantuan keuangan memiliki kenaikan tertinggi yaitu mencapai Rp458,18 miliar yang utamanya disumbangkan oleh peningkatan pada transfer bantuan keuangan ke desa yang meningkat

hingga Rp458,20 miliar. Peningkatan kinerja pada jenis belanja ini menunjukkan semakin besarnya alokasi yang diberikan suatu Pemda dalam rangka memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada desa untuk mendukung percepatan pembangunan desa di lingkup Kalimantan Selatan. Sementara itu, belanja bagi hasil juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp167,96 miliar, yang banyak dikontribusikan dari transfer bagi hasil ke desa, berupa transfer bagi hasil pajak daerah yaitu sebesar Rp165,45 miliar.

2.2.2.2 Berdasarkan Fungsi

Pelaksanaan belanja daerah di Kalimantan Selatan dapat diklasifikasikan menjadi sembilan fungsi. Pada tahun 2023, seluruh fungsi mengalami kenaikan dari tahun lalu seperti yang ditampilkan pada grafik berikut.

Tabel 3.12 Belanja per Fungsi Tahun 2021 - 2023

Belanja per Fungsi	Realisasi (Miliar Rp)			Trendline	Growth (2021 - 2022)	Growth (2022 - 2023)
	Tahun					
	2021	2022	2023			
Pelayanan Umum	5.909,73	8.570,97	10.136,86		45,03%	18,27%
Pertahanan	-	-	-		0,00%	0,00%
Ketertiban dan Keamanan	374,12	412,53	929,23		10,27%	125,25%
Ekonomi	1.638,45	2.054,62	2.614,32		25,40%	27,24%
Lingkungan Hidup	508,54	496,43	694,05		-2,38%	39,81%
Perumahan dan Fasilitas Umum	3.469,29	4.093,47	6.952,62		17,99%	69,85%
Kesehatan	4.882,63	5.076,38	5.238,44		3,97%	3,19%
Pariwisata dan Budaya	106,53	157,59	221,54		47,93%	40,58%
Agama	-	-	-		0,00%	0,00%
Pendidikan	6.707,67	6.624,50	7.049,64		-1,24%	6,42%
Perlindungan Sosial	367,05	464,96	558,79		26,68%	20,18%

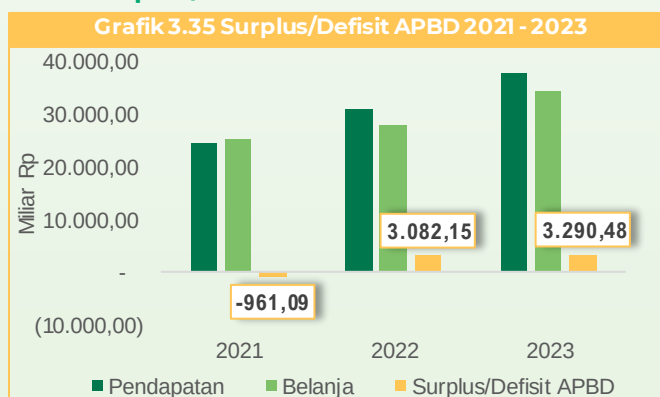
Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

Pada tahun 2023, belanja per fungsi didominasi oleh fungsi pelayanan umum yang berkontribusi sebesar 29,47% dari total belanja APBD. Tingginya komposisi belanja fungsi pelayanan umum menunjukkan komitmen pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui belanja yang direalisasikan pada jenis belanja fungsi pelayanan umum. Jika dilihat berdasarkan peningkatan nominal pada masing-masing fungsi di tahun 2023, peningkatan terbesar dimiliki oleh belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum yang meningkat hingga Rp2.859,15 miliar dari tahun 2022. Jumlah ini sejalan dengan meningkatnya kinerja belanja modal pada tahun 2023. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan kenaikan persentasenya, belanja fungsi ketertiban dan keamanan

memiliki kenaikan tertinggi yaitu hingga 125,25% dari tahun 2022.

Belanja fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan di Kalimantan Selatan masing-masing memiliki porsi 15,23% dan 20,50% dari total belanja APBD. Proporsi ini menunjukkan secara agregat, pemerintah di Kalimantan Selatan telah mampu merealisasikan belanja wajibnya untuk pembangunan manusia. Selain itu, kinerja belanja fungsi ini juga menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mendukung pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Selatan.

3.2.3 Surplus/ Defisit APBD



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

Surplus/Defisit APBD merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Pada tahun 2023, APBD di Kalimantan Selatan mengalami surplus Rp3.290,48 miliar. Nilai surplus ini mengalami peningkatan dari tahun 2022, yaitu naik sebesar 6,76% atau senilai Rp208,33 miliar. Peningkatan pada surplus ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan kinerja pendapatan yang lebih tinggi dari kinerja belanja, sehingga surplus yang dihasilkan juga semakin besar. Keadaan surplus pada tahun 2023 ini menggambarkan belum maksimalnya penyerapan belanja yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Kondisi surplus ini kemudian jika tidak dimaksimalkan penggunaannya maka akan menyebabkan *idle cash*. Oleh karena itu, diharapkan pemda di Kalimantan Selatan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran agar mampu mengakselerasi pembangunan manusia, ekonomi, dan kesejahteraan

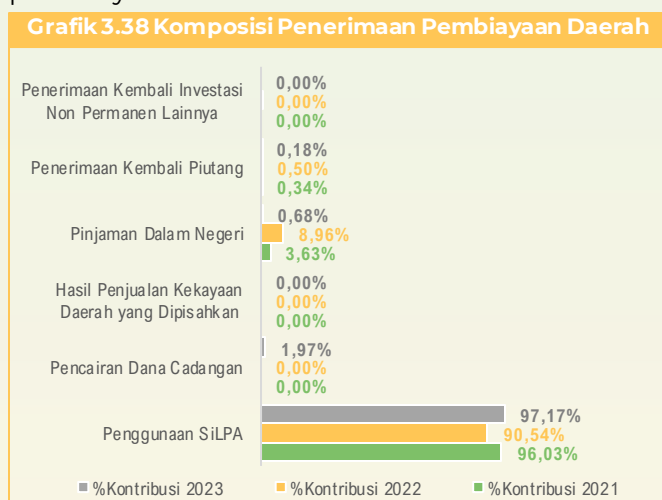
masyarakat sesuai dengan tujuan daerah Kalimantan Selatan untuk ke depannya.

3.2.4 Pembiayaan Daerah



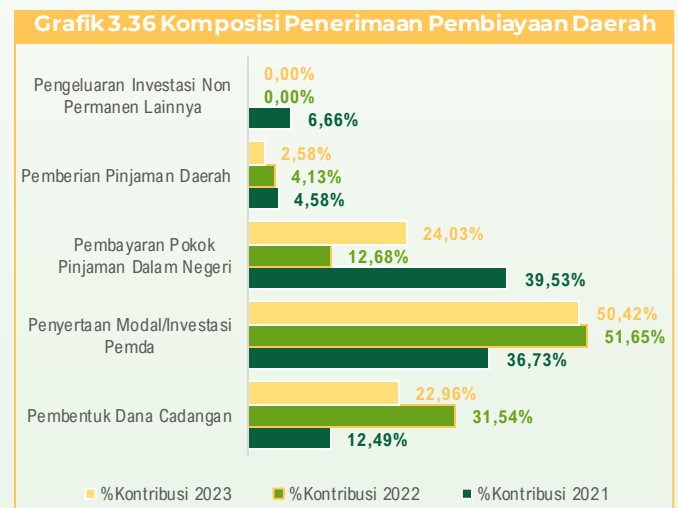
Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

Pembiayaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2023, pembiayaan daerah secara agregat di Kalimantan Selatan mencapai Rp4.115,99 miliar dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp4.812,92 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp696,93 miliar. Secara keseluruhan, pembiayaan di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan hingga 66,64% atau senilai Rp1.645,96 miliar. Peningkatan pada tahun 2023 ini disebabkan naiknya penerimaan pembiayaan yang diterima Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan. Walaupun pengeluaran pembiayaan pada periode ini juga turut meningkat, namun tidak sebanding dengan kenaikan pada penerimaan pembiayaan.



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

Pada tahun 2023 ini, kontributor utama penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan SiLPA yang mendominasi hingga 97,17% dari total penerimaan pembiayaan. Proporsi ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 seiring dengan meningkatnya penerimaan pembiayaan dari sisi penggunaan SiLPA pada tahun 2022.



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

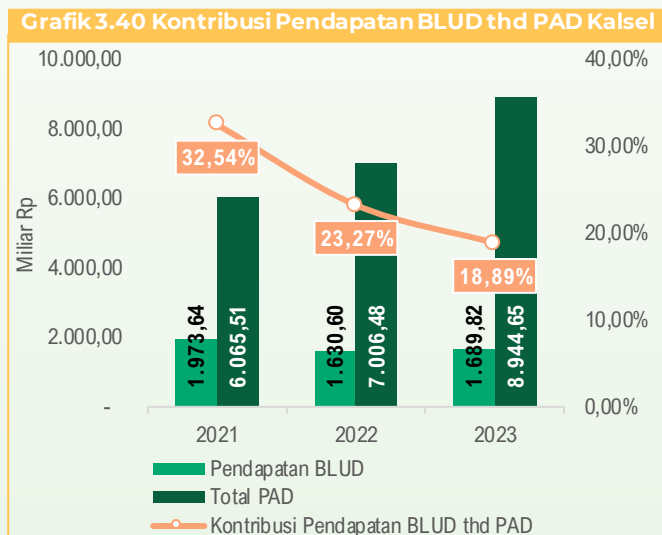
Komponen pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2023 paling besar disumbang oleh penyertaan modal/investasi pemda yang berkontribusi 50,42% dari total pengeluaran pembiayaan. Proporsi pada komponen ini menurun dibandingkan tahun 2022, walaupun jika dilihat secara nominal, komponen penyertaan modal ini mengalami peningkatan dari tahun lalu.

3.2.5 Perkembangan BLU Daerah

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 137 unit kerja BLUD, yang terdiri dari BLUD rumpun kesehatan sebesar 91%, jasa lainnya 7%, pendidikan 1%, dan pengelola kawasan 1%. Selain itu, BLUD tersebut juga telah digolongkan berdasarkan pendapatan dan berdasarkan aset. Pada tahun 2023, berdasarkan pendapatan terdapat 90 BLUD Kecil (Pendapatan < 1 M), 37 BLUD Sedang (Pendapatan 1 M > x > 50 M), serta 10 BLUD Besar (Pendapatan > 50 M). Berdasarkan asetnya, terdapat 92 BLUD Kecil (Total aset < 50 M), 33

BLUD Sedang (Total aset 5 M>x>100 M), serta 12 BLUD Besar (Total aset>100 M).

Dalam menerapkan pola keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sejumlah BLUD di Kalimantan Selatan mencatatkan pendapatan secara agregat sebagai berikut.



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

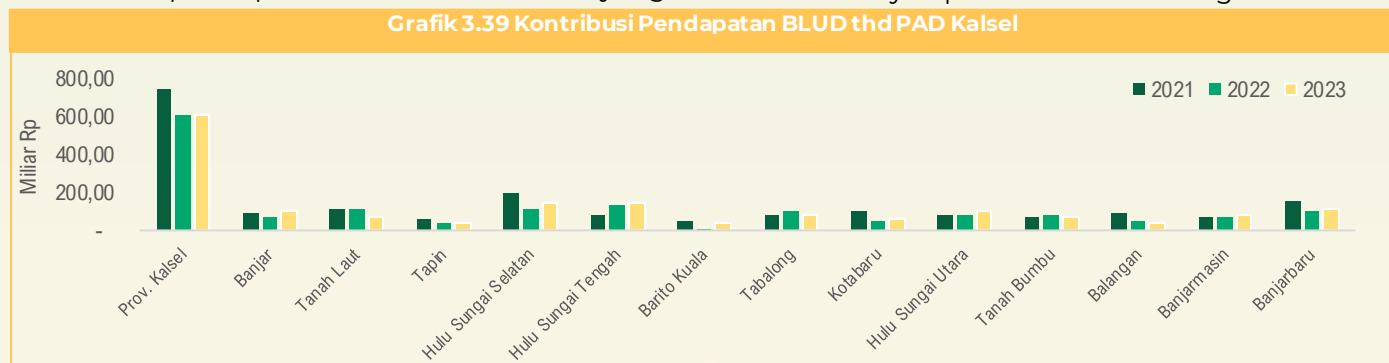
Pendapatan BLUD di Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun memiliki jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2023, pendapatan BLUD mengalami peningkatan hingga sebesar Rp59,22 miliar dari tahun 2022. Peningkatan pendapatan BLUD ini sejalan dengan meningkatnya total PAD secara keseluruhan seperti yang ditampilkan pada grafik. Walaupun mengalami kenaikan dari sisi nominalnya, pendapatan BLUD ini mengalami penurunan proporsi terhadap total PAD yang dikarenakan peningkatan total PAD lebih tinggi dan tidak sebanding dengan peningkatan pada pendapatan BLUD. Walaupun demikian, capaian pendapatan BLUD yang sebesar 18,89% dari total PAD merupakan salah satu komponen PAD yang menyumbang andil terbesar setelah pajak daerah. Berdasarkan kontribusi pendapatan BLUD tersebut yang

diiringi semakin bertambahnya jumlah BLUD di Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan BLUD berpotensi untuk didorong menjadi lebih mandiri.

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, pendapatan BLUD pada tahun 2023 ini didominasi oleh pendapatan BLUD yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan, jumlah BLUD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan lebih banyak dari pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, sehingga juga menyumbangkan pendapatan BLUD yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil survei dan asistensi terhadap BLUD yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui kendala/permasalahan dalam pengelolaan keuangan BLUD di Kalimantan Selatan yang di antaranya sebagai berikut:

1. Beberapa Peraturan Daerah tentang pelaksanaan fleksibilitas BLUD belum disahkan, sehingga menghambat operasional BLUD dalam melakukan pengadaan barang/jasa, yang kemudian masih berpedoman pada Perpres 16 Tahun 2018 seperti pada unit kerja SKPD pada umumnya.
2. Aplikasi e-BLUD yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri belum secara optimal dimanfaatkan oleh unit BLUD.
3. Masih terdapatnya pelaporan akuntansi BLUD yang menggunakan pencatatan manual dalam pelaporannya yang disebabkan belum adanya aplikasi pelaporan yang bisa diakses dengan mudah dan tanpa biaya.
4. Kurangnya SDM BLUD dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan menjadi kendala bagi BLUD, misalnya pada BLUD bidang kesehatan,



Sumber: LRA Pemda, GFS (diolah)

jabatan bendahara seringkali dirangkap oleh petugas kesehatan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama memenuhi kapasitasnya sebagai pengelola keuangan.

3.2.6 Isu Pelaksanaan APBD

Dalam pelaksanaan APBD di Kalimantan Selatan, diketahui pendapatan daerah telah mencapai 108,21% dari target yang ditentukan dan belanja daerah yang telah terealisasi sebesar 86,70% dari pagu. Kinerja pendapatan dan belanja APBD yang cukup baik pada tahun 2023 ini kemudian masih dihadapkan dengan kendala dan tantangan yang di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tingkat kemandirian fiskal di Kalimantan Selatan masih belum optimal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh masih belum mencukupi untuk membiayai sepenuhnya belanja daerah, sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
- 2) Proporsi belanja operasi (penunjang) yang mendominasi belanja APBD membuat masih belum optimalnya akselerasi pembangunan di Kalimantan Selatan dengan realisasi belanja produktif.
- 3) Penyerapan APBD yang masih lambat, terutama untuk belanja modal capaiannya masih belum maksimal hingga akhir tahun.

Dalam mengatasi kendala atau permasalahan tersebut Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perlunya langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan PAD dengan memanfaatkan digitalisasi dan peluang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sehingga dapat meningkatkan taraf kemandirian daerah.
- 2) Pemda dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) melimpah perlu memberikan prioritas dalam penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang dapat memicu kegiatan ekonomi baru dan menggali sektor-sektor produktif karena daerah tidak selamanya bisa bergantung dari SDA.

- 3) Dalam rangka meningkatkan *size* ekonomi di daerah, khususnya bagi Pemda yang penerimaan daerah dan potensi SDA kecil, Pemda perlu meningkatkan kualitas dan mengarahkan belanja pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan daya ungkit yang cukup besar bagi peningkatan aktivitas ekonomi di daerahnya antara lain: (1) pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, (2) peningkatan SDM, dan (3) promosi dan pengembangan potensi daerah agar dapat menarik orang untuk berkunjung atau tinggal di daerah tersebut sehingga dapat memberikan tambahan dalam pertumbuhan aktivitas ekonomi di daerah. Dengan meningkatnya *size* ekonomi akan meningkatkan penerimaan daerah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian fiskal.
- 4) Perlunya pemanfaatan elektronifikasi *office* dengan lebih maksimal dalam operasional pelaksanaan sehari-hari, sehingga dapat mengurangi pekerjaan yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh TI dan mewujudkan efisiensi termasuk penurunan belanja operasi.
- 5) Diperlukannya perbaikan tata kelola keuangan daerah untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD, khususnya dalam pengelolaan kontrak di awal tahun untuk mendorong realisasi dan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.
- 6) Pemerintah daerah perlu mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan belanja khususnya belanja modal dengan melaksanakan kontrak pra DIPA melalui mekanisme lelang dini (sebelum TA berjalan).

3.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Pelaksanaan anggaran konsolidasian antara APBN dan APBD di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 menunjukkan capaian yang positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besaran ini juga menunjukkan perkembangan ekonomi yang semakin membaik di Kalimantan Selatan didorong oleh stimulus fiskal dari pemerintah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

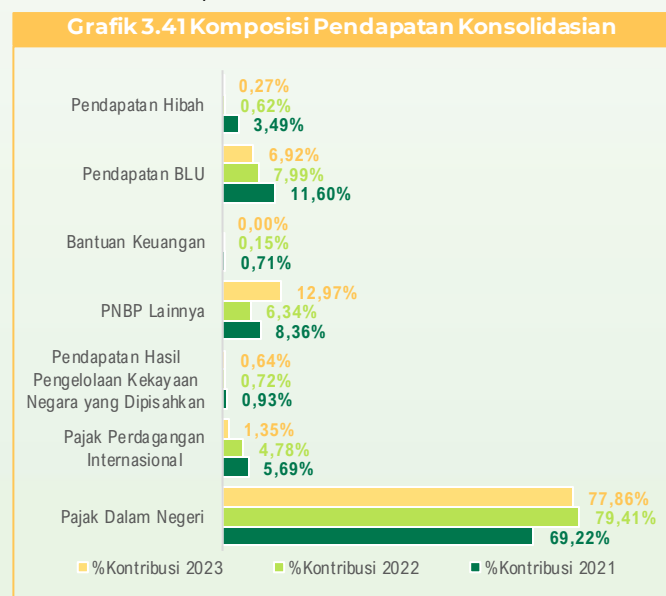
**Tabel 3.13 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan**

No	Uraian	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2023 (Preliminary)	Growth (%) (2021 - 2022)	Growth (%) (2022 - 2023)
A	Pendapatan Negara dan Hibah	17.832,05	24.113,68	31.609,34	35,23	31,08
A.1	Pendapatan Perpajakan	13.358,66	20.299,99	25.035,47	51,96	23,33
1	Pajak Dalam Negeri	12.343,34	19.148,49	24.609,61	55,13	28,52
2	Pajak Perdagangan Internasional	1.015,32	1.151,50	425,86	13,41	(63,02)
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.851,22	3.665,01	6.488,36	(4,84)	77,04
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	165,59	173,22	202,61	4,61	16,97
2	PNBP Lainnya	1.491,17	1.529,10	4.099,02	2,54	168,07
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
4	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
5	Bantuan Keuangan	126,05	35,17	-	(72,10)	(100,00)
6	Pendapatan BLU	2.068,41	1.927,53	2.186,73	(6,81)	13,45
A.3	Hibah	622,16	148,68	85,52	(76,10)	(42,48)
1	Pendapatan Hibah	622,16	148,68	85,52	(76,10)	(42,48)
B	Belanja dan Transfer Pemerintah	34.062,53	38.061,97	46.058,24	11,74	21,01
B.1	Belanja Pempus/Pemda	30.973,60	31.444,27	37.851,82	1,52	20,38
1	Belanja Pegawai	12.111,27	12.376,88	12.929,19	2,19	4,46
2	Belanja Barang dan Jasa	10.250,11	11.132,99	13.538,24	-	-
3	Belanja Modal	7.075,17	6.855,68	9.681,51	(3,10)	41,22
4	Pembayaran Bunga Utang	9,24	16,66	21,67	-	-
5	Belanja Subsidi	-	1,06	1,40	100,00	31,50
6	Hibah	1.132,19	789,55	1.413,90	-	-
7	Belanja Bantuan Sosial	127,83	175,43	220,48	37,24	25,68
8	Belanja Lain-Lain (Belanja Tak Terduga)	267,80	96,01	45,44	-	-
B.2	Transfer- Transfer Antar Pemda	3.088,93	6.617,70	8.206,43	114,24	24,01
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	46,51	51,04	78,49	9,74	53,76
2	Transfer Bantuan Keuangan	2.383,51	2.472,86	2.931,04	-	-
3	Transfer Pempus ke Pemda dan Dana Desa	658,90	4.093,79	5.196,90	521,30	26,95
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(16.230,49)	(13.948,28)	(14.448,90)	(14,06)	3,59
D	Pembiayaan	3.629,49	2.470,02	4.115,99	(31,95)	66,64
D.1	Penerimaan Pembiayaan	3.749,54	2.945,61	4.812,92	(21,44)	63,39
1	Penggunaan SILPA TA Sebelumnya	3.600,76	2.667,02	4.676,87	(25,93)	75,36
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	95,00	-	-
3	Hasil Penjualan Keayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Pinjaman Dalam Negeri	136,08	264,01	32,52	94,01	(87,68)
5	Penerimaan Kembali Piutang	12,70	14,59	8,52	-	-
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	0,00	-	100,00	(100,00)
D.2	Pengeluaran Pembiayaan	120,06	475,59	696,93	296,14	46,54
1	Pembentukan Dana Cadangan	15,00	150,00	160,00	900,00	6,67
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	44,10	245,62	351,43	-	-
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	47,46	60,31	167,51	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	5,50	19,66	18,00	257,44	(8,44)
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	8,00	-	-	-	-
E	E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - (D + C)	(12.601,00)	(11.478,26)	(10.332,91)	(8,91)	(9,98)

Sumber: GFS (diolah)

3.3.1 Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Pemerintahan Umum (*General Government Revenue*) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi). Berikut kontribusi masing-masing komponen pendapatan konsolidasian pada tahun 2023.



Sumber: GFS (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya pada tahun 2023, pendapatan konsolidasian di Kalimantan Selatan paling besar dikontribusikan dari pajak dalam negeri yang mencapai 77,86%, PNBP lainnya sebesar 12,97%, serta pendapatan BLU sebesar 6,92% dari total realisasi pendapatan konsolidasian. Di antara seluruh komponen pendapatan konsolidasian, satu-satunya komponen yang mengalami peningkatan persentase kontribusi adalah PNBP lainnya, yaitu

kontribusinya bertambah 6,63%. Sementara itu, di sisi lain kontribusi pajak perdagangan internasional mengalami penurunan terdalam di antara komponen pendapatan konsolidasian lainnya, yaitu turun 3,43% dari kontribusi tahun 2022. Penurunan yang terjadi ini utamanya merupakan dampak dari menurunnya harga komoditas ekspor di Kalsel seperti CPO dibanding tahun lalu.

Pendapatan konsolidasian APBN dan APBD di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mencapai Rp31.609,34 miliar. Jumlah ini meningkat hingga 31,08% atau senilai Rp7.495,66 miliar. Jika dilihat berdasarkan nominalnya, pada tahun 2023 ini pajak dalam negeri meningkat Rp5.461,11 miliar. Hal ini sejalan dengan besarnya kontribusi pajak dalam negeri pada tahun 2023, sehingga kenaikannya juga tergolong besar disertai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang kemudian mendorong pendapatan dari pajak dalam negeri lebih tinggi. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan persentasenya, PNBP lainnya mengalami peningkatan hingga 168,07% atau senilai Rp2.569,92 miliar yang juga sejalan dengan naiknya kontribusi PNBP lainnya pada tahun 2023. Peningkatan pada PNBP ini didominasi oleh pendapatan yang berasal dari Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informasi.

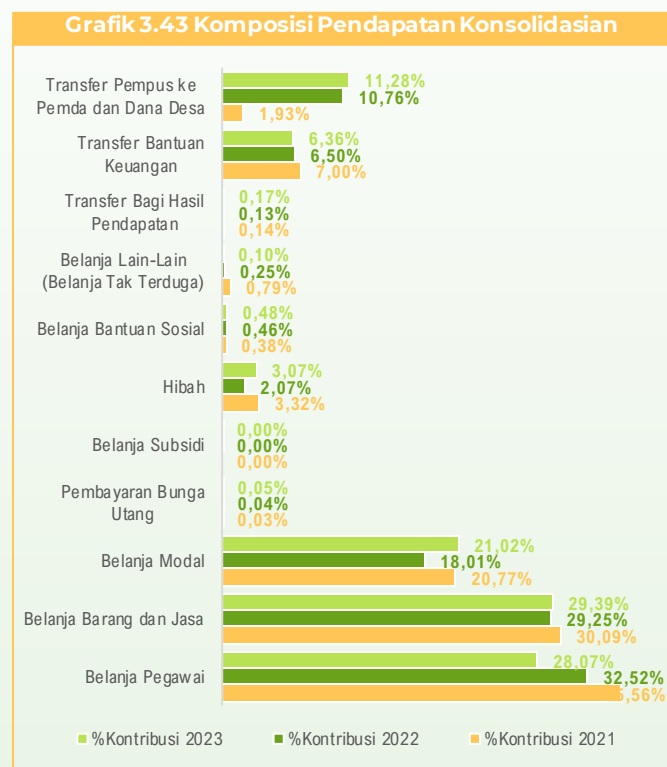
3.3.2 Belanja Konsolidasian

Belanja Pemerintahan Umum (*General Government Spending*) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal



Sumber: GFS (diolah)

(berelasi). Berikut disajikan kontribusi masing-masing pada komponen belanja modal.



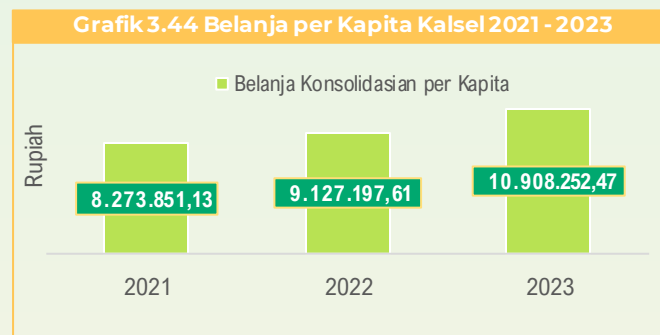
Sumber: GFS (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, komponen belanja barang dan jasa mendominasi hingga 29,39%, kemudian diiringi belanja pegawai serta belanja modal yang masing-masing menyumbang 28,07% dan 21,02% dari total belanja konsolidasi di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023 ini, kenaikan persentase kontribusi paling besar dimiliki oleh belanja modal yang bertambah 3,01% dari tahun 2022. Sementara itu, jenis belanja yang memiliki penurunan persentase kontribusi terdalam adalah belanja pegawai yang berkurang 4,45% dari tahun 2022.

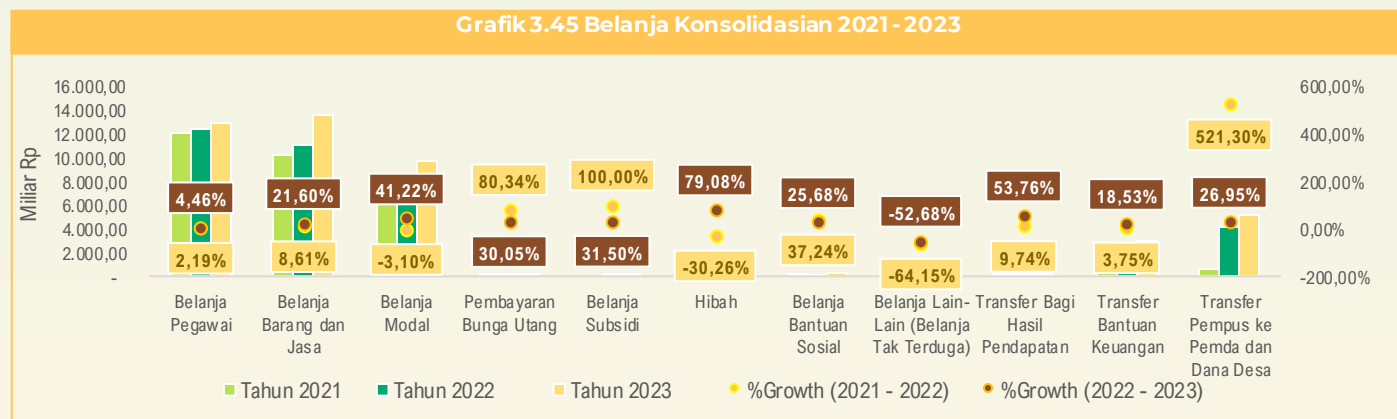
Belanja konsolidasian pada tahun 2023 ini telah terealisasi hingga Rp46,058,24 miliar. Besaran ini mengalami peningkatan hingga 21,01% atau senilai Rp7.996,28 miliar. Jika dilihat berdasarkan nominalnya, komponen belanja konsolidasian yang mengalami peningkatan tertinggi adalah belanja modal, yang pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan hingga Rp2.825,82 miliar. Sementara itu jika dilihat berdasarkan persentase kenaikannya, komponen belanja yang memiliki persentase peningkatan paling tinggi adalah belanja hibah yang naik hingga 79,08% atau senilai Rp624,35 miliar. Belanja hibah yang meningkat pada tahun 2023 ini salah satunya disebabkan meningkatnya belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, komponen belanja konsolidasian yang mengalami penurunan pada tahun 2023 ini berasal dari komponen belanja lain-lain (belanja tak terduga) yang menurun 52,68% atau senilai Rp50,58 miliar dari tahun 2022.

Belanja per Kapita

Belanja per kapita (*spending per citizen*) untuk melihat tingkat pemerataan belanja pemerintah konsolidasi terhadap jumlah penduduk. Berikut belanja konsolidasian per kapita di Kalimantan Selatan.



Sumber: GFS, BPS Kalsel (diolah)



Sumber: GFS (diolah)

Belanja konsolidasian perkapita di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 ini mencapai Rp10.908.252,47. Besaran ini menunjukkan bahwa secara konsolidasian belanja APBN dan APBD di Kalimantan Selatan telah terealisasi senilai itu untuk setiap penduduk di Kalsel pada tahun 2023. Belanja daerah per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini utamanya disebabkan meningkatnya belanja konsolidasian sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk pada periode tersebut.

3.3.3 Surplus/Defisit Konsolidasian



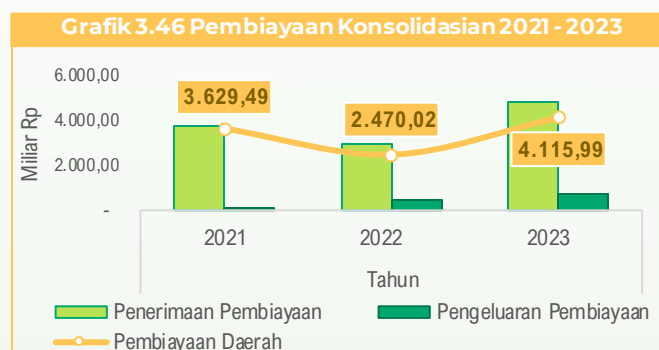
Sumber: GFS (diolah)

Jika dilihat tren perkembangannya, defisit konsolidasian APBN dan APBD di Kalimantan Selatan memiliki tren yang fluktuatif dari tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, defisit konsolidasian mencapai Rp14.448,90 miliar atau meningkat sebesar 3,59% dari tahun 2022. Peningkatan defisit yang terjadi ini disebabkan adanya peningkatan pada sisi belanja yang lebih tinggi dari peningkatan pada sisi pendapatan pada tahun 2023. Peningkatan pada realisasi belanja ini utamanya disebabkan oleh peningkatan pada belanja modal. Walaupun di sisi lain, kinerja pendapatan juga mengalami peningkatan yang utamanya disebabkan oleh pendapatan pajak dalam negeri sebagai dampak meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, besaran pendapatan ini masih lebih rendah dari belanja konsolidasian APBN dan APBD di Kalimantan Selatan sehingga menyebabkan defisit yang semakin melebar.

3.3.4 Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan Konsolidasian adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan konsolidasian terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



Sumber: GFS (diolah)

Pada tahun 2023, pembiayaan konsolidasian APBN dan APBD di Kalimantan Selatan secara agregat di Kalimantan Selatan mencapai Rp4.115,99 miliar dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp4.812,92 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp696,93 miliar. Secara keseluruhan, pembiayaan di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan hingga 66,64% atau senilai Rp1.645,96 miliar. Peningkatan pada tahun 2023 ini disebabkan naiknya penerimaan pembiayaan yang diterima Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan. Walaupun pengeluaran pembiayaan pada periode ini juga turut meningkat, namun tidak sebanding dengan kenaikan pada penerimaan pembiayaan.

Pada tahun 2023 ini, kontributor utama penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan SiLPA yang mendominasi hingga 97,17% dari total penerimaan pembiayaan. Proporsi ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 seiring dengan meningkatnya penerimaan pembiayaan dari sisi penggunaan SiLPA pada tahun 2022. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2023 paling besar disumbang oleh penyertaan modal/investasi pemda yang berkontribusi 50,42% dari total pengeluaran pembiayaan. Proporsi pada komponen ini menurun dibandingkan tahun 2022, walaupun jika dilihat secara nominal, komponen penyertaan modal ini mengalami peningkatan dari tahun lalu.

BAB IV: PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

KAJIAN FISKAL REGIONAL *Kabimantan Sebatan*

1

Pagu RO Harmonis bidang jalan, pendidikan, kesehatan dan KB, bidang pertanian, bidang jalan dan bidang transportasi pedesaan telah terserap secara optimal hingga bulan Desember 2023.

2

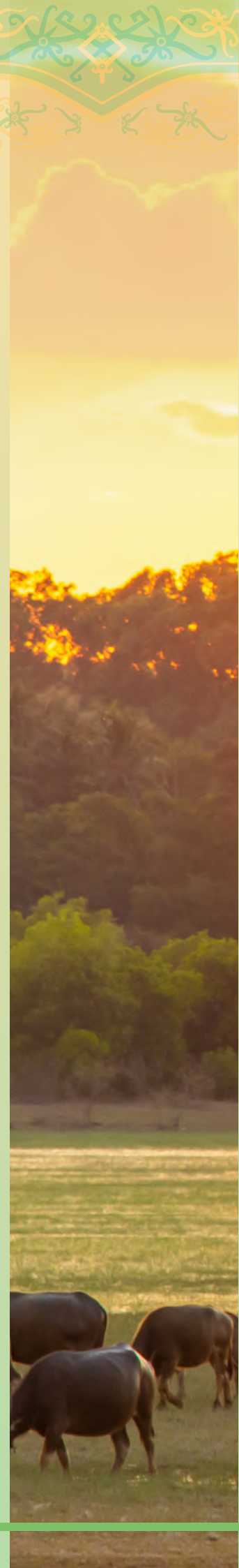
Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan realisasi belanja antara lain kurang optimalnya perencanaan dan proses lelang.

3

RO Harmonis bidang jalan dan bidang transportasi pedesaan dapat menjadi pendorong pengembangan ekonomi daerah.

4

Sebaran RO secara kumulatif di beberapa pemda bidang kesehatan terdapat tantangan terkait kompetensi sumber daya manusia yang harus ditingkatkan.





BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH

4.1 Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 merupakan salah satu instrumen pelaksanaan strategi fiskal. APBN tahun 2023 juga merupakan penjabaran atas tahapan pembangunan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” adalah visi RPJMN 2020-2024.

Pembangunan nasional lima tahunan tersebut selanjutnya diimplementasikan tiap tahun dalam rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema APBN tahun 2023 adalah “Optimis dan Tetap Waspada” di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional yang dihadapkan pada ancaman resesi global dan kenaikan cost of fund yang luar biasa dan tinggi.

Transfer ke daerah atau TKD, adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Implementasi transformasi transfer ke daerah belum sepenuhnya membangkitkan kemandirian daerah. Karakteristik daerah, kondisi geografis, dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor fundamental. Beberapa daerah memiliki rasio kemandirian fiskal tinggi sedangkan sebagian besar lainnya masih tergantung pada transfer pemerintah pusat. Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer ke daerah mengindikasikan PAD belum memiliki peran dominan sebagai lokomotif pembangunan di daerah.

4.1.1 Transfer ke Daerah

TKD menjadi salah satu ruang lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, terdapat jenis dan

kebijakan TKD. Jenis TKD tersebut berupa dan bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Tujuan pemberian DBH adalah mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Efeknya tidak ada kesenjangan antar daerah maupun antara daerah dengan pusat. DBH terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam.

Dana Alokasi Umum atau DAU, yakni bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah. DAU ini dialokasikan per daerah sebesar celah fiskal satu tahun anggaran. Dana tersebut diberikan dengan mempertimbangkan pagu TKD secara keseluruhan, kemampuan keuangan negara, target pembangunan nasional, dan kebutuhan layanan publik untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana Alokasi Khusus, atau DAK, menjadi salah satu jenis dana transfer ke daerah selanjutnya. DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik. Penggunaan DAK telah ditentukan oleh pemerintah. DAK dialokasikan dengan tujuan agar negara mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, agar tidak ada kesenjangan layanan publik, mendorong perekonomian setempat dan operasional layanan publik.

Dana Otonomi Khusus adalah dana bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus. Daerah dengan status otonomi khusus tersebut yakni Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh.

Jenis dana transfer ke daerah berikutnya adalah Dana Keistimewaan. Dana ini adalah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.

Dana desa bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan keadilan dan pemerataan. Perhitungannya pun dilakukan berdasarkan kinerja desa, jumlah penduduk, jumlah desa, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

4.1.2 Harmonisasi Belanja

Harmonisasi antara belanja pemerintah pusat dan daerah, belanja fiskal pusat dan daerah harus harmonis dan sinergi antara kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah. Agar belanja dapat dinikmati oleh rakyat baik dari pemerintah pusat ke daerah maupun belanja daerah itu sendiri perlu dihindari duplikasi dan overlap.

Harmonisasi harus dilakukan di setiap tahapan, mulai dari perencanaan, eksekusinya, sampai pengawasan itu harus dilakukan secara lebih harmonis melalui kolaborasi dan Kerjasama. Program pembangunan pemerintah daerah harus sinkron dengan pembangunan nasional semisal pengurangan kemiskinan yang harus dilakukan bersama-sama antara APBN dan APBD. Memastikan bahwa daerah melakukan hal yang sama dan juga terefleksikan di APBD. Bagaimana memastikan APBD mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bisa mencapai tujuan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi nasional dengan memastikan komponen-komponen APBD sudah sesuai baik jumlahnya maupun lokasinya. Alokasi dari skema APBD itu harus inline atau mendukung prioritas nasional.

4.2 Gambaran Umum Harmonisasi Belanja K/L-DAK Fisik di Tingkat Wilayah

Kinerja terkait harmonisasi dan anggaran belanja K/L yang mendukung DAK Fisik tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan.

4.2.1. Alokasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik

1. Alokasi Anggaran K/L Secara Umum

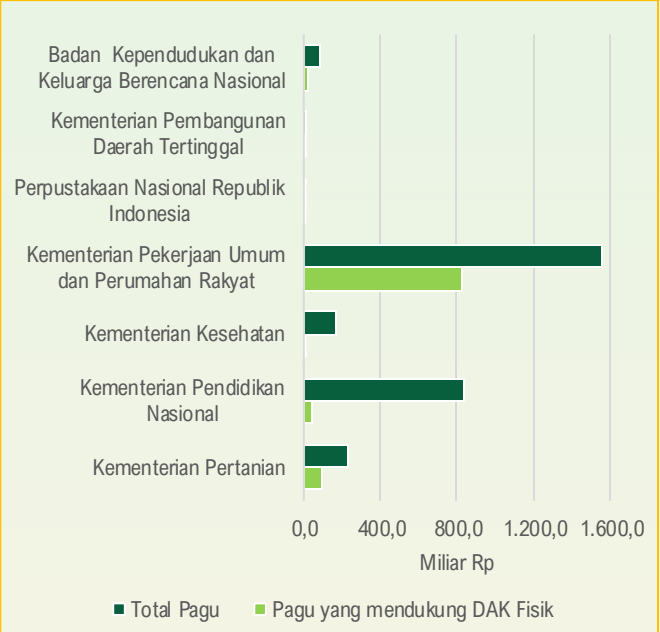
Alokasi Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik sebagai berikut:

Tabel 4.1 Alokasi Anggaran K/L secara Umum

KODE BA	NAMA K/L	PAGU YANG MENDUKUNG DAK FISIK	TOTAL PAGU (Rp)	PORSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
018	Kementerian Pertanian	90.259.046.000	233.423.323.000	38,67%	7	45
023	Kementerian Pendidikan Nasional	40.510.016.134.000	837.923.023.000	4,84%	3	7
024	Kementerian kesehatan	5.006.295.000	169.116.375.000	2,96%	2	17
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	825.625.892.000	1.558.756.505.000	52,97%	4	15
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	340.041.000	340.041.000	100%	1	1
067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	4.977.035.000	14.316.606.953	34,76%	2	2
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	18.568.921.000	84.058.702.000	22,09%	1	20

Sumber: SINTESA (diolah)

Grafik 4.1 Pagu DAK Fisik terhadap Total Pagu



Perbandingan pada tabel tersebut juga disajikan dalam grafik seperti di atas.

2. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik berikut:

Tabel 4.2 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

BIDANG DAK FISIK	SUBBIDANG DAK FISIK	NAMA K/L	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	JUMLAH SATKER	JUMLAH RO
Jalan	Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	696.736.070.000	692.603.903.781	99,41%	3	14
	Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	121.993.332.000	121.992.419.409	99,99%		
Pendidikan	SD dan SMP	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.896.490.000	6.844.844.500	99,25%	1	1
Kesehatan dan KB	Pengendalian Penyakit	Kementerian Kesehatan	1.577.421.000	1.512.569.900	95,89%	1	3
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kementerian Kesehatan	2.273.007.000	2.066.862.745	90,93%	2	7
	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kementerian Kesehatan	1.155.867.000	1.092.246.916	94,50%	1	7
Pendidikan	SD, SMP, SMA, SMK	Kementerian Pendidikan Nasional	39.378.443.000	38.610.490.703	98,05%	3	6
	PAUD	Kementerian Pendidikan Nasional	1.137.691.000	1.104.772.100	97,11%	1	1
Pertanian	Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	Kementerian Pertanian	90.259.046.000	88.134.242.969	97,65%	7	45
Pendidikan	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	340.041.000	325.663.096	95,77%	1	1
Transportasi Pedesaan	Transportasi Pedesaan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Efektivitas di Daerah Afirmasi	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	4.625.429.000	4.624.173.000	99,97%	2	2
Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	18.568.921.000	18.524.286.656	99,76%	1	20

Sumber: SINTESA (diolah)

Analisis perbandingan RO Harmonis dengan total alokasi belanja di tingkat wilayah sebagai berikut:

Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Selatan menerima alokasi DAK Fisik sebesar Rp1.144,09,- dari total pagu TKD sebesar Rp31.832,56,- sebagaimana dalam tabel berikut:

Grafik 4.2 Alokasi Per Bidang RO Harmonis



Sampai akhir Desember 2023 telah terealisasi 99,53% atau Rp.31.682,54,- ke 14 (empat belas) Pemda berikut.

Tabel 4.3 Alokasi dan Realisasi TKD Kalsel

Pemda	Pagu Total Miliar (Rp)	REALISASI S.D. 31 DESEMBER 2023							
		DBH	DAU	DAK Fisik	DAK Non Fisik	HIBAH	DANA Desa	INSENTIF Fiskal	% REAL
KAB BALANGAN	3.153,91	2.529,08	361,85	46,04	82,08	-	112,90	16,17	99,82%
KAB TANAH BUMBU	4.014,04	3.212,75	444,22	64,94	142,81	0,08	122,42	18,61	99,80%
KAB TAPIN	1.782,92	1.101,29	432,45	44,57	102,76	0,03	97,15	-	99,74%
KOTA BANJARBARU	1.065,11	466,55	427,95	28,89	110,00	-	-	28,80	99,73%
KAB BARITO KUALA	1.516,07	526,71	552,68	92,80	178,42	0,06	155,02	5,79	99,70%
KAB KOTA BARU	2.846,98	1.864,92	607,21	49,31	148,79	-	167,21	-	99,67%
KOTA BANGKALAN	1.438,45	452,42	722,32	19,87	203,70	-	-	34,36	99,60%
PROV. KALIMANTAN SELATAN	5.704,09	3.780,99	1.131,61	289,44	422,80	0,07	-	47,06	99,44%
KAB HULU SUNGAI SELATAN	1.401,26	519,25	491,37	104,94	126,19	-	111,42	39,04	99,36%
KAB. BANJAR	2.229,05	918,57	720,93	118,71	228,21	-	222,58	5,67	99,35%
KAB. TABALONG	2.128,01	1.313,26	467,39	47,03	142,83	-	101,08	42,45	99,34%
KAB HULU SUNGAI UTARA	1.392,30	585,20	463,64	49,42	111,82	-	160,34	12,30	99,31%
KAB. TANAH LAUT	1.801,73	929,42	512,11	66,47	166,46	-	112,85	-	99,20%
KAB HULU SUNGAI TENGAH	1.358,63	548,62	495,10	42,45	124,21	0,49	127,02	5,74	98,90%
Jumlah	31.832,56	18.749,03	7.830,84	1.064,87	2.291,09	0,73	1.489,99	255,99	99,53%

Berdasarkan hasil analisis, bidang jalan memiliki alokasi tertinggi sebesar 83,1% yang menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas antar wilayah.

Bidang pertanian memiliki persentase kedua sebesar 9,2% yang menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di tiap daerah.

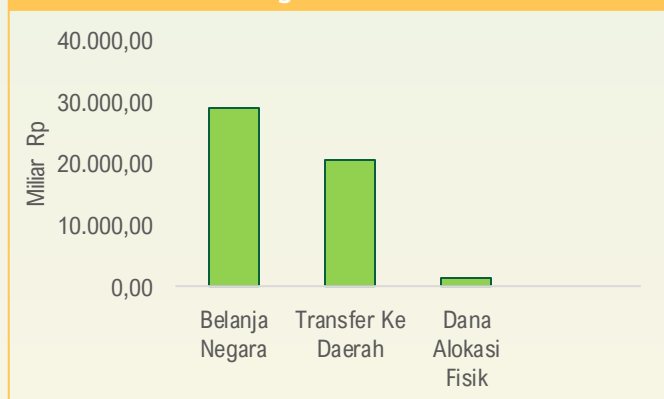
Bidang kesehatan dan keluarga berencana sebesar 2,4% untuk terutama untuk kegiatan penurunan *stunting* di Kalimantan Selatan.

Alokasi sebesar 4,8% untuk Pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Alokasi untuk bidang transportasi pedesaan sebesar 0,5%.

Alokasi DAK Fisik RO Harmonis per bidang dalam grafik berikut:

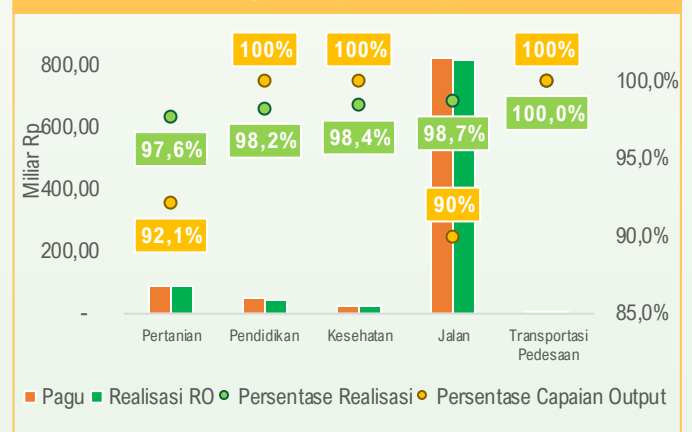
Grafik 4.3 Perbandingan Alokasi DAK Fisik dengan Belanja Negara dan TKD



3. Alokasi Anggaran K/L per Bidang

Kinerja belanja pada RO Harmonis Kementerian/Lembaga di Provinsi Kalimantan Selatan sampai 31 Desember 2023 dapat dilihat dari penyerapan anggaran dan capaian output yang mendukung pelaksanaan kegiatan DAK Fisik. Berikut progress kinerja realisasi dan capaian output harmonis.

Tabel 4.4 Progres Capaian Output Harmonis



a. Bidang Jalan

Arah kebijakan DAK Fisik bidang jalan untuk mendukung konektivitas Daerah yaitu: meningkatkan konektivitas, kualitas dan kapasitas jalan di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) menuju fasilitas-fasilitas pelayanan dasar public, pusat-pusat perekonomian daerah dan simpul transportasi. Selain itu, DAK Fisik bidang jalan juga diperuntukkan mendukung penguatan destinasi pariwisata, mendukung tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi dan mendukung penguatan Kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan dan hewan).

Sasarannya ialah untuk meningkatkan konektivitas, kualitas dan kapasitas jalan pada daerah-daerah yang menjadi prioritas nasional melalui penanganan jalan dan jembatan provinsi, Kabupaten dan kota.

Hingga akhir periode triwulan IV TA 2023, capaian realisasi pelaksanaan pekerjaan jalan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Selatan sebesar 99,50% atau sebesar Rp814.596.323.190,- dari pagu sebesar Rp.814.596.323.190,-. Pelaksanaan pekerjaan jalan dilakukan oleh 3 satker yaitu Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Kalimantan Selatan, Pelaksanaan Jalan nasional wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun progress capaian RO dalam tabel berikut:

Penyelesaian volume pekerjaan terendah RO Preservasi Rutin Jembatan sebesar 32% pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan capaian RO tertinggi sebesar 100% antara lain RO

Tabel 4.5 Progress Capaian RO Bidang Jalan

No	Nama RO	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
1	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	km	314.923.895.000	314.923.895.000	100%	96	89	100%
2	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	m	9.619.223.000	9.619.220.300	100%	113	103	91%
3	Jalan Startegis	km	73.037.886.000	73.037.885.600	100%	6	6	100%
4	Pembangunan Jembatan	m	11.921.384.000	11.150.916.000	94%	84		94%
5	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya)	km	17.273.903.000	17.273.903.000	100%	5	5	100%
6	Penggantian Jembatan	m	24.225.558.000	24.225.558.000	100%	62	62	100%
7	Preservasi Jembatan	m	24.215.583.000	23.913.228.000	83%	1378	1334	83%
8	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	km	22.128.165.000	22.128.165.000	100%	1106	1106	100%
9	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	km	46.714.043.000	46.708.926.492	100%	822	822	100%
10	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	125.535.211.000	122.669.915.289	100%	29	29	100%
11	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (Padat Karya)	km	13.544.239.000	13.364.477.100	97%	6	5	98%
12	Preservasi Rutin Jembatan	m	3.127.359.000	3.127.359.000	100%	2517	795	32%
13	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	m	10.469.621.000	10.460.455.000	99%	11266	7.720	72%

Sumber: SINTESA (diolah)

Capaian realisasi anggaran satker Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 99,98%, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 99,95% dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 99,48%.

Dukungan Penanganan Jalan Daerah, Penggantian Jembatan dan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan. Rendahnya penyelesaian pekerjaan diantaranya karena kurang akuratnya perencanaan dan proses lelang.

b. Bidang Kesehatan dan KB

Arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2023 diantaranya mendukung 8 area reformasi Sistem kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan, penguatan promotive, preventif, dan pemenuhan supply side pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) di puskesmas dan rumah sakit serta alat pelayanan penunjangnya dan mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik serta pemantauan kualitas gizi balita dan ibu hamil. Secara umum tujuan DAK Fisik di bidang kesehatan ialah mendukung daerah dalam penyediaan anggaran pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di daerah untuk mebcapai target prioritas nasional bidang kesehatan.

Sedangkan bidang KB diarahkan untuk meningkatkan kealitas dan akses pelayanan

kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana prasarana dan alata kesehatandi rumah sakit.

Sampai akhir tahun 2023, RO Harmonis K/L untuk bidang Kesehatan dan KB mencapai mencapai 98,39% atau senilai Rp23.195.966.217,- dari total pagu Rp23.575.216.000,- Dari sisi persentasi capaian output, pelaksanaan program-program di bidang Kesehatan dan KB mencapai 100% dari target yang direncanakan. Hal ini dapat diartikan telah terjadi efisiensi dari sisi belanja kegiatan sehingga persentase capaian output lebih besar dari persentase anggaran yang sudah terealisasi. Berikut ini beberapa capaian RO harmonis dari satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tanah Bumbu:

Tabel 4.6 Alokasi Anggaran K/L Bidang Kesehatan dan KB

No	Nama RO	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
1.	Akreditasi Laboratorium	Kelompok	111.496.000	110.380.000	99%	2	2	100%
2.	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	465.000.000	464,735,396	100%	13	13	100%
3.	Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dekonsentrasi) (LR)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	507.332.000	443.404.035	87%	1	1	100%
4.	Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di Daerah (PK)	Provinsi	492,960,000	442,688,710	90%	1	1	100%
5.	Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan	Provinsi	216.436.000	216.101.342	90%	1	1	100%

	dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan							
6.	Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI	Lembaga	216.346.000	215.346.000	100%	348	371	110%
7.	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	Lembaga	4.175.317.000	4.175.258.959	100%	348	348	100%
8.	Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (LR)	Lembaga	2.500.000	2.500.000	100%	82	82	100%
9.	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	Layanan	500.000.000	409.643.422	100%	3	3	100%
10.	Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting	Kelompok Masyarakat	1.361.453.000	1.360.811.587	99%	1,605	1.605	100%
11.	Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok Masyarakat	353.787.000	353.056.043	99%	13	13	100%
12.	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	Keluarga	442.575.000	442.386.900	99%	115,188	115,188	100%
13.	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	Orang	3.875.152.000	3.844.582.330	99%	9246	9266	101%
14.	Pelatihan Imunisasi	Orang	223.888.000	216.368.000	96%	23	23	100%

15.	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Orang	676.796.000	672.074.900	99%	172	172	100%
16.	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Orang	891.325.000	831.195.000	93%	150	150	100%
17.	Pelatihan Surveilans dan Respon KLB/ Wabah	Orang	117.844.000	115.424.000	97%	30	30	100%
18.	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Dekonsentrasi) (LP)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	240.845.000	212.019.000	88%	1	1	100%
19.	Provinsi/Kab/kota yang dilakukan fasilitasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pemberian TTD Bagi Remaja	Provinsi	29.885.000	27.920.000	93%	1	1	100%
20.	Rumah Sakit yang mampu dalam melaksanakan evaluasi penggunaan obat esensial untuk penanganan penyakit prioritas nasional yang sesuai dengan Formularium Nasional (LR)	Lembaga	9.300.000	9.300.000	100%	47	47	100%
21.	Tenaga Kesehatan yang diorientasi terkait Integrasi Layanan Primer (LP)	orang	458.920.000	447.936.000	98%	65	65	100%
22.	Tenaga Kesehatan/ non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Surveilans gizi dan KIA (LP)	orang	158.900.000	142.452.916	90%	194	194	100%
23.	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pemberian TTD Bagi Remaja (LP)	orang	131.815.000	130.921.000	99%	60	60	100%
24.	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan	orang	321.395.000	318.625.000	99%	30	30	100%

	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita							
25.	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	orang	287.484.000	253.460.000	88%	125	125	100%

Sumber: SINTESA (diolah)

Terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan yang dilakukan Satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan selama periode TA 2023 yaitu pengendalian penyakit, penguatan sistem kesehatan, penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan intervensi stunting. Program pengendalian penyakit dilakukan antara lain melalui pemberian pelatihan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelatihan pencegahan dan penyakit tidak menular dan Rumah Sakit yang mampu dalam melaksanakan evaluasi penggunaan obat esensial untuk penanganan penyakit prioritas nasional yang sesuai dengan Formularium Nasional (LR) yang terealisasi sebesar Rp1.512.569.900,- atau 95,88% dengan capaian output sebesar 100%.

Terkait upaya penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan intervensi stunting hingga Desember 2023 terealisasi sebesar Rp1.089.746.916,- atau sebesar 94,47% total dari pagu senilai Rp1.155.867.000,-. Namun meskipun hanya terealisasi sebesar 94,47% persentase outputnya telah mencapai 100% yang berarti kegiatan benar-benar telah disampaikan kepada penerima manfaat.

Selanjutnya dalam upaya penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan intervensi stunting kegiatan yang telah dilaksanakan yang sudah dianggarkan diantaranya Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita, Pelatihan Imunisasi, Tenaga Kesehatan/ non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Surveilans

gizi dan KIA (LP) dan Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pemberian TTD Bagi Remaja (LP).

c. Bidang Pendidikan

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".

Salah satu upaya peningkatan akses dan penjaminan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk pemenuhan dan penuntasan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota perlu memprioritaskan pemenuhan dan penuntasan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

DAK Fisik bidang pendidikan Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

- Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan keterjaminan akses,

dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah dengan kinerja pendidikan rendah.

- b. Memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk menyelenggarakan layanan minimal pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan dan
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan Kawasan prioritas, Major project, dan sektor prioritas nasional.

Terdapat 5 (lima) satker yang berkedudukan di Kalimantan Selatan yang melaksanakan RO Harmonis K/L yaitu BGP Provinsi Kalimantan Selatan, BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Bahasa Kalimantan Selatan Dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Propinsi Kalimantan Selatan. Hingga 31

Desember 2023 capaian RO Bidang Pendidikan terealisasi sebesar Rp4.688.577.0399,- atau sebesar 98,18% dari pagu sebesar Rp47.752.665.000,-. Rincian kegiatan RO Harmonis yang dilakukan oleh satker-satker Bidang Pendidikan di Kalimantan Selatan pada tabel berikut.

Pagu RO Harmonis Bidang Pendidikan digunakan untuk peningkatan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK melalui program Pendidikan kepemimpinan sekolah model baru, fasilitas penjaminan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah, rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah, peningkatan kompetensi dengan mengikuti inovasi pembelajaran bagi guru dan tenaga kependidikan, penutur Bahasa terbina dan penutur Bahasa terpuji dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 4.7 Rincian Kegiatan RO Harmonis Bidang Pendidikan

No	Nama RO	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
1	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	7.879.297.000	7.401.311.630	93%	1.166	1.189	102%
2	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	623.798.000	623.733.113	99%	300	360	120%
3	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	20.844.639.000	20.784.670.889	99%	1.144	1.436	126%
4	Penutur bahasa terbina	orang	445.730.000	487.802.500	109%	287	305	106%
5	Penutur bahasa teruji	orang	97.190.000	84.472.700	86%	52	60	115%
6	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi	lembaga	340.041.000	325.663.096	96%	1	1	100%
7	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah	unit	6.896.490.000	6.844.844.500	99%	1	1	100%

	Dasardan Menengah							
8	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	9.487.789.000	9.229.499.871	97%	3.795	5.398	142%
9	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	1.137.691.000	1.104.772.100	97%	4.078	4.466	110%

Sumber: SINTESA (diolah)

d. Bidang Pertanian

Kebijakan Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Pertanian diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan dan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian.

Tujuannya ialah untuk meningkatkan produksi dan cadangan pangan nasional, meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan kesejahteraan petani dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan Food Estate dan Kawasan Sentra Produksi Pangan dengan sasaran terfasilitasinya pembangunan/renovasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Balai dan sarana prasarana infrastruktur pertanian di daerah. Untuk sasaran penerimanya adalah Kelompok Tani (Poktan)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Korporasi Petani.

RO Harmonis bidang pertanian diantaranya untuk ternak ruminansia potong, pakan olahan dan bahan pakan, prasarana balai perbibitan ternak, ternak unggas dan aneka ternak, area penyaluran benih padi, pelayanan kesehatan hewan, bibit ternak unggul, area penyaluran benih jagung, pelayanan Kesehatan hewan, areal pengendalian OPT tanaman pangan, benih sebar umbi/rimpang hortikultura, sarana balai perbibitan ternak, pelatihan pertanian bagi non aparatur, hijauan pakan ternak dan sertifikat benih padi dengan realisasi hingga Desember 2023 realisasi anggaran mencapai sebesar 97,64% atau sebesar Rp88.134.242.969,- dari pagu Rp90.259.046.000,-. Capaian RO Harmonis terendah 28% dan tertinggi sebesar 100%. Rendahnya capaian disebabkan kurangnya perencanaan.

Tabel 4.8 Rincian Kegiatan RO Harmonis Bidang Pertanian

No	Nama RO	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
1	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Hektar	607.050.000	580.102.860	95%	25	20	80%
2	Area penanganan DPI Hortikultura	Unit	250.000.000	249.430.000	99%	10	10	100%
3	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Hektar	113.325.000	102.938.140	90%	50	50	100%

4	Area pengendalian OPT Hortikultura	Unit	704.000.000	695.021.750	98%	151	151	100%
5	Area penyaluran benih jagung	Hektar	3.150.000.000	3.145.880.400	99%	5000	5000	100%
6	Area penyaluran benih padi	Hektar	6.982.875.000	5.938.457.250	85%	25.000	25.000	34%
7	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Hektar	2.086.657.000	2.086.657.000	100%	30	30	100%
8	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	Unit	1.970.976.000	1.912.656.910	97%	50	50	100%
9	Benih sumber aneka kacang yang dihasilkan	Unit	363.000.000	233.197.868	64%	12.000	12.000	100%
10	Benih sumber kedelai yang dihasilkan	Unit	315.250.000	197.550.198	63%	13.000	13.000	100%
11	Benih sumber padi yang dihasilkan	Unit	470.000.000	414.498.685	88%	37.500	37.500	100%
12	Bibit Ternak Unggul	Produk	5.346.280.000	5.319.197.619	99%	907,621	754,073	83%
13	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Irigasi Pertanian	Kegiatan	50.000.000	49.846.850	99%	1	1	100%
14	Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan	Produk	100.000.000	93.047.150	93%	50	50	100%
15	Hijauan Pakan Ternak	Unit	1.293.400.000	1.287.739.283	99%	20.000	20.000	100%
16	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	Layanan	99.512.000	99.112.000	100%	7	7	100%
17	Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan	Layanan	150.000.000	140.499.800	94%	10	10	100%
18	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah	Unit	23.000.000	22.545.000	98%	9	9	100%
19	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah	Unit	6.000.000	6.000.000	100%	6	6	100%
20	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah	Unit	1.000.000	1.000.000	100%	2	2	100%
21	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Hektar	416.874.000	343.227.028	82%	17	12	71%
22	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan	Lembaga	115.000.000	100.112.562	87%	1	1	100%

	pemasaran dan ekspor							
23	Pakan Olahan dan bahan pakan	Unit	11.715.750.000	11.714.332.910	100%	1	1	100%
24	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	Orang	1.032.949.000	1.026.681.103	99%	980	700	71%
25	Pelayanan Kesehatan Hewan	Layanan	2.537.760.000	2.251.650.000	99%	253.776	72.156	28%
26	Pelayanan Kesehatan Hewan	Layanan	875.370.000	875.141.600	100%	1	1	100%
27	Penumbuhan dan Penguatan P4S	Lembaga	283.608.000	283.588.365	100%	9	8	89%
28	Perangkat Perlindungan Perkebunan	Unit	128.400.000	127.598.500	99%	2	2	100%
29	Prasarana Balai Perbibitan Ternak	Unit	9.223.032.000	9.195.078.700	100%	14	14	100%
30	Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	720.000.000	701.830.000	97%	3	3	100%
31	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	160.000.000	157.791.000	99%	1	1	100%
32	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	15.000.000	14.778.000	99%	1	1	100%
33	Sarana Balai Perbibitan Ternak	Unit	1.697.648.000	1.694.134.180	100%	6	6	100%
34	Sarana Laboratorium Standardisasi	Unit	671.550.000	671.550.000	100%	1	1	100%
35	Sarana Laboratorium Standardisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Unit	0	0	0%	8	0	0%
36	Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	330.000.000	326.155.000	99%	3	3	100%
37	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Unit	762.375.000	599.154.000	79%	13	13	100%
38	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	352.478.000	332.901.630	94%	1	1	100%
39	Sarana Pemasaran Hortikultura	Unit	35.000.000	30.099.750	86%	1	1	100%
40	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	25.000.000	24.789.600	99%	1	1	100%
41	Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	300.000.000	291.411.000	97%	3	3	100%
42	Sertifikat Benih Hortikultura	Produk	250.313.000	235.079.250	94%	250	200	80%
43	Sertifikat Benih jagung	Produk	162.000.000	161.300.000	100%	100	100	100%
44	Sertifikat Benih padi	Produk	715.962.000	680.555.600	95%	4.400	4.400	100%
45	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Kegiatan	200.000.000	196.470.000	98%	1	1	100%

46	Ternak Ruminansia Potong	Ekor	17.300.000.000	17.297.755.346	100%	1.670	1.670	100%
47	Ternak Ruminansia Potong	Ekor	7.254.560.000	7.246.291.636	100%	915	915	100%
48	Ternak Unggas dan Aneka Ternak	Ekor	7.963.202.000	7.792.419.096	98%	55.000	55.000	100%
49	Ternak Unggas dan Aneka Ternak	Ekor	1.219.000.000	1.217.253.378	100%	23.000	23.000	100%

Sumber: SINTESA (diolah)

e. Bidang Transportasi Pedesaan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2023 diharapkan mempercepat laju pertumbuhan daerah sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional. Kebijakan penggunaan DAK Fisik Bidang transportasi Perdesaan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas penumpang dan barang terhadap pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian di kabupaten yang merupakan daerah tertinggal, Kawasan perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dan kawasan transmigrasi.

RO Harmonis Bidang Transportasi Pedesaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Barito Kuala dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Tanah Bumbu sebagai berikut:

Realisasi anggaran dalam tahun 2023 mencapai 100% atau sebesar Rp4.624.173.000 dari pagu sebesar Rp4.625.429.000,- atau 99,97% dengan capaian RO Harmonis 100%.

Tabel 4.9 Rincian Kegiatan RO Harmonis Bidang Pedesaan

No	Nama RO	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Volume RO	Realisasi RO	% Capaian RO
1	Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Km	3.310.000.000	3.309.591.000	100%	3	3	100%
2	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	Km	1.115.429.000	1.114.832.000	100%	2	2	100%
3	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	Km	200.000.000	199.750.000	100%	1	1	100%

Sumber: SINTESA (diolah)

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2023 yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pergerakan penumpang dan barang yang menghubungkan desa-desa di daerah tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah, kawasan transmigrasi, kecamatan lokasi prioritas perbatasan dan desa-desa di kabupaten menuju fasilitas pelayanan dasar dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

4.3 Kendala dan Tantangan

Dalam upaya merealisasikan program-program kegiatan yang sudah direncanakan dalam RO Harmonis terdapat beberapa kendala yang dihadapi satker. Kendala-kendala tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kluster permasalahan yaitu:

- Penganggaran
- Sumber Daya manusia
- Eksekusi Kegiatan

- d. Pengadaan Barang dan Jasa
- e. Regulasi pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan hasil Identifikasi diketahui beberapa kendala yang dihadapi satker selama pelaksanaan anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Kendala Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

a. Penganggaran			Satker
	Revisi Anggaran	Pengalihan pembebanan dari 526 ke persediaan	BALAI VETERINER BANJARBARU
	Halaman III DIPA	Penambahan 1 katalog	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALSEL
			DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALSEL
			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALSEL
			PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALSEL
			PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALSEL
	Blokir Anggaran	Buka blokir baru dapat dilakukan di Triwulan IV (Oktober), sehingga tersisa waktu yang cukup singkat untuk pelaksanaan kegiatan.	BGP PROVINSI KALSEL
		Baru di buka bulan feb	BP TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
	Automatic Adjustment		BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
	Kelebihan penganggaran		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
b. Sumber Daya manusia			
	Kekurangan SDM		BALAI VETERINER BANJARBARU
	Pergantian pejabat perbendaharaan		BP TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
	Kemampuan SDM	Pemahaman terhadap aplikasi yang masih perlu ditingkatkan	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALSEL
		Sering terkendala adanya gangguan aplikasi SAKTI	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL PROV KALSEL
			DINAS KESEHATAN PROVINSI KALSEL
c. Eksekusi Kegiatan			
	Faktor Luar (Cuaca, Lokasi, Keamanan)		PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALSEL
			PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALSEL
	Harga dibawah fullboard		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
d. Pengadaan Barang dan Jasa			
	TKDN	Pengadaan alat dan mesin berupa impor terkendala TKDN dan memerlukan izin Menteri Pertanian yang memerlukan proses yang lama.	BP TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
	E-catalog	Untuk pengadaan obat bagi ibu dan peningkatan gizi bagi ibu, harga yang tercantum di e-katalog sering terjadi kenaikan dan penurunan. Sementara itu, harga yang disusun oleh Satker Dekonsentrasi berdasarkan SHS (Standar Harga Satuan) yang ditetapkan Gubernur lebih rendah dari harga pada e-katalog.	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
	Nilai Kontrak dibawah pagu	optimalisasi sisa kontrak	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA

			DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TANAH BUMBU
	Putus kontrak		PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALSEL
	Kontrak baru dimulai pertengahan Juni dan sampai dengan triwulan III masih tersisa 900 juta baru pendaftaran kontrak		BALAI VETERINER BANJARBARU
	Penyedia terlambat menyediakan stok benih		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV KALSEL
	Proses lelang baru dimulai triwulan III		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALSEL
	Proses lelang	1. Keterlambatan dalam penyampaian data kontrak dan karena pergantian pejabat perbendaharaan yang cukup memakan waktu. 2. Pergantian pejabat perbendaharaan baru dapat dilakukan ketika seluruh transaksi yang melibatkan pejabat lama telah diselesaikan. Pada transaksi ada yang belum terselesaikan sehingga perubahan pejabat memakan waktu sekitar 1 minggu. 3. Terdapat 4 kontrak yang baru ditandatangani di Triwulan ke IV.	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL PROVINSI KALSEL
	Proses kontrak	Paket pekerjaan baru terkontrak pada bulan Agustus, sehingga progress fisik di lapangan masih rendah	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL PROVINSI KASEL
		Paket pekerjaan baru terkontrak pada bulan Agustus, sehingga progress fisik di lapangan masih rendah. Paket pekerjaan baru terkontrak pada bulan September, sehingga progress fisik di lapangan masih rendah.	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALSEL
		SK Penetapan Penerima Bantuan (CPCL) baru turun akhir Oktober sehingga eksekusi kegiatan berupa kontrak baru dilakukan awal November	BP TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
		Paket pekerjaan Duplikasi Jembatan S.Paringin mengalami putus kontrak pada tanggal 15 September 2023 akibat rekanan (berasal dari luar daerah) tidak menguasai medan dan tidak menyanggupi pembangunan tersebut.	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALSEL
e. Regulasi pelaksanaan Anggaran :			
	Produktifitas pekerjaan (produksi baja) di lapangan yang rendah		PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALSEL
	Tempat pelaksanaan kegiatan wajib di Balai Pelatihan Kesehatan Kalsel. Sementara harga yang ditetapkan Bapelkes di bawah harga Fullboard (sesuai Pergub), sehingga pembayaran dialokasikan pada tiap-tiap pos (seperti belanja bahan, perijin, honor penajar, dan biaya pelaksanaan). Harga Obat di e-katalog melebihi harga yang dianggarkan, karena penganggarannya berdasarkan Pergub (Standar Harga Satuan).		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
	Refocusing anggaran mendekati akhir tahun dan pengalihan pembebanan yang memerlukan proses yang lama		BALAI VETERINER BANJARBARU
	Regulasi ditetapkan dalam bentuk Petunjuk Teknis dari Kementerian Kesehatan. Penetapan Juknis telah dilakukan sebelum Tahun Anggaran berjalan, sehingga tidak menghambat realisasi kegiatan.		DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

	Data kelompok penerima bantuan baru turun di bulan September		BALAI VETERINER BANJARBARU
	Regulasi K/L dalam hal SK penetapan penerima bantuan (CPCL) yang terlambat diterbitkan		BP TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI

4.4 Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

Salah satu wujud pelaksanaan harmonisasi antara satker K/L dengan Pemda dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan di daerah, dibutuhkan adanya Kerjasama antara satker K/L dan Pemda, terutama dalam hal perencanaan target output seperti target penerima manfaat, lokasi kegiatan/pekerjaan yang diharapkan bisa saling mendukung demi pemerataan pembangunan.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui sinergi dan pembahasan bersama baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB V: ANALISIS TEMATIK

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Selatan

1

Dukungan APBN dan APBD di Kalsel dalam berbagai program di bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh untuk meningkatkan kualitas SDM (Tenaga Kerja).

2

Penciptaan iklim usaha/investasi yang kondusif dilakukan dengan memperhatikan stabilitas politik dan sosial, stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar, sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja, regulasi dan perpajakan, birokrasi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah, dan masalah *good governance* termasuk korupsi.

3

Sektor-sektor prioritas yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan di antaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian Tanaman Pangan; Perkebunan Semusim dan Tahunan; Konstruksi; Jasa Pendidikan Swasta; Industri Makanan dan Minuman; Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Swasta Lainnya; serta Penyediaan Makan Minum.





BAB V ANALISIS TEMATIK: SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM UPAYA PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING

5.1 Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari adanya interaksi dan partisipasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang merupakan *input* pembangunan, tenaga kerja, dan juga sebagai konsumen dari hasil pembangunan. Namun, meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya pasokan tenaga kerja yang ada tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja tersebut kemudian menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia.

Mulyadi (2016) menyebutkan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan merupakan penyebab utama pengangguran. Keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan *supply* (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta. Akibatnya timbul kelompok angkatan kerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Kelompok angkatan kerja yang berpendidikan cukup dan sesuai dengan tawaran lapangan pekerjaan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di sebuah negara atau wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilis Berita Resmi Statistik menerangkan bahwa TPT di Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen dibanding

Agustus 2022. Adapun TPT Kalsel Agustus 2023 sebesar 4,31 persen, turun 0,43 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Seiring dengan hal tersebut, pengurangan tingkat pengangguran merupakan salah satu Tujuan 8 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya antara lain meliputi penciptaan lapangan kerja layak (Tujuan 8.5), serta mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan; atau pelatihan (NEET) (Tujuan 8.6). Pengurangan tingkat pengangguran juga menjadi salah satu target pembangunan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pemerintah menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,3–3,6 persen pada tahun 2024. Sedangkan TPT Kalsel ditargetkan turun menjadi 4,95–3,71 pada tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus Pemerintah agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan sosial (kemiskinan dan kerawanan sosial) yang terjadi di kemudian hari. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa tingkat pendidikan, akses pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran suatu daerah atau negara. Oleh karena itu, intervensi pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kemudian diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi.

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran tersebut, diperlukan dukungan APBN dan APBD dalam berbagai program

pemerintah, salah satunya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Dukungan APBN dilakukan melalui pengalokasian belanja pemerintah, baik melalui Kementerian Negara/Lembaga terkait maupun penyaluran belanja ke daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah, salah satunya adalah belanja

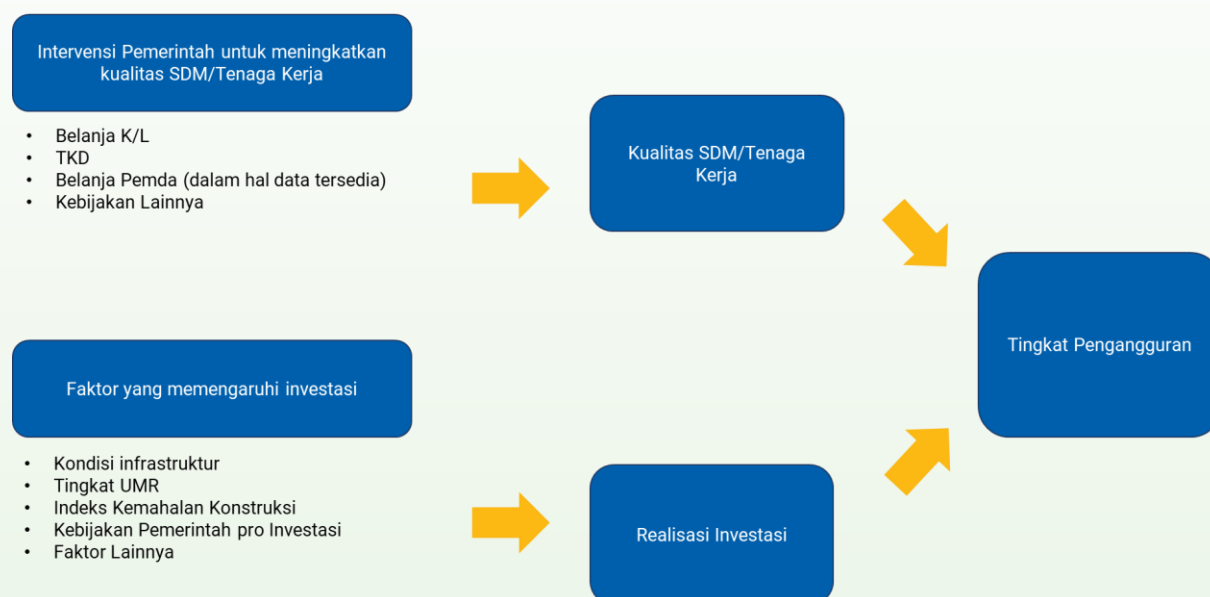
DAK, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada bidang Pendidikan. Selain APBN, Pemerintah Daerah melalui APBD juga berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran sesuai arah dan kebijakan program pembangunan daerah dalam RPJMD.



Selain dukungan belanja Pemerintah, investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Paramita dan Christianingrum (2017) menyebutkan bahwa investasi memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Hal ini karena investasi akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi yang nantinya akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan per kapita yang kemudian akan meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI juga mengatakan bahwa investasi merupakan pintu masuk dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mensejahterakan masyarakat, dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas Indonesia. Oleh karena itu, kemudahan berinvestasi, kemudahan izin usaha, serta iklim investasi merupakan hal penting dalam mendorong masuknya investor ke suatu daerah dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini akan dilakukan analisis lebih lanjut dan mendalam terhadap upaya pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing. Secara garis besar kerangka konseptual dari analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

KERANGKA KONSEPTUAL ANALISIS



5.2 Sinergi Pusat-Daerah dalam Upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis hubungan antar variabel untuk melihat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tingkat pengangguran.

5.2.1 Peningkatan Kualitas SDM/Tenaga Kerja

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa TPT tertinggi (Agustus 2023) terdapat pada pendidikan tingkat menengah (SMA Umum dan Kejuruan), yaitu sebesar 8,60 persen. Pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa terdapat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada lulusan pendidikan tingkat menengah. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebutkan bahwa salah satu tantangan dalam penurunan pengangguran di Indonesia adalah pengangguran yang mengalami *hopeless of job* atau pengangguran yang merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan.

Dari total 7,86 juta orang pengangguran, sebanyak 1,05 juta atau 13,41 persen mengalami *hopeless of job*. Dari 1,05 juta orang pengangguran yang mengalami situasi *hopeless of job* tersebut, sekitar 60,15 persen memiliki pendidikan rendah (lulusan SMP ke bawah). Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat

pendidikan yang ditamatkan tersebut tidak mampu menyiapkan tenaga kerja yang ada untuk memasuki pasar kerja, baik pendidikan yang rendah maupun kompetensi yang dimiliki.

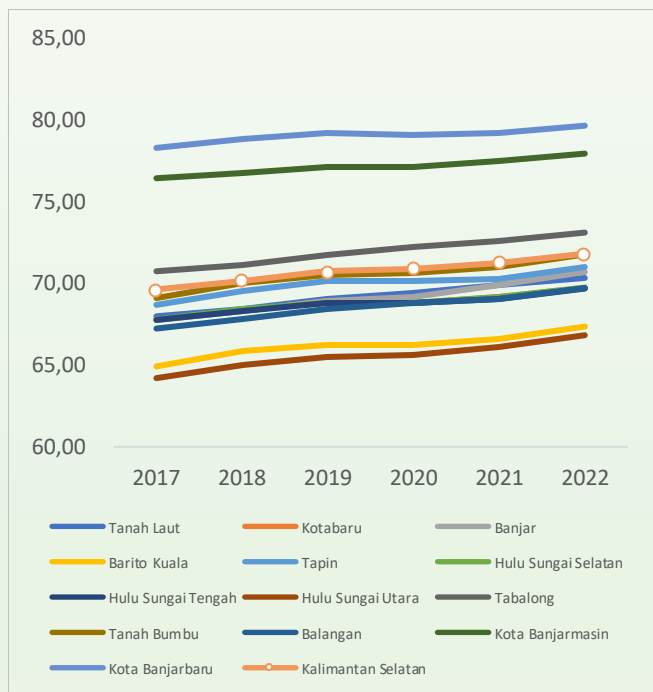
Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan intervensi pemerintah pada sektor pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi SDM untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kemudian diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi. Berbagai intervensi telah dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas guru, manajemen sekolah, serta proses belajar mengajar peserta didik. Selain intervensi tersebut, terdapat kebijakan *Active Labour Market Policy* (AMLP) yang diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif.

Salah satu poin kebijakan AMLP tersebut adalah Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk memastikan terlaksanannya pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berkualitas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Revitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan, memperluas akses ke

lapangan kerja, serta meningkatkan *link and match* antara *demand* dan *supply* ketenagakerjaan. Hal ini diberikan melalui pelaksanaan pendidikan vokasi di Kemendikbudristek, pelatihan vokasi di BLK dan BLKK, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan program transformasi BLK.

5.2.1.1. Kondisi SDM dan Ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan

Grafik 5.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia



sumber: BPS Kalsel

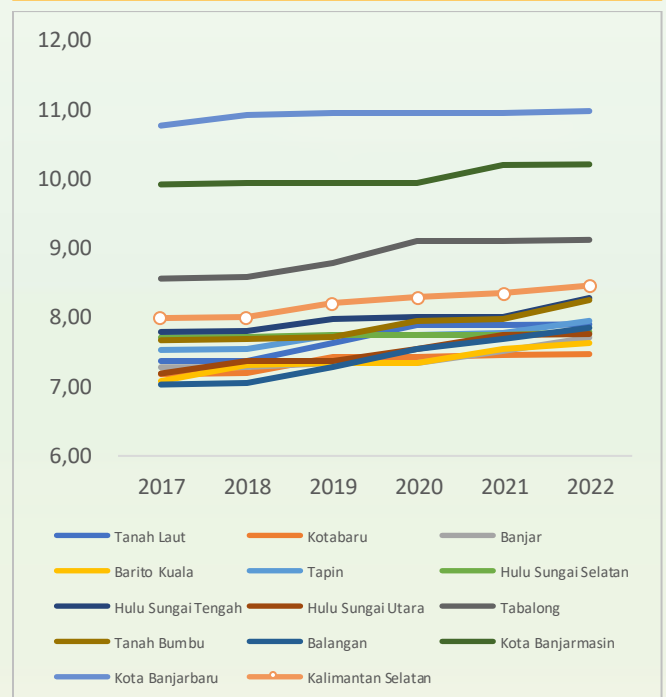
Dalam kurun waktu 2017-2022, pembangunan manusia di Kalimantan Selatan terus mengalami kemajuan. IPM Kalsel rata-rata tumbuh 0,62% per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2018. Setelah sempat ada perlambatan pertumbuhan IPM akibat pandemi COVID-19 sehingga IPM hanya tumbuh 0,27% pada tahun 2020, IPM Kalsel tercatat kembali tumbuh 0,52% pada tahun 2021 dan 0,79% pada tahun 2022.

Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kab. Tabalong merupakan daerah dengan IPM tertinggi dan berada di atas IPM provinsi sedangkan Kab. Hulu Sungai Utara memiliki IPM terendah. Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) sebanyak tujuh, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

Sedangkan enam kabupaten sisanya menyandang status pembangunan manusia dengan capaian “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Sejak 2012 tidak ada lagi kabupaten dengan status pembangunan manusia “rendah” ($\text{IPM} < 60$) setelah status pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”.

Mulai tahun 2023, BPS melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 dengan menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang memberikan gambaran lebih terkini. Namun, data level kabupaten/kota tidak tersedia.

Grafik 5.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

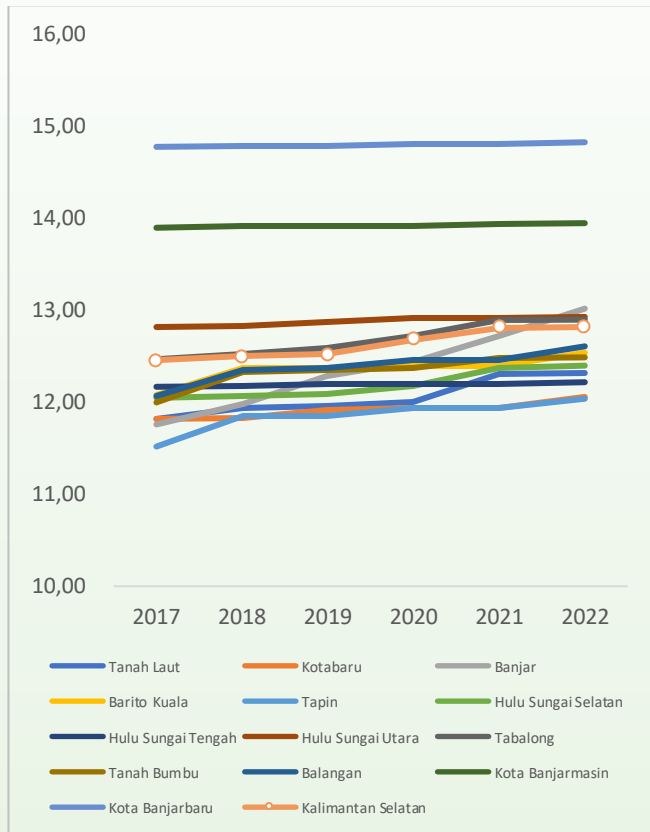


sumber: BPS Kalsel

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Kalsel terus meningkat dari tahun ke tahun, rata-rata tumbuh 1,15% per tahun. Selama periode 2017-2022 RLS Kalsel meningkat 0,47 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Kalsel.

Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kab. Tabalong merupakan daerah dengan RLS tertinggi dan berada di atas RLS provinsi. Kab. Balangan memiliki RLS terendah pada tahun 2017-2019, tetapi pada tahun 2022 RLS Kotabaru menjadi terendah karena pertumbuhannya cenderung lambat sejak tahun 2020.

Grafik 5.3 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)

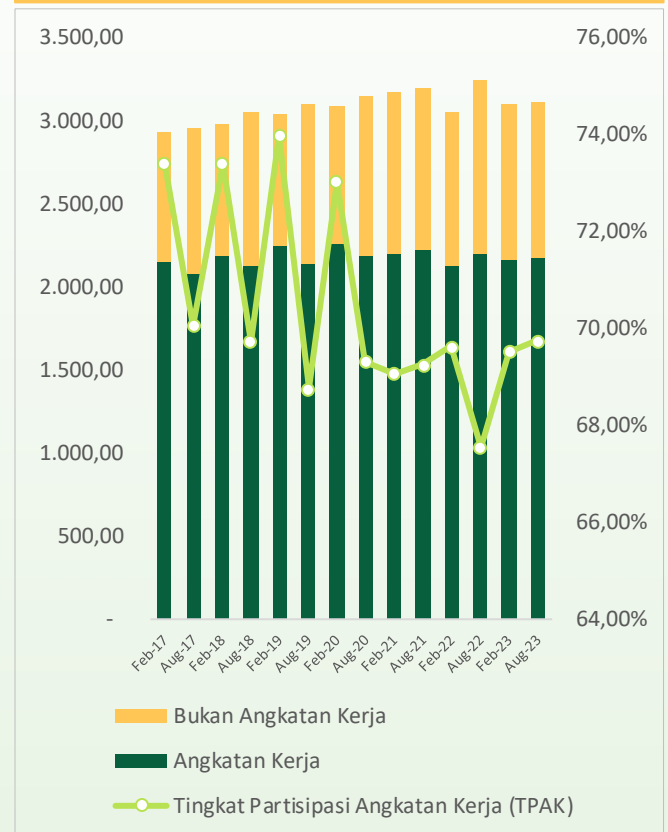


sumber: BPS Kalsel

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas di Kalsel terus meningkat dari tahun ke tahun, rata-rata tumbuh 0,57% per tahun. Selama periode 2017-2022, HLS Kalimantan Selatan telah meningkat 0,36 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Kalsel.

HLS Kalsel 2022 tercatat 12,82 yang berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,82 tahun atau setara dengan Diploma I. Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin merupakan daerah dengan RLS tertinggi dan berada di atas RLS provinsi. Kemudian meskipun memiliki IPM terendah, Kab. Hulu Sungai Utara memiliki HLS yang tinggi, berada di atas HLS provinsi. Kab. Tapin memiliki HLS terendah di Kalsel.

Grafik 5.4 Perkembangan Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan TPAK

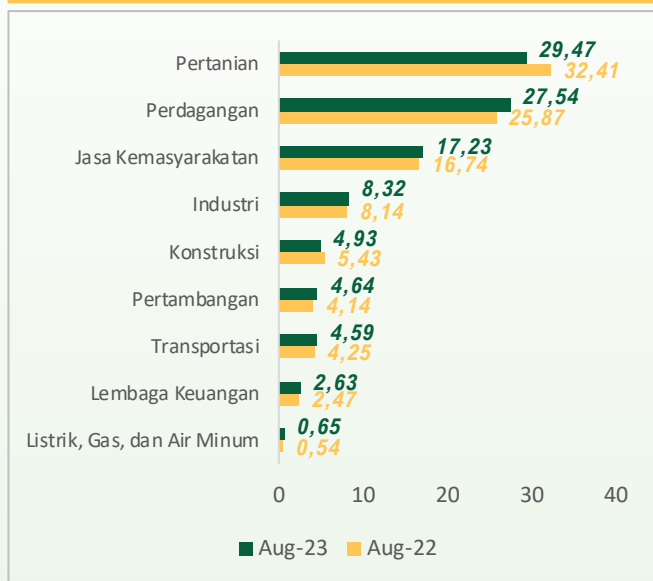


sumber: BPS Kalsel

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas, dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Selama Februari 2017-Agustus 2023, jumlah penduduk usia kerja di Kalsel bertambah 0,18 juta orang. Adapun Penduduk usia kerja di Kalsel kondisi Agustus 2023 sebanyak 3,12 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 2,08 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,09 juta orang pengangguran.

TPAK memiliki tren naik pada Februari dan turun pada Agustus. Hal ini disebabkan fenomena belum terserapnya pelajar-pelajar yang baru saja lulus dari suatu tahun ajaran ke jenjang pendidikan selanjutnya. TPAK terus meningkat seiring menguatnya kondisi perekonomian. TPAK Agustus 2023 69,76%, naik 2,21 persen poin dibanding Agustus 2022, mengindikasikan terdapat 69,76% penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kalsel.

Grafik 5.5 Komposisi Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha (%)



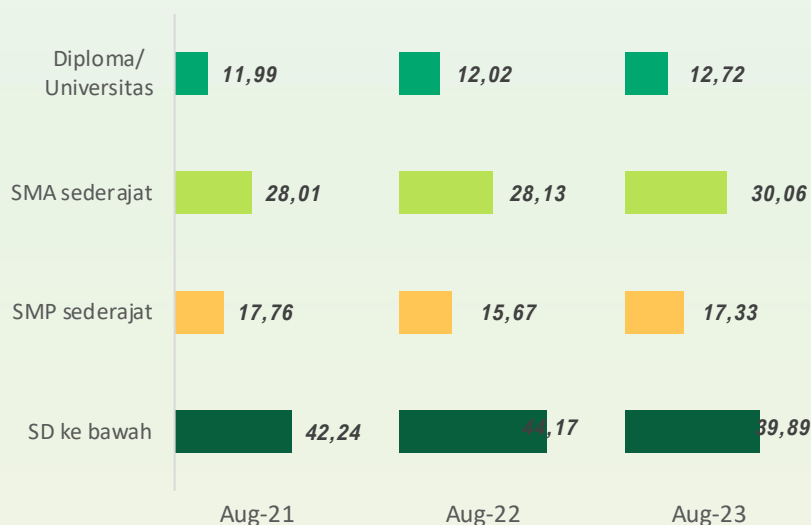
sumber: BPS Kalsel

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, tiga lapangan

pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian (29,47 persen); Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi (27,54 persen); dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (17,23 persen). Pola distribusi lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2022.

Ada tiga lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi (1,67 persen poin), Sektor Pertambangan (0,50 persen poin), dan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (0,48 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase adalah Sektor Pertanian (-2,94 persen poin) dan Sektor Konstruksi (-0,50 persen poin).

Grafik 5.6 Komposisi Tenaga Kerja berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)



sumber: BPS Kalsel

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 39,89 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 12,72 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih

menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2021 dan Agustus 2022.

Dibandingkan dengan Agustus 2022, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebesar 4,28 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMA sederajat, SMP sederajat dan Diploma/Universitas mengalami peningkatan persentase yakni masing-masing sebesar 1,93 persen poin, 1,66 persen poin dan 0,70 persen poin.

5.2.1.2. Analisis Dampak Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kualitas SDM

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari adanya interaksi dan partisipasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang merupakan *input* pembangunan, tenaga kerja, dan juga sebagai konsumen dari hasil pembangunan. Tingkat pendidikan, akses pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran suatu daerah atau negara. Oleh karena itu, intervensi pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kemudian diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi.

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran tersebut, diperlukan dukungan APBN dan APBD dalam berbagai program pemerintah, salah satunya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, serta pelaksanaan padat karya yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di daerah. Selain pendidikan, program-program peningkatan kualitas kesehatan juga penting untuk meningkatkan kualitas SDM.

Dukungan APBN dilakukan melalui pengalokasian belanja pemerintah, baik melalui Kementerian Negara/Lembaga terkait maupun penyaluran belanja ke daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah, salah satunya adalah belanja DAK, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada

bidang Pendidikan dan Kesehatan. Selain APBN, Pemerintah Daerah melalui APBD juga berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran sesuai arah dan kebijakan program pembangunan daerah dalam RPJMD.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada bagian ini dilakukan analisis Dampak Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kualitas SDM menggunakan regresi data panel. Data yang digunakan adalah data panel dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 4 tahun (2020–2023) berupa Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan terdiri dari Belanja K/L, Transfer Ke Daerah dalam hal ini Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik, dan Belanja Daerah sebagai variabel independen serta Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen.

Metode estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)* yang merupakan model terbaik berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman ($P\text{-Value} < 0,05$). Model persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = C + X_1 + X_2 + e$$

di mana:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia
- X_1 = Realisasi Belanja Bidang Pendidikan
- X_2 = Realisasi Belanja Bidang Kesehatan
- e = *error term*

Selanjutnya, hasil pengolahan data yang menghasilkan estimasi persamaan tersebut dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.1 Tabel Estimasi Dampak Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kualitas SDM

```

. xtreg y lnX1 lnX2, fe

```

Fixed-effects (within) regression
Group variable: id

Number of obs = 52
Number of groups = 13

R-sq:
within = 0.4665
between = 0.0279
overall = 0.0391

Obs per group:
min = 4
avg = 4.0
max = 4

corr(u_i, Xb) = -0.5060

F(2,37) = 16.18
Prob > F = 0.0000

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
lnX1	1.705023	.4862499	3.51	0.001	.7197867	2.690258
lnX2	1.010804	.3970277	2.55	0.015	.2063499	1.815259
_cons	.1985016	12.88444	0.02	0.988	-25.90785	26.30486
sigma_u	1.2777974					
sigma_e	.24632529					
rho	.96416994	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(12, 37) = 80.07

Prob > F = 0.0000

sumber: SINTESA, SIMTRADA GFS, BPS, diolah dengan STATA

Nilai R Square sebesar 0,4665 atau 46,65%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan di Kalsel mampu menjelaskan variabel IPM di Kalsel sebesar 46,65%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Secara simultan, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan di Kalsel berpengaruh terhadap IPM di Kalsel pada alpha 0,05 (Nilai F hitung sebesar 16,18 > F tabel 3,19 dan nilai sig. 0,0000 < 0,05). Sementara secara parsial, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan di Kalsel sama-sama berpengaruh terhadap IPM di Kalsel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan di Kalsel berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalsel dalam kurun waktu 2020 hingga 2023.

5.2.2 Upaya Peningkatan Investasi

Selain intervensi pemerintah, keberhasilan pembangunan tentunya tidak lepas dari peran sektor usaha dalam memutar roda perekonomian. Sektor usaha dapat berupa sektor swasta, badan usaha milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, maupun UMKM. Peran dari sektor usaha ini sangat dipengaruhi oleh iklim usaha/investasi pada suatu wilayah.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Secara lebih konkret, iklim investasi yang kondusif dapat mendorong sektor usaha untuk melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi.

Terdapat sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya risiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak (Sopandi & Nazmulmunir, 2012).

Gambar 5.3 Faktor yang Mempengaruhi Iklim Investasi



Berkenaan dengan hal tersebut, pada subbab ini akan dilakukan analisis untuk melihat keterkaitan antar variabel pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap iklim investasi usaha meliputi Kondisi Kemantapan Jalan,

Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi (UMR/UMP), dengan realisasi investasi menggunakan korelasi sederhana.

Tabel 5.2 Tabel Analisis Korelasi Sederhana antara Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Iklim Investasi Usaha dengan Realisasi Investasi

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 02/22/24 Time: 11:39

Sample: 2013 2022

Included observations: 10

Correlation Probability	LNx1	LNx2	LNx3	LNy
LNx1	1.000000 -----			
LNx2	-0.767895 0.0095	1.000000 -----		
LNx3	-0.374613 0.2862	0.389191 0.2663	1.000000 -----	
LNy	-0.084872 0.8157	0.126680 0.7273	0.173594 0.6315	1.000000 -----

sumber: Kementerian PUPR, BPS, NSWI BKPM, diolah dengan Eviews

Hasil uji statistik mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara Kemantapan Jalan, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Upah Minimum Regional/Provinsi dengan Realisasi Investasi ($P\text{-value} > 0,05$). Hal ini kemungkinan disebabkan masih banyak variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini untuk menjelaskan variabel Realisasi Investasi misal kemudahan urusan perizinan dalam berusaha/berinvestasi.

5.2.3 Pengaruh Kualitas SDM (Tenaga Kerja) dan Tingkat Investasi terhadap Tingkat Pengangguran

Franita, dkk (2019) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia, salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan banyaknya penduduk yang telah memasuki usia kerja dan/atau angkatan kerja. Dengan kata lain, pertambahan penduduk yang telah memasuki usia kerja (*supply*) tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada (*demand*). Menurut *International Labour Organization* (ILO), kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi tenaga kerja yang tercermin dari penduduk usia produktif yang bekerja.

Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada, diperlukan adanya

sektor-sektor unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut tentunya harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, terutama investasi pada proyek-proyek padat karya sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang ada. Investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara.

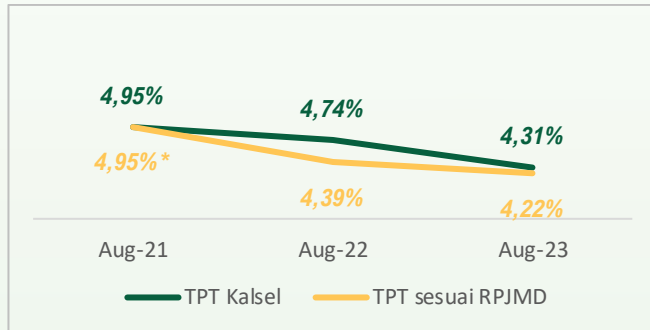
Paramita dan Christianingrum (2017) menyebutkan bahwa investasi memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Hal ini karena investasi akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi yang nantinya akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Investasi yang masuk diharapkan dapat menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian, di mana peningkatan produktivitas, serta kapasitas, dan kualitas produksi pada akhirnya mampu mendorong ekspansi usaha sehingga akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

5.2.3.1. Profil Tingkat Pengangguran di Kalimantan Selatan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun. Pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja yang berdampak

pada penurunan tingkat pengangguran. Meski begitu, TPT Kalsel belum memenuhi target RPJMD sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya penanggulangannya.

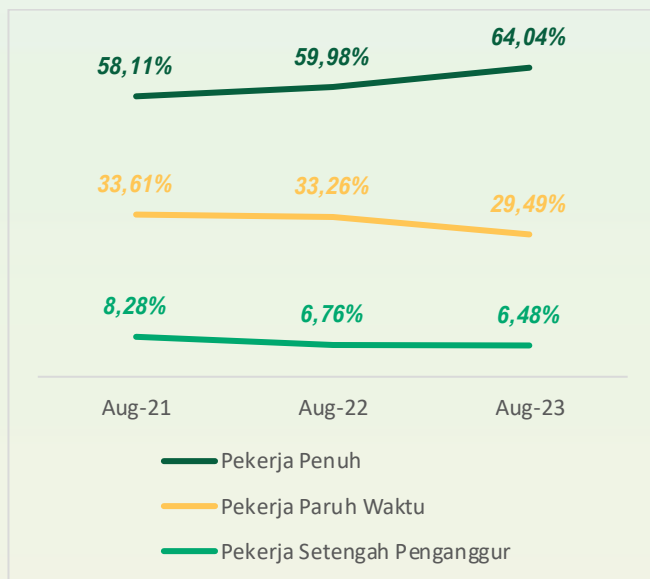
Grafik 5.7 Perbandingan TPT Kalsel dengan Target TPT sesuai RPJMD



sumber: BPS Kalsel dan RPJMD 2021-2026 Kalsel

Apabila dilihat dari jam kerja, Penduduk Bekerja di Kalsel didominasi oleh Pekerja Penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dan proporsinya terus meningkat. Peningkatan jumlah pekerja penuh sejalan dengan terus menguatnya perekonomian.

Grafik 5.8 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

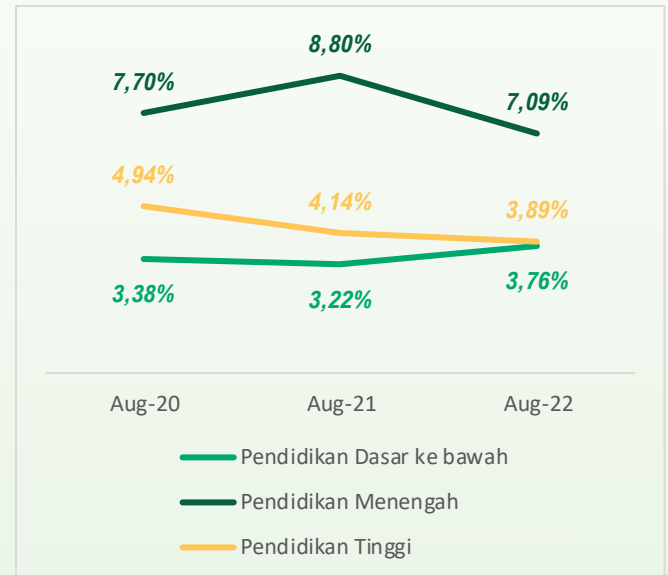


sumber: BPS Kalsel

Sementara apabila dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan, TPT tertinggi terdapat pada pendidikan menengah. Fenomena rendahnya TPT di jenjang pendidikan dasar ke bawah umumnya terjadi di negara berkembang yang belum mampu memberikan jaminan sosial dan tunjangan pendapatan untuk seluruh warga negaranya. Hal ini memaksa seseorang dengan pendidikan rendah untuk melakukan pekerjaan tanpa memprioritaskan kualitas pekerjaan dan besaran balas jasa yang diperoleh. TPT menurut

jenjang pendidikan tinggi Agustus 2022 cenderung menurun dibandingkan dua tahun terakhir, menunjukkan bertambahnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

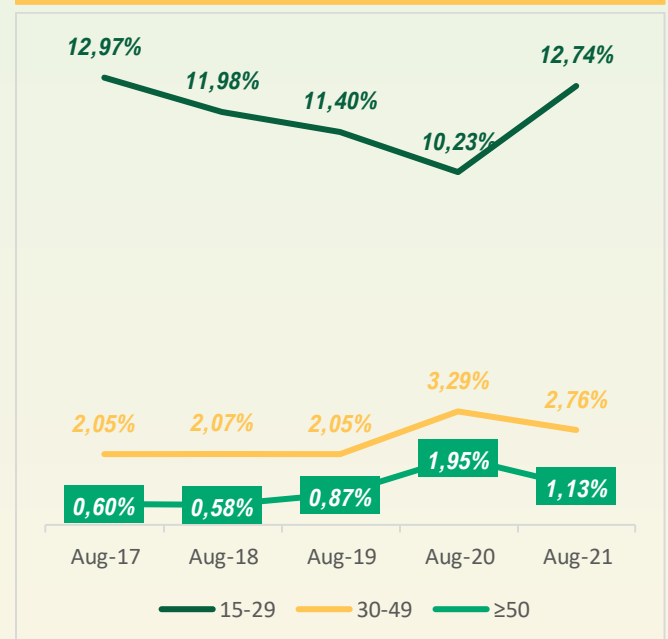
Grafik 5.9 Tingkat pengangguran menurut pendidikan



sumber: BPS Kalsel

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan kelompok usia, TPT tertinggi ada pada kelompok usia 15–29 tahun atau usia muda menunjukkan potensi tenaga kerja kurang termanfaatkan. Adanya pandemi COVID-19 juga berdampak lebih besar pada pekerja usia muda karena memiliki pengalaman lebih sedikit. Kelompok tersebut memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

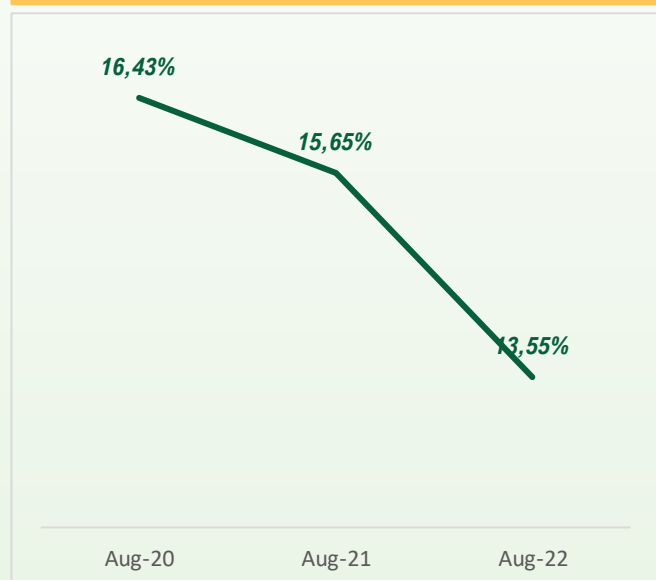
Grafik 5.10 Tingkat Pengangguran Menurut Kelompok Usia



sumber: BPS Kalsel

Selanjutnya, pada grafik berikut dapat dilihat lebih lanjut penduduk usia muda (15-24) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan atau *Not in Education, Employment, or Training* (NEET).

Grafik 5.11 Usia Muda (15-24) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)



sumber: BPS Kalsel

TPT penduduk kelompok Usia muda dalam kurun waktu 2021-2022 mengalami penurunan. Fenomena NEET menarik mengingat penduduk pada kelompok ini sebagian merupakan penduduk usia sekolah yang selayaknya melakukan kegiatan pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi.

Angkatan kerja pada kelompok usia muda ini merupakan angkatan kerja baru yang belum siap memasuki dunia kerja. Ada beberapa latar belakang kelompok usia muda ikut terjun ke pasar kerja, antara lain kesulitan ekonomi sehingga terpaksa berhenti sekolah/kuliah dan masuk dunia kerja. Sebaliknya, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pengalaman dan keahlian menyebabkan mereka ikut terjebak dalam kelompok pengangguran, sehingga menambah akumulasi jumlah pengangguran. Faktor-faktor lainnya ialah kelompok usia muda umumnya masih

bersifat idealis termasuk dalam memilih pekerjaan, misalnya sesuai keinginan, keahlian, hobi, standar gaji, dan gengsi, akibatnya lapangan pekerjaan mereka jadi terbatas. Selain itu kelompok usia muda ini belum banyak memiliki beban tanggungan ekonomi keluarga dan masih ada jaring pengaman ekonomi baginya yaitu keluarga dan masyarakat sosialnya.

5.2.3.2. Analisis Dampak Kualitas SDM (Tenaga Kerja) dan Tingkat Investasi terhadap Tingkat Pengangguran

Pada bagian ini dilakukan analisis Dampak Kualitas SDM (Tenaga Kerja) dan Tingkat Investasi terhadap Tingkat Pengangguran menggunakan regresi data panel. Data yang digunakan adalah data panel dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 4 tahun (2020–2023) berupa Indeks Pembangunan Manusia, Realisasi Investasi, dan Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal menurut lapangan pekerjaan utama sebagai variabel independen serta Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel dependen.

Metode estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM) yang merupakan model terbaik berdasarkan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (P-Value < 0,05). Model persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = C + X_1 + X_2 + X_3 + e$$

di mana:

- Y = Tingkat Pengangguran Terbuka
- X₁ = Indeks Pembangunan Manusia
- X₂ = Realisasi Investasi
- X₃ = Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal menurut lapangan pekerjaan utama
- e = error term

Selanjutnya, hasil pengolahan data yang menghasilkan estimasi persamaan tersebut dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.3 Tabel Estimasi Dampak Kualitas SDM (Tenaga Kerja) dan Tingkat Investasi terhadap Tingkat Pengangguran

. xtreg y x1 ln2 ln3, re

Random-effects GLS regression
Group variable: id

Number of obs = 52
Number of groups = 13

R-sq:

within = 0.0231
between = 0.0661
overall = 0.0563

Obs per group:

min = 4
avg = 4.0
max = 4

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

Wald chi2(3) = 1.34
Prob > chi2 = 0.7198

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
x1	.061704	.3378589	0.18	0.855	-.6004873	.7238954
ln2	.1099075	.1227439	0.90	0.371	-.1306661	.3504812
ln3	-.3952917	.5579913	-0.71	0.479	-1.488935	.6983511
_cons	2.562735	19.19402	0.13	0.894	-35.05685	40.18232
sigma_u	1.4933403					
sigma_e	.53207193					
rho	.88735302	(fraction of variance due to u_i)				

sumber: BPS Kalsel dan NSWI BKPM, diolah dengan STATA

Nilai R Square sebesar 0,0231 atau 2,31%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari IPM, Realisasi Investasi, dan Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal menurut lapangan pekerjaan utama di Kalsel mampu menjelaskan variabel TPT di Kalsel sebesar 2,31%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Secara simultan, IPM, Realisasi Investasi, dan Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal menurut lapangan pekerjaan utama di Kalsel tidak berpengaruh terhadap TPT di Kalsel pada alpha 0,05 (Nilai Chi-Square sebesar 0,7198 > 0,05). Sementara secara parsial, IPM di Kalsel tidak berpengaruh terhadap TPT di Kalsel, Realisasi Investasi di Kalsel berpengaruh terhadap TPT di Kalsel, dan Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal menurut lapangan pekerjaan utama di Kalsel tidak berpengaruh terhadap TPT di Kalsel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari IPM, Realisasi Investasi, dan Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal menurut lapangan pekerjaan utama di Kalsel tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalsel dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Hal ini kemungkinan disebabkan masih banyak variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini untuk

menjelaskan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka. Penjelasan lainnya, hal ini terjadi kemungkinan karena sektor-sektor usaha kurang melibatkan tenaga kerja lokal. Kemudian, para pemilik usaha dalam menggunakan investasinya lebih cenderung untuk melakukan pembelian barang modal dalam bentuk mesin-mesin sebagai pendukung proses produksi. Dengan kata lain, saat ini investasi baru diarahkan ke sektor padat modal dibanding sektor padat karya.

5.2.4 Analisis Perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja di Kalimantan Selatan

Pada bagian ini dilakukan analisis perhitungan elastisitas kesempatan kerja di Kalimantan Selatan menggunakan Tabel Input-Output Provinsi. Analisis input-output merupakan analisis hubungan antar industri atau analisis ketergantungan antar sektor. Dengan menggunakan analisis input-output, maka dapat dilihat dampak secara menyeluruh terhadap dikembangkannya industri unggulan sehingga dampak secara makro akan dapat dihitung.

Persamaan dasar matriks I-O adalah sebagai berikut:

$$AX + Y = X \quad (1)$$

di mana A adalah matriks $n \times n$ Leontief dengan masing-masing elemen dalam matriks A.

Selanjutnya, A_{ij} mewakili jumlah produksi sektor i (sektor baris) yang digunakan sebagai input antara dalam produksi output sektor j (sektor kolom).

$$A_{ij} = X_{ij}/X_j \quad (2)$$

di mana x_{ij} adalah nilai aliran barang atau jasa dari sektor i ke sektor j .

Persamaan yang digunakan dalam perhitungan elastisitas kesempatan kerja adalah sebagai berikut¹:

$$E^v = \hat{g}(I - A')^{-1} \hat{s}$$

di mana:

- E^v = Elastisitas Kesempatan Kerja
- $\hat{g}$ = Diagonal matriks persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut
- I = Matriks identitas
- A' = Transpose matriks A
- $\hat{s}$ = Diagonal matriks nilai tambah

Berdasarkan hasil perhitungan, berikut adalah 10 sektor dengan tingkat elastisitas kesempatan kerja tertinggi.

Sektor-sektor tersebut adalah sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan. Setiap 1% kenaikan nilai tambah pada masing-masing sektor tersebut akan meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0,1654 % pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; 0,1554% pada sektor Pertanian Tanaman Pangan; 0,0974% pada sektor Perkebunan Semusim dan Tahunan; 0,0647% pada sektor Konstruksi; 0,0623% pada sektor Jasa Pendidikan Swasta; 0,0570% pada sektor Industri Makanan dan Minuman; 0,0566% pada sektor Perikanan; 0,0415% pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 0,0313% pada sektor Jasa Swasta Lainnya; dan 0,0273% pada sektor Penyediaan Makan Minum.

Tabel 5.4 10 Sektor Usaha dengan Tingkat Elastisitas Kesempatan Kerja Tertinggi

No	Sektor	Tingkat Elastisitas Kesempatan Kerja
1.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	0,1654
2.	Pertanian Tanaman Pangan	0,1554
3.	Perkebunan Semusim dan Tahunan	0,0974
4.	Konstruksi	0,0647
5.	Jasa Pendidikan Swasta	0,0623
6.	Industri Makanan dan Minuman	0,0570
7.	Perikanan	0,0566
8.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,0415
9.	Jasa Swasta Lainnya	0,0313
10.	Penyediaan Makan Minum	0,0273

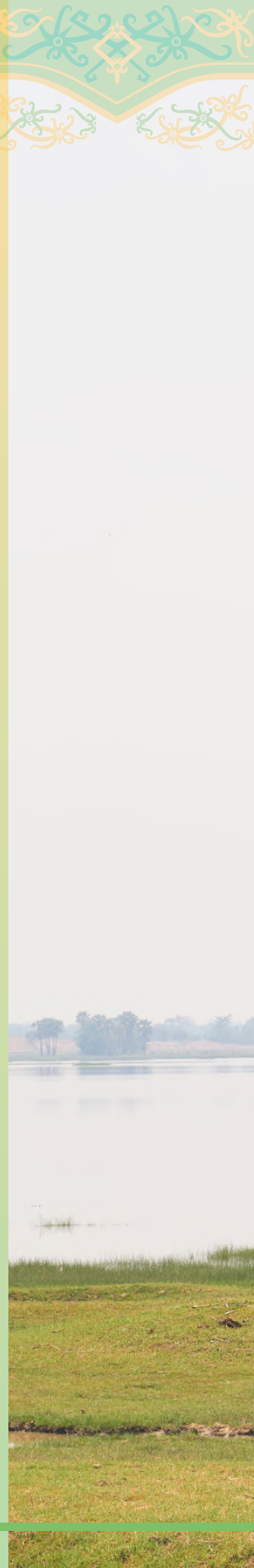
sumber: BPS, Tabel 10 Kalsel Energi Miyazawa 2016, hasil perhitungan penulis

¹ Alcántara V., Padilla E. "Key" sectors in final energy consumption: An input-output application to the Spanish case. Energy Policy, 31 (15), 1673, 2003.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB VI: **KESIMPULAN DAN** **REKOMENDASI**

KAJIAN FISKAL REGIONAL
Kabimantan Selatan





BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada dari bab-bab terdahulu, beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan *highlight* meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Misi dan Tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah selaras dengan RPJMN yaitu: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, meningkatnya toleransi dan nilai-nilai keagamaan, meningkatnya perekonomian daerah, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan daya saing daerah, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya ketahanan bencana.
2. Pada tahun 2023, perlambatan perekonomian global yang disebabkan adanya tekanan geopolitik, risiko inflasi (akibat terdisripsinya rantai pasok), perubahan iklim, serta perkembangan suku bunga masih menjadi tantangan di Indonesia. Kalimantan Selatan pada tahun 2023 ini juga mengalami perlambatan serupa dibanding tahun 2022, yaitu dengan kondisi ekonomi yang tumbuh sebesar 4,84% lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 5,11%. Kinerja perekonomian pada tahun 2023 ini utamanya didorong oleh LU Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh hingga 11,18% dan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR yang tumbuh 8,32% sebagai dampak meningkatnya mobilitas masyarakat yang kemudian didorong dengan banyaknya kegiatan dan event nasional yang terselenggara di Kalsel. Sementara itu, dalam kondisi ini, inflasi secara tahunan di Kalsel menunjukkan penurunan dari tahun lalu, yaitu 2,49% yang lebih rendah dari tahun 2022 mencapai 6,99%. Inflasi yang terkendali merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah dalam menjaga harga komoditas tetap stabil dengan pengendalian dari sisi *supply* dan *demand* pada tahun 2023. Neraca perdagangan Kalsel pada tahun 2023 mengalami tren penurunan akibat melandainya harga komoditas batu bara dan CPO. Walaupun demikian, neraca perdagangan Kalsel masih mengalami surplus hingga 14,88 miliar USD.
3. Pembangunan manusia di Kalimantan Selatan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan yang hingga pada tahun 2023 telah mencapai 74,66 dan lebih tinggi dari angka nasional. Kesejahteraan di Kalsel yang salah satunya diukur dengan tingkat kemiskinan pada Maret 2023 mencapai 4,29% dan menjadi tingkat kemiskinan nomor 2 terendah di Indonesia. Ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan *Gini Ratio* pada Maret 2023 mencapai 0,313 yang berada di bawah angka nasional. Kondisi ketenagakerjaan di Kalsel yang diindikatori Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus tahun 2023 ini mencapai 4,31% dan berada di bawah angka nasional. Kesejahteraan petani yang diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2023 secara gabungan telah mencapai nilai 109,48, sementara kesejahteraan yang diukur dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Desember tahun 2023 mencapai nilai 98,99. NTP dan NTN di Kalsel ditahun 2023 ini masih memiliki besaran yang lebih rendah dari nasional.
4. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2023 di Kalimantan Selatan telah mencapai 130,06% dari target dan mengalami kenaikan hingga 32,55% dari tahun 2022. Kinerja pendapatan yang baik ini didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi masyarakat di Kalsel, walaupun di sisi lain masih diwarnai dengan turunnya beberapa harga komoditas utama Kalsel. Di sisi lain, kinerja belanja telah terserap hingga 99,11% dari pagu dan mengalami pertumbuhan hingga 18,73% dari tahun 2022. Capaian

belanja negara ini didorong oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang tumbuh paling tinggi dari belanja barang, terutama dalam persiapan pemilu 2024 serta didorong oleh kinerja belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang naik karena adanya tambahan dan penyaluran dari tahun lalu. Secara keseluruhan, kinerja APBN di Kalimantan Selatan telah mencatatkan pertumbuhan dari tahun 2022 dan terus mendorong peran fiskal dari pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi serta kesejahteraan daerah.

5. Kinerja pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan menunjukkan realisasi hingga 108,21% dari target dengan peningkatan realisasi sebesar 21,44% dari tahun 2022. Komponen pendapatan ini masih didominasi oleh pendapatan dari dana transfer yang menjadi penopang utama kinerja APBD di Kalsel. Sementara itu, belanja daerah pada tahun 2023 telah terserap sebesar 86,70% dari pagu dan mengalami kenaikan realisasi hingga 23,05% dari tahun sebelumnya. Penyerapan belanja daerah tiap komponennya masih belum maksimal pada tahun 2023 ini. Selain itu, porsi belanja daerah juga masih didominasi oleh belanja operasi sehingga masih belum difokuskan untuk pembangunan daerah secara langsung. Kinerja APBD di Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menunjukkan capaian yang lebih baik dari tahun 2022 dalam rangka mendorong tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang semakin unggul di Kalimantan Selatan.
6. Isu strategis APBN dan APBD di Kalimantan Selatan secara ringkas meliputi hal-hal sebagai berikut:

APBN

- a. Adanya revisi pusat (blokir/*Automatic Adjustment* (AA)) yang tidak terdapat jadwal atas proses pengusulan dan penyelesaian AA pada internal K/L, sehingga menyebabkan rendahnya akurasi perencanaan kegiatan satker.

- b. Seringnya K/L melakukan revisi *Automatic Adjustment* (perubahan komposisi) yang memakan waktu cukup lama sehingga satker harus menunda pelaksanaan kegiatannya karena harus menunggu revisi selesai dan melakukan penyesuaian alokasi dan rencana kegiatan kembali.
- c. Adanya penambahan alokasi pagu di akhir tahun anggaran 2023 sehingga menyebabkan penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.
- d. Proses perikatan kontrak tidak dilakukan pada periode awal tahun anggaran sehingga menyebabkan mundurnya pelaksanaan dan penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran, terlambatnya proses perikatan tersebut disebabkan oleh: (1) Proses perencanaan dan pelelangan (masa sanggah) yang memakan waktu cukup panjang, serta (2) Keterbatasan SDM dalam melaksanakan proses PBJ.
- e. Adanya Inpres 2 Tahun 2022 yang mewajibkan pemenuhan kandungan dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa, sementara vendor/penyedia barang jasa yang memenuhi standar sangat terbatas dan terkadang barang TKDN tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Kinerja realisasi belanja modal terhambat karena sulitnya mendapatkan material yang berada di luar pulau, sehingga jika faktor cuaca tidak mendukung maka terjadi keterlambatan bahan baku dan berdampak pada rendahnya capaian proyek. Keterbatasan jumlah SDM atau tenaga kerja pada musim tertentu dalam penyelesaian proyek juga turut memperlambat progres.
- g. Terlambatnya penetapan calon penerima bantuan/manfaat dari kantor pusat K/L untuk penyaluran bantuan pemerintah akibat penetapan penerima yang memakan waktu lama terutama di lingkungan Kementerian

Pertanian sehingga memperlambat penyaluran.

- h. Progres realisasi DAK Fisik di wilayah Kalimantan Selatan yang cukup lambat salah satunya disebabkan karena Pemda terlambat melaksanakan proses lelang dikarenakan menunggu selesainya proses penyusunan revisi DPA yang memerlukan waktu lama.
- i. Lambatnya penyaluran DAK Fisik juga dikarenakan pemda memiliki tren pengajuan pembayaran tagihan di akhir batas waktu dan cenderung lambat dalam melakukan pencatatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.

APBD

- a. Tingkat kemandirian fiskal di Kalimantan Selatan masih belum optimal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh masih belum mencukupi untuk membiayai sepenuhnya belanja daerah, sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
 - b. Proporsi belanja operasi (penunjang) yang mendominasi belanja APBD membuat masih belum optimalnya akselerasi pembangunan di Kalimantan Selatan dengan realisasi belanja produktif.
 - c. Penyerapan APBD yang masih lambat, terutama untuk belanja modal capaiannya masih belum maksimal hingga akhir tahun.
7. Berdasarkan hasil analisis, bidang jalan memiliki alokasi tertinggi sebesar 83,1% yang menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas antar wilayah. Bidang pertanian memiliki persentase kedua sebesar 9,2% yang menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di tiap daerah. Alokasi sebesar 4,8% untuk Pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan sehingga dapat

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Bidang kesehatan dan keluarga berencana sebesar 2,4% untuk terutama untuk kegiatan penurunan *stunting* di Kalimantan Selatan. Alokasi untuk bidang transportasi pedesaan sebesar 0,5%. Capaian realisasi anggaran secara kumulatif mencapai 99% dan capaian RO Harmonis sebesar 91%. Hasil *tracking analysis* secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan antara Pusat dan Daerah telah selaras walaupun terdapat beberapa kategori yang masih kurang selaras terkait satuan capaian.

- 8. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, Realisasi Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan di Kalsel berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalsel dalam kurun waktu 2020 hingga 2023.
- 9. Berdasarkan hasil analisis korelasi sederhana, tidak ada hubungan signifikan antara Kemantapan Jalan, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Upah Minimum Regional/Provinsi dengan Realisasi Investasi. Hal ini kemungkinan disebabkan masih banyak variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini untuk menjelaskan variabel Realisasi Investasi misal kemudahan urusan perizinan dalam berusaha/berinvestasi.
- 10. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, IPM, Realisasi Investasi, dan Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal menurut lapangan pekerjaan utama di Kalsel tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalsel dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Hal ini kemungkinan disebabkan masih banyak variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini untuk menjelaskan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka. Penjelasan lainnya, hal ini terjadi kemungkinan karena sektor-sektor usaha kurang melibatkan tenaga kerja lokal. Kemudian, para pemilik usaha dalam menggunakan investasinya lebih cenderung untuk melakukan pembelian

barang modal dalam bentuk mesin-mesin sebagai pendukung proses produksi. Dengan kata lain, saat ini investasi baru diarahkan ke sektor padat modal dibanding sektor padat karya.

11. Berdasarkan hasil analisis perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja di Kalimantan Selatan, 10 sektor prioritas yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan di antaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian Tanaman Pangan; Perkebunan Semusim dan Tahunan; Konstruksi; Jasa Pendidikan Swasta; Industri Makanan dan Minuman; Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Swasta Lainnya; serta Penyediaan Makan Minum.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis pada dari bab-bab terdahulu, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan kepada *stakeholders* meliputi hal-hal sebagai berikut.

6.2.1 Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

1. Aspek Perencanaan Penganggaran
 - a. Perlu adanya batasan untuk revisi perubahan komposisi *Automatic Adjustment* oleh Kemenkeu karena memakan waktu cukup lama dan menunda pelaksanaan kegiatan satker.
 - b. Perlunya reformulasi IKPA oleh Kemenkeu atas indikator penyerapan anggaran agar penambahan pagu pada triwulan berkenaan dibebankan pada triwulan yang akan datang.
 - c. Perlu adanya kebijakan penetapan target jumlah kontrak pra DIPA/kontrak dini di setiap Satker K/L agar tidak terjadi penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran, serta dilakukan pemberian *reward and punishment* dalam pelaksanaannya.
 - d. Perlunya penyelarasan alokasi anggaran DAK Fisik di awal tahap perencanaan dan penganggaran serta tagging lokasi kegiatan/proyek yang dijalankan pada

DIPA Satker guna indentifikasi RO Harmonis.

- e. Pemerintah pusat diharapkan melakukan perluasan dan pemerataan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas.
2. Aspek Pendapatan Negara dan Hibah
 - a. Perekonomian Global 2024 diperkirakan stagnan, pemerintah harus mulai melakukan diversifikasi komoditas yang berorientasi ekspor, penambahan negara tujuan ekspor, dan peningkatan kegiatan ekonomi domestik.
 - b. Diperlukan upaya yang lebih dalam mewujudkan hilirisasi sektor unggulan yang bersumber dari sumber daya alam *non-renewable* melalui regulasi dan pengawasan yang lebih tegas dan intensif.
 3. Aspek Belanja Negara dan Hibah
 - a. Diharapkan juknis pelaksanaan DAK Fisik dapat diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga jika pada awal tahun terdapat revisi DPA maka revisi dapat dilakukan dengan lebih cepat, proses lelang juga lebih cepat, dan penyaluran dapat dilakukan dengan segera.
 - b. Isu *stunting* masih tinggi di Kalimantan Selatan, perlu dilakukan evaluasi efektivitas alokasi anggaran pada satuan kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik serta sinerginya dengan Pemerintah Daerah.
 - c. Diperlukan pertimbangan kebijakan yang lebih fleksibel atas penerapan TKDN, sesuai dengan ketersediaan penyedia pada wilayah tertentu yang dapat memberikan barang/jasa sesuai standar yang dipersyaratkan, dengan tetap mengutamakan aspek kualitas.

6.2.2 Rekomendasi untuk Satuan Kerja K/L

1. Aspek Perencanaan Penganggaran
 - a. Perlu adanya penjadwalan atas proses pengusulan dan penyelesaian *Automatic Adjustment* (AA) pada internal K/L dalam

satu tahun anggaran, agar satker dapat menyesuaikan rencana kegiatannya dengan tepat waktu.

- b. Diperlukan simplifikasi aturan penetapan penerima bantuan dan satker agar aktif berkoordinasi dengan penerima dan yang berwenang menetapkan penerima bantuan.

2. Aspek Belanja Negara dan Hibah
Satker K/L memetakan kembali kegiatan/belanja yang dapat dicairkan pada saat terjadi gangguan cuaca sehingga dapat mengantisipasi rendahnya realisasi belanja apabila terdapat hambatan seperti cuaca buruk.

6.2.3 Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

1. Aspek Perencanaan Penganggaran
 - a. Peningkatan kualitas tenaga kerja di Kalsel yang masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah melalui pendidikan kesetaraan dan Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren (PKPP). Selain itu, perlu untuk menggalakkan Program Wajib Belajar 12 tahun yang didukung peningkatan sarana prasarana pendidikan utamanya sekolah negeri.
 - b. Pemerintah daerah agar mendorong terciptanya pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa pelatihan kejuruan, kursus, magang dalam bidang pertanian, industri, pertukangan, dan lain-lain yang diharapkan dapat memberikan andil yang sangat besar untuk mengatasi masalah pengangguran.
 - c. Pemerintah Daerah perlu melakukan hilirisasi untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong UMKM untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat membuka peluang usaha atau kesempatan kerja mandiri.
 - d. Diperlukan pelatihan *soft skill* seiring dengan pelatihan *hard skill* yang diberikan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan mentalitas dan daya saing di dunia kerja misal dengan memasukkannya dalam kurikulum

sekolah maupun kurikulum pelatihan di Balai Latihan Kerja.

- e. Penyediaan informasi potensi daerah yang dapat diakses dengan lebih mudah dan melakukan komunikasi masif kepada calon-calon investor untuk meningkatkan nilai jual terhadap potensi yang dimiliki daerah.

2. Aspek Pendapatan Negara dan Hibah
 - a. Perlunya langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan PAD dengan memanfaatkan digitalisasi dan peluang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sehingga dapat meningkatkan taraf kemandirian daerah.
 - b. Pemda dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) melimpah perlu memberikan prioritas dalam penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang dapat memicu kegiatan ekonomi baru dan menggali sektor-sektor produktif karena daerah tidak selamanya bisa bergantung dari SDA.
 - c. Perlunya percepatan transformasi struktur ekonomi di Kalimantan Selatan dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata maupun industri pengolahan agar perekonomian di Kalimantan Selatan tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan seperti batu bara yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan terbatas.
3. Aspek Belanja Negara dan Hibah
 - a. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan lelang pra DPA seperti yang sudah diaplikasikan pada pemerintah pusat sehingga dapat mengakselerasi kinerja penyaluran DAK Fisik dan kinerja belanja modal. Diperlukannya aturan jadwal pengajuan pembayaran tagihan hingga proses penatausahaan dan pertanggungjawabannya agar penyaluran DAK Fisik dapat terakselerasi.
 - b. Dalam rangka meningkatkan size ekonomi di daerah, khususnya bagi Pemda yang penerimaan daerah dan

- potensi SDA kecil, Pemda perlu meningkatkan kualitas dan mengarahkan belanja pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan daya ungkit yang cukup besar bagi peningkatan aktivitas ekonomi di daerahnya antara lain: (1) pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, (2) peningkatan SDM, dan (3) promosi dan pengembangan potensi daerah agar dapat menarik orang untuk berkunjung atau tinggal di daerah tersebut sehingga dapat memberikan tambahan dalam pertumbuhan aktivitas ekonomi di daerah. Dengan meningkatnya *size* ekonomi akan meningkatkan penerimaan daerah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian fiskal.
- c. Perlunya pemanfaatan elektronifikasi *office* dengan lebih maksimal dalam operasional pelaksanaan sehari-hari, sehingga dapat mengurangi pekerjaan yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh TI dan mewujudkan efisiensi termasuk penurunan belanja operasi.
 - d. Diperlukannya perbaikan tata kelola keuangan daerah untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD, khususnya dalam pengelolaan kontrak di awal tahun untuk mendorong realisasi dan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.
 - e. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja menggunakan mesin-mesin modern, untuk itu diperlukan peningkatan sarana prasarana di Balai Latihan Kerja.
 - f. Diperlukan pembangunan infrastruktur jalan utamanya jalan provinsi dan jalan kabupaten, penyediaan energi misal energi listrik yang mencukupi untuk dunia usaha, serta mewujudkan kemudahan investasi dan berusaha dalam rangka meningkatkan iklim usaha/investasi di Kalsel, untuk itu penyusunan Raperda terkait kemudahan investasi dan berusaha perlu diakselerasi.
 - g. Belanja dan investasi agar diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan di antaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian Tanaman Pangan; Perkebunan Semusim dan Tahunan; Konstruksi; Jasa Pendidikan Swasta; Industri Makanan dan Minuman; Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Swasta Lainnya; serta Penyediaan Makan Minum.
 - h. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kewenangan BPKAD melakukan fungsi *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan APBD dan sekaligus menilai kinerja pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga dapat mengadopsi teknis/cara yang dilakukan Kanwil DJPb dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi seperti *Spending Review*, *Reviu Pelaksanaan Anggaran* (RPA), dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
 - i. Pemerintah daerah perlu mendorong SKPD untuk melakukan percepatan realisasi belanja APBD dengan meningkatkan pengawasan, khususnya untuk realisasi belanja modal dan pemberian insentif kepada SKPD yang berhasil melaksanakan percepatan realisasi belanja.
4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Daerah diharapkan memanfaatkan *creative and sustainable financing* untuk meningkatkan kapasitas pendanaan di Kalsel di antaranya untuk pembebasan lahan kawasan industri agar meningkatkan keyakinan investor.



DAFTAR PUSTAKA

KAJIAN FISKAL REGIONAL
Kabimantan Sebatan

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Laporan

- Alcántara V., Padilla E. (2003). "Key" sectors in final energy consumption: An input-output application to the Spanish case. *Energy Policy*, 31(15), 1673.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. (2022). Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Franita, Riska dkk. (2019). Analisa Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 88-91.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan November 2023. Banjarmasin: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). Infografis Inflasi Kalimantan Selatan 2023. Banjarmasin: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan. (2024). ALCo Desember 2023 Realisasi Penerimaan DJBC Regional Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan.
- Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. (2024). Kinerja Penerimaan Pajak s.d. 31 Desember 2023. Banjarmasin: Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Kalimantan Selatan Tahun 2020 (*Audited*). Banjarmasin: Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Kalimantan Selatan Tahun 2021 (*Audited*). Banjarmasin: Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Kalimantan Selatan Tahun 2022 (*Audited*). Banjarmasin: Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. (2023). Laporan Tahunan Asistensi Pembinaan BLUD lingkup Kalimantan Selatan. Banjarmasin: Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Kalimantan Selatan Tahun 2023 (*Preliminary*). Banjarmasin: Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. (2024). Laporan ALCo Regional Kalimantan Selatan Periode s.d. 31 Desember 2023. Banjarmasin: Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. (2024). Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2023. Banjarmasin: Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat. *Jurnal Kajian*. Vol. 21. No. 3.

Paramita, Rastri dan Ratna Christianingrum. (2017). Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Jurnal Budget, 2(1), 45-63.

Politeknik Kesehatan Banjarmasin. (2023). Laporan Keuangan BLU Politeknik Kesehatan Banjarmasin Triwulan III TA 2023. Banjarbaru: Politeknik Kesehatan Banjarmasin.

Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Banjarmasin. (2023). Laporan Keuangan Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin Triwulan III Tahun 2023. Banjarmasin: Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Banjarmasin.

Sopandi, Andi dan Nandang Nazmulmunir. (2012). Pengembangan Iklim Investasi Daerah. Jurnal Kybernan, 3(1), 10-24.

Universitas Lambung Mangkurat. Laporan Keuangan (*Unaudited*) untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

Dasar Hukum

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lembaga Negara RI Tahun 2020 Nomor 10. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.

Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2. Banjarbaru: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 31. Banjarbaru: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sumber Lain

SIKRI (Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia)

Aplikasi SINTESA/MEBE <https://sintesa.kemenkeu.go.id/>

Aplikasi OMSPAN <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Aplikasi SIMTRADA <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada>

Aplikasi SIKP <https://sikp.kemenkeu.go.id/>

BPS Indonesia <https://www.bps.go.id/>

BPS Provinsi Kalimantan Selatan <https://kalsel.bps.go.id/>

Open Data PUPR <https://data.pu.go.id/>

National Single Window for Investment BKPM <https://nswi.bkpm.go.id/>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia <https://www.kemendag.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
<https://www.minerba.esdm.go.id/>